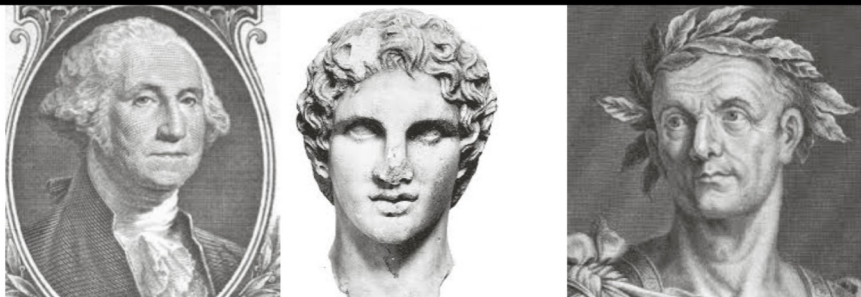


# SEJARAH POLITIK

## (Suatu Tinjauan Teoretik)

**Penyunting Ahli:**  
**YULIA SISKI, M.Pd.**



**Disusun Oleh:**  
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Semester III  
Tahun Pelajaran 2015-2016



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**  
**JURUSAN PENDIDIKAN IPS**  
**STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG**  
**2015**

# **SEJARAH POLITIK**

**(Suatu Tinjauan Teoretik)**

**Disusun Oleh:**

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Semester 3  
Tahun Pelajaran 2015-2016

**Editor:**

YULIA SISKI, M.Pd.



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN IPS  
STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG  
2015**

## **CATATAN EDITOR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan kompilasi makalah ini. Dalam penyelesaian kompilasi ini, kami selaku penyusun banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Buku yang berisi kompilasi makalah ini merupakan kumpulan tugas individu mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 3 pada Matakuliah Sejarah Politik, Jurusan Pendidikan IPS, STKIP PGRI Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015-2016. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam berbagai hal terkait kajian yang masih lemah setidaknya sudah menjadi hasil dari usaha maksimal dari mahasiswa. Untuk tahun-tahun berikutnya semoga akan lebih ditingkatkan lagi.

Akhirnya, kami selaku penyusun hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya dan semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandarlampung, Desember 2015

Editor

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....   | i   |
| CATATAN EDITOR .....  | ii  |
| DAFTAR ISI .....  | iii |
| 1. DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN PLATO HINGGA<br>MARX – Arum Kusuma Darmawati.....    | 1   |
| 2. PERSEPEKTIF POLITIK DALAM HUBUNGAN<br>INTERNASIONAL – Desi Ratna Sari.....     | 12  |
| 3. ILMU POLITIK DENGAN KEKUASAAN SEBAGAI INTI<br>POLITIK – Dina Purwaningsih..... | 17  |
| 4. KETERKAITAN ANTARA AGAMA & MASYARAKAT –<br>Gusti Ayu Putu Eka I.Y.....         | 22  |
| 5. SUMBER KEDUDUKAN AGAMA - Kadek Resianto .....                                  | 28  |
| 6. POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL – Laksmi<br>Permana Sari.....               | 33  |
| 7. IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DI NUSANTARA<br>– Maryati .....                  | 38  |
| 8. SISTEM POLITIK NUSANTARA DALAM<br>HISTORIOGRAFI – Muhammad Ali Umron.....      | 53  |
| 9. POLITIK NEGARA – Rizky Perdana Arisandy.....                                   | 63  |
| 10. KOMUNISME – Sariyati.....   | 67  |
| 11. FASISME - Anis Marifatul Janah .....  | 71  |
| 12. FILSAFAT POLITIK PLATO DAN ARISTOTELES – Meiza<br>Suri .....                  | 77  |

|   |     |
|---|-----|
| 13. ORDE LAMA ORDE BARU: POLITIK HIRUK PIKUK -<br>Doli Hariyanto S.....                     | 87  |
| 14. KONSEP NEGARA INTEGRALISTIK – I Putu Budi Sandika                                       | 111 |
| 15. TEORI KONTRAK SOSIAL – Silvina .....  | 117 |
| 16. FASISME – Wartono .....   | 123 |
| 17. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU NEGARA - Ovie<br>Dwitia Maja.....                             | 130 |
| 18. SISTEM PEMERINTAHAN ORDE LAMA, ORDE BARU,<br>DAN ERA REFORMASI - Renaldi Syaputra ..... | 150 |
| 19. AJARAN KOMUNISME - Rizki fitria ulfa.....   | 160 |
| 20. IMPERIALISME DAN KOLONIALISME – Maryati .....   | 176 |

# BAB I

## DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN PLATO HINGGA MARX

**Arum Kusuma Darmawati**  
**(14140006)**

### **Demokrasi**

Demokrasi adalah Bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara<sup>1</sup>.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia ‘Demokrasi’, <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, Oktober 2013

<sup>2</sup> Norpalla ‘Pengertian Demokrasi’, <https://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/>, 10 Maret 2013

## **Demokrasi Menurut Beberapa Ahli**

### **1. H. Harris Soche (Yogyakarta : Hanindita, 1985)**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

### **2. Hannry B. Mayo**

Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

### **3. International Commission of Jurist**

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

### **4. Abdul Ghani Ar Rahhal**

Di dalam bukunya, *Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrathiyyah* mendefinisikan demokrasi sebagai “kekuasaan rakyat oleh rakyat”. Rakyat adalah sumber kekuasaan. Ia juga menyebutkan bahwa orang yang pertama kali mengungkap teori demokrasi adalah Plato. Menurut Plato, sumber kekuasaan adalah keinginan yang satu bukan majemuk. Definisi ini juga yang dikatakan oleh Muhammad Quthb dalam bukunya *Madzhab Fikriyyah Mu’ashirah*.

### **5. Hans Kelsen**

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana

rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara<sup>3</sup>.

## **6. Joseph A. Schmeter**

Demokrasi merupakan suatu perencanaan instutisional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

## **7. Sidney Hook**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara bebas dari rakyat biasa<sup>4</sup>.

## **Jenis-jenis Demokrasi**

### **1. Demokrasi Langsung,**

Jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan. Demokrasi langsung dilaksanakan melalui penyampaian pendapat secara terbuka oleh rakyat atau referendum (pemungutan suara) untuk mengetahui kehendak rakyat.

### **2. Demokrasi Tidak Langsung/Perwakilan**

Jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan melalui pelibatan wakil rakyat terpilih dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan. Dalam demokrasi tidak langsung/ perwakilan, rakyat menyampaikan kehendaknya melalui wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Norpalia Permanas Blog, '*Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli*', [http://permanaz.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli\\_03.html](http://permanaz.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli_03.html), 2011

<sup>4</sup> Halida, '*Teori-Teori Demokrasi*', <http://halidachanblog.blogspot.co.id/2010/12/teori-teori-demokrasi.html>, 4 Desember 2010

<sup>5</sup> Husainnur's blog, '*Jenis-Jenis Demokrasi*', 4 April 2011



## **Demokrasi dalam Pemikiran Plato hingga Marx**

### **1. Zaman Yunani Kuno, Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)**

Pada zaman Yunani kuno, memperkenalkan metode-metode eksperimental dan spekulatif guna mengembangkan pengetahuan melalui semangat rasionalisme dan empirisme dengan menempatkan akal diatas segala-galanya. Menurut Sokrates bahwa kebenaran dapat dikenali melalui metode retoriknya. Yakni, melalui bukti dan investigasi, dan bertanya terus-menerus.

Sokrates, filsuf terkemuka Negara Yunani kuno sangat kritis dalam membela pemikiran-pemikiran nya yaitu agar kaum muda tidak mempercayai para dewa dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan sejati dengan berani bersikap mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir. Sokrates meyakini adanya kebenaran mutlak. Sokrates menemukan argument untuk membela diri, yaitu dengan metode induksi (penyimpulan dari khusus ke umum)

Plato, menurutnya kebenaran yang mutlak terletak pada ide dan gagasan yang abadi. Landasan pemikiran plato tentang Negara berawal dari idenya yang menggolongkan manusia kedalam kelas Negara, berturut turut dari akal semangat dan nafsu yang kemudian memperoleh interpretasi berbeda yakni sebagai penasihat, militer dan pedagang. Plato mempercayai bahwa masing-masing individu mesti melaksanakan fungsi dengan sebaik-baiknya dan tidak ada pelanggaran hierarkis.

Bagi plato kepentingan orang-seorang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, plato lebih cenderung untuk menciptakan adanya rasa kolektivisme, rasa bersama, daripada penonjolan pribadi orang-perorang. Oleh karena itu, dalam organisasi-masyarakat-negara dalam tujuan itu menghendaki adanya persesuaian dalam fungsi. Jadi, menurut Plato, pembagian pekerjaan di kalangan masyarakat, walaupun pembagian pekerjaan itu bukan terbatas pada ekonomi atau efisiensi kerja, melainkan bersandar pada panggilan kesadaran diri manusia itu sendiri dalam rangka yang sesuai dengan

tujuan hidup. Mengenai cara kehidupan social, Plato mengemukakan semacam komunisme yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamili<sup>6</sup>.

Aristoteles, mengenai demokrasi diungkapkan dalam pandangan nya mengenai warganegara. Menurutnya tidak semua individu dikelompokkan ke dalam warga Negara. Warganegara adalah individu yang memiliki waktu untuk memperluas pengetahuan tentang urusan public dan mengupayakan kewajiban. Sebaliknya, individu yang secara alamiah merupakan budak dan kelas produsen, petani tidak termasuk kategori warganegara. Jadi ketika wewenang diberikan kepada individu secara meluas seperti golongan petani, penghasil produsen dan budak, mengakibatkan negara berada pada bentuk terburuknya.

Ada tiga bentuk Negara menurut Aristoteles, yakni Monarki, Aristokrasi dan Demokrasi. Dari ketiga bentuk Negara itu yang paling mungkin diwujudkan dalam kenyataan adalah demokrasi atau *politea* (polis), berbeda dengan Plato yang lebih memilih kerajaan filsuf. Apabila kekuasaan terletak ditangan orang banyak atau rakyat yang bertujuan demi kepentingan semua masyarakat, maka bentuk Negara itu adalah *Politea*. Akan tetapi, bila Negara dipegang oleh banyak orang (miskin, terdidik) dan bertujuan hanya demi kepentingan mereka, maka bentuk Negara itu demokrasi. Demokrasi seakan memiliki konotasi negative dan Aristoteles tidak menyebutnya sebagai bentuk Negara ideal<sup>7</sup>.

## **2. Abad Pertengahan, Santo Agustinus (354-450) dan Thomas Aquinas (1229-1274)**

Santo agustinus meletakkan bentuk Negara politea yang berdasarkan dengan konsep ketuhanan sebagai Negara yang paling baik. Secara simbolis ia mengungkapkan Demokrasi terletak pada penguasa tunggal, monarki yang merupakan representasi dari Tuhan dan mesti diikuti oleh rakyat umum atas dasar niali kebaikan dan kepatuhan bersama. Dalam beberapa tulisannya dia memperkenalkan konsep pemahaman dalam memahami fenomena budak sebagai keadaan alamiah yang mesti diterima dengan lapang sebagai suatu keadaan dalam

---

<sup>6</sup> Umar Basalim, Masyarakat, Kota dan Negara tiga filsuf besar yunani', *PEMIKIRAN POLITIK BARAT* hlm 26, Juli 2007

<sup>7</sup> Umar Basalim, Masyarakat, Kota dan Negara tiga filsuf besar yunani', *PEMIKIRAN POLITIK BARAT* hlm 32, Juli 2007

rangka upaya untuk menebus dosa. Sehingga ketika wewenang diberikan kepada rakyat secara luas, maka wewenang tersebut cenderung dilaksanakan jauh dari cita-cita Negara Tuhan.

Negara Tuhan berdasarkan cinta kasih Tuhan yang bersifat *immortal*, merupakan factor yang mengintegrasikan Negara menjadi suatu kesatuan politik, yakni kepatuhan warganegara terhadap hukum-hukum Negara dilaksanakan atas kesadaran kolektif, semua dilakukan demi mencapai kebaikan bersama, dan kebaikan bersama ini sebagai perhatian utama dalam Negara Tuhan. Negara Tuhan bersifat *universal*, tidak dibatasi oleh sekat-sekat territorial kebangsaan, suku, bahasa maupun waktu. Ia dapat berlangsung sepanjang masa. Oleh, sebab itu Agustinus percaya bahwa masyarakat atau Negara ideal yang seharusnya dibangun oleh umat kristiani adalah semacam “Negara” Persemakmuran Kristiani<sup>8</sup>.

Thomas Aquinas lahir 1225. Ia mengatakan bahwa hakikat manusia adalah berasal dari Tuhan yang Tuhan kemudian menetapkan bahwa manusia adalah mahluk social dan politik. Menurutnya Negara merupakan aktualisasi sifat alamiah manusia, sehingga terbentuknya suatu Negara merupakan cerminan kebutuhan kodrati manusia. Thomas Aquinas berpikiran bahwa tentang kehendak bebas manusia dan tujuan akhir manusia yang selalu bermuara pada kebaikan, idealnya, pada tujuan ketuhanan. Menurutnya, bentuk Negara terbaik adalah monarki dan terburuknya adalah tirani dengan tambahan demokrasi, setidaknya telah mendapatkan posisi yang lebih baik dari pada dulu zaman filsuf. Menurutnya, demokrasi meskipun buruk, tapi lebih baik daripada tirani<sup>9</sup>. Alasannya, dalam Negara tirani kemungkinan terjadinya penyelewengan kekuasaan Negara sangatlah besar. Raja dapat bertindak sewenang-wenang diluar batas tanpa adanya kekuasaan pengontrol dari rakyat. Sekali orang berhasil merebut kekuasaan dan membentuk tirani, maka tidak ada pilihan bagi rakyat kecuali kepatuhan yang total karena tiraninya itu. Untuk menghindari penguasa tirani itu, diperlakukan pengawasan dan control, ini dapat dilakukan beberapa hal : *pertama*,

---

<sup>8</sup> Umar Basalim, *Pemikiran Kekuasaan dan Negara : Tiga Filsuf Besar Masa Awal Kristiani, PEMIKIRAN POLITIK BARAT* hlm 32, Juli 2007

<sup>9</sup> Yulia Siska ‘DEMOKRASI’, *Sejarah Politik* hlm 15, 2015

bagi penguasa tunggal yang memerintah Negara hendaknya harus dianggap berdasarkan pemilihan oleh pemimpin masyarakat. Dipilih berdasarkan pribadi yang dimilikinya. Disini ia menolak kekuasaan yang didasarkan kepada warisan atau keturunan (*heredity power*); *kedua*, mekanisme lain untuk menghindari tirani bagi seorang penguasa adalah dengan membatasi kekuasaan penguasa tunggal bersangkutan; *ketiga*, tindakan tirani dapat dihindari manakala dalam system pemerintahan terdapat pemilikan kekuasaan secara bersama-sama<sup>10</sup>.

### **3. Abad Pencerahan, Machiavelli (1467-1527) Dan Thomas Hobbes (1588-1679)**

Machiavelli meletakkan demokrasi di tempat terburuk, dan tirani di tempat terbaik. Ia beranggapan Negara akan mengalami kejayaan manakala pemimpinnya terlepas dari nilai moral dan etika yang dulu pada abad pertengahan pernah diagung-agungkan. Machiavelli menyiratkan bahwa demokrasi adalah kebebasan individu. Kebebasan individu disediakan sepanjang tidak mengganggu keselamatan dan stabilitas tatanan politik. Menurutnya Demokrasi tetap digenggam dalam bentuk negaranya. Akan tetapi tetap monarki absolute berada di attaran tertinggi bentuk Negara berdasarkan pemikirannya.

Thomas Hobbes meletakkan demokrasi di tempat terburuk dan monarki ditempat tertinggi dalam hirarki bentuk Negara sesuai dengan pemikirannya. Menurutnya pemerintahan akan sebaik-baiknya dijalankan jika kekuasaan terpusat pada satu orang saja. Akan tetapi, meletakkan adanya kewenangan dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Kewenangan tersebut diperoleh dari kontrak social dimana sekelompok orang secara pasrah dan sadar memberikan seluruh kekuatan politiknya pada orang diluar kelompok nya<sup>11</sup>. Hobbes menyatakan bahwa secara kodrati manusia itu sama satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu (*appetite*) dan keengganan (*aversions*), yang menggerakkan tindakan mereka<sup>12</sup>. Kontrak social merupakan karya cipta bersama dari pergaulan politik, membentuk serta membatasi praktek politik dengan

<sup>10</sup> Ahmad Suhelmi, op.cit, hlm 104-105

<sup>11</sup> Yulia Siska 'DEMOKRASI', Sejarah Politik hlm 16, 2015

<sup>12</sup> Halida, 'Teor-Teori Demokrasi', <http://halidachanblog.blogspot.co.id/2010/12/teori-teori-demokrasi.html>, 4 Desember 2010

menyediakan sarana yang kita pergunakan, dan dengan sadar atau tidak ia mampu merumuskan permasalahan social dan dapat memahami apa yang sedang kita kerjakan<sup>13</sup>.

#### **4. Era Westphalia, John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) Dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778)**

John Locke mengungkapkan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia lahir dengan persamaan dan kebebasan. Kebebasan disini masih tunduk dalam hukum alam yang bersifat normative (hukum manusia). Nilai kebebasan ini kemudian dituangkan dalam kontrak social John Locke yang bersifat liberal. John Locke memberikan dukungannya bahwa rakyat sipil atau warga Negara juga termasuk dalam masyarakat politik.

JJ Rousseau, ia mengungkapkan adanya kehendak umum sebagai bentuk penyatuan social yang menciptakan pribadi kolektif baru yaitu Negara. JJ Rousseau memperkenalkan bahwa konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan kebebasan manusia sejajar dengan kehendak Negara. Kedaulatan rakyat Negara ini bersifat tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Akan tetapi, kewenangan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Karena rakyat adalah subyek hukum maka dia harus menjadi pembautnya, semua anggota komunitas politik memiliki kedudukan sama dalam pembuatan hukum. Individu bebas dari pengaruh orang lain dalam menyatakan kehendak bebasnya. JJ Rousseau mengatakan bahwa tidak ada system pemerintah perwakilan, oleh karena itu pemikirannya tentang konsep kedaulatan rakyat ini bisa dikenal dengan demokrasi langsung.

Menurut Montesquieu prinsip pemerintahan dikategorikan kedalam tiga kelompok yakni, republic, monarki dan despotisme. Dalam republic Montesquieu, mengatakan bahwa nilai penggerak pemerintahan adalah civic virtue dan spirit public dari rakyat dalam cinta pada Negara, kesediaan menundukkan kepentingan diri, patriotisme, kejujuran, kesederhanaan dan persamaan. Demokrasi terletak dalam republiknya Montesquieu yang didefinisikan sebagai kedaulatan yang diserahkan pada lembaga kerakyatan. Montesquieu melatarbelakangi konsepsi

---

<sup>13</sup> Sumardjo 'KONTRAK SOSIAL', Kontrak social JJ Rousseau 1986 hlm 1

bahwa kedaulatan rakyat bisa dibagi(didistribusikan) melalui tiga, pemisahan kekuatan pada legislative, eksekutif dan yudikatif dengan fungsionalnya masing-masing.

### **5. Abad Imperialism Dan Kolonialisme, Fredrich Hegel (1818-1883), Karl Marx (1770-1983) Dan Fredrich Engels (1820-1895)**

Pandangan Fredrich Hegel mengenai demokrasi, menurutnya demokrasi pada masanya dan sedikit pada masa sekarang bukanlah hasil akhir dan terbaik dari bentuk negara yang ada. Ia menarasikan bahwa Negara bukanlah alat melainkan yujuan itu sendiri sehingga untuk kebaikan bersama, maka rakyat harus menjadi abdi Negara. Konsepnya yang meletakkan rakyat harus sebagai abdi Negara seolah menjustifikasi adanya bentuk Negara yang demokratis. Artinya suatu persyaratan bahwa warganegara wajib dibekali dan memiliki pengetahuan ketatanegaraan untuk kemudian diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan. Akan tetapi, pemikirannya yang Kristiani Protestanisme seolah menegaskan Negara dengan orientasi nilai kebaikan yang berlandaskan pada ketuhanan.

Karl Marx mendukung adanya regulasi ketat pemerintah, yang mengusung persamaan semua kelas. Pahamnya yang demikian sering dikenal dengan nama sosialis. Ia tidak memposisikan demokrasi diujung tanduk, sebaliknya ia memposisikan kekuasaan mesti diletakkan terpusat. Adapun demokrasi bisa ditarik kehaluan Marx, demokrasi rakyat disebut demokrasi proletar adalah demokrasi yang berhaluan Marxisme-komunisme, mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas social, manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada kepemilikan pribadi tanpa penindasan dan paksaan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan<sup>14</sup>.

Engels mengemukakan bahwa kelas social telah tidak ada lagi, maka kekuasaan politik pun akan lenyap. Pada tahun 1884, ia menjelaskan bahwa Negara itu tidak selamanya ada. Pernah ada masyarakat tanpa Negara, dan yang tidak memiliki pengertian tentang Negara serta kekuasaan Negara. Pada tingkat tertentu dari tahapan ekonomi yang berhubungan dengan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas, Negara akan menjadi kebutuhan. Pada masa kini menurut

---

<sup>14</sup> Yulia Siska, DEMOKRASI', Sejarah Politik hlm 20, 2015

Engels, masyarakat dengan cepat memasuki suatu tahapan dalam perkembangan produksi diaman kelas-kelas masyarakat bukan saja tidak menjadi kebutuhan, melainkan juga akan menjadi penghalang yang positif bagi produksi. Kelas-kelas itu akan runtuh sebagaimana telah lahir pada masa tahapan terdahulu. Bersama dengan hilangnya kelas-kelas itu maka hilang pula Negara<sup>15</sup>.

## **Demokrasi Sosialis**

### **1. Mao Ze Dong (1893-1976)**

#### **Kediktatoran Demokrasi Rakyat**

Kediktatoran demokrasi rakyat ini merupakan ajaran dari Mao, apa yang akan dibangun diatas kedaulatan rakyat RRC. Tahun 1949, ia mengemukakan: “tugas kita memperkuat aparat Negara menjadi milik rakyat, terutama tentara rakyat, polisi rakyat, dan kepentingan rakyat... Negara yang menjadi milik rakyat akan melindungi rakyat. Hanya jika rakyat memiliki Negara seperti itu, mereka dapat mendidik dan membentuk kembali dirinya dalam skala Negara secara keseluruhan. “dalam system negara yang dibangun seperti ini, kenyataan yang terjadi adalah membangun rakyat cina dengan “keseragaman dan konkonformitas”. Konsep sama rata dan sama rata dialokasikan dalam bentuk penampilan fisik, juga cara berpikir dalam melakukan tindakan. Untuk pengawasan yang dibangun Mao dalam system Negara semacam ini, bila ada perlawanan bukan hanya ditindak secara fisik, melainkan juga disebut “kritik diri” yakni pengakuan didepan umum, pencucian otak, dan tekanan social sampai kepada hukuman fisik<sup>16</sup>.

### **2. Fidel Castro (1926)**

#### **Dari Liberalis ke Marx-Lenin**

Orientasi politik, pada awalnya Castro seorang pejuang yang berorientasi politik Liberal. Hal ini dapat diamati bahwa pada mahasiswanya ia sering bentrok dengan kalangan komunis. Ia memang bukan seorang Marxis pada awalnya,

<sup>15</sup> Umar Basalim, Demokrasi Komunis, *PEMIKIRAN POLITIK BARAT* hlm 185, Juli 2007

<sup>16</sup> Umar Basalim, Demokrasi Sosialis Komunis di Dunia Ke-3, *PEMIKIRAN POLITIK BARAT* hlm 218, Juli 2007

sebagaimana dikemukakan dalam pidato di bulan Desember 1961, bahwa Marxisme benar-benar terbentuk dalam dirinya ketika ia mencapai puncak kekuasaan.

Strategi politik, Pemerintahan dibawah kepemimpinan Castro, mengizinkan Partai Komunis Kuba untuk tampil dalam arena politik yang pada masa pemerintahan Batista dilarang. Ia juga melakukan perubahan di bidang pertanian melalui pendirian *National Institut of Agrarian Reform* yang diketuainya sendiri. Dalam bidang social pendidikan, perubahan yang cukup radikal dilakukan pemerintahan revolusioner di Kuba. Jalur utama pendidikan tidak lagi dicampuri Gereja Katolik. Dibawah kepemimpinan Castro kesehatan juga mengalami kemajuan. Disebutkan dalam laporan majalah *Times*, bahwa tenaga dokter di Kuba telah mencapai rasio yang paling tinggi dibanding Negara didunia ketiga lainnya.

Dalam bidang diplomasi luar negeri, Kuba termasuk Negara yang berani dan sukses dalam merespon tindakan yang dilakukan Negara besar, yakni Amerika Serikat. Dalam peristiwa teluk babi yang terkenal itu, akhir 1962, tentara Fidel Castro sanggup merontokkan serbuan yang dikoordinasikan CIA. Saat Amerika Serikat dibawah pimpinan Kennedy, harus terpaksa membayar makanan dan obat-obatan seharga 53 juta dolar untuk menukar 1.113 tawanan yang disekap Fidel Castro<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Umar Basalim, „Demokrasi Sosialis Komunis di Dunia Ke-3, *PEMIKIRAN POLITIK BARAT* hlm 230, Juli 2007



## **BAB II**

# **PERSEPEKTIF POLITIK DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Desi Ratna Sari**  
**(14140010)**

Hubungan internasional adalah hubungan antarnegara atau antarindividu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Setiap negara tentunya tidak dapat terlepas dari hubungan internasional. Hal ini karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga hubungan internasional melengkapi itu.

Hubungan internasional tidak hanya terjadi karena ingin bekerjasama. Persahabatan, persengketaan, permusuhan, ataupun peperangan juga termasuk hubungan internasional. Hubungan internasional bisa antar individu, antar kelompok, maupun antar negara di negara yang berbeda. Menurut Sam Suhaedi, hubungan antar internasional juga terdapat hukum internasional yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat internasional.

hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut UU No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau Warga Negara.

Hubungan internasional dianggap penting dalam rangka untuk menumbuhkan saling pengertian antarbangsa, mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antarbangsa, saling mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa yang bekerja sama, memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, dan membina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Suatu negara yang tidak mau mengadakan hubungan internasional dengan negara lain akan terkucilkan dalam pergaulan dunia. Akibatnya, negara tersebut akan mengalami

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Realisme berfokus pada keamanan dan kekuasaan negara di atas segalanya. Para penganut pertama seperti E.H. Carr dan Hans Morgenthau berpendapat bahwa negara adalah aktor rasional yang egois dan mengejar kekuasaan, yang berusaha memaksimalkan keamanan dan kemungkinan keselamatan mereka. Kerja sama antarnegara adalah cara memaksimalkan keselamatan masing-masing negara (berbeda dengan alasan yang lebih idealis). Sama halnya, tindakan perang apapun harus didasarkan pada kepentingan pribadi, alih-alih idealisme. Banyak realis memandang Perang Dunia II sebagai pendukung teori mereka. Marxisme

Teori Marxis dan Neo-Marxis HI menolak pandangan realis/liberal terhadap konflik atau kerja sama negara; mereka berfokus pada aspek ekonomi dan material. Ini menciptakan asumsi bahwa ekonomi mengalahkan masalah lainnya, sehingga memungkinkan peningkatan kelas menjadi fokus studi. Para Marxis memandang sistem internasional sebagai satu sistem kapitalis terpadu yang terus menambah modal. Jadi, masa kolonialisme membawa sumber bahan baku dan pasar terkurung untuk ekspor, sementara dekolonisasi membawa kesempatan baru dalam bentuk ketergantungan.

Teori yang terhubung dengan Marxis adalah teori ketergantungan yang berpendapat bahwa negara-negara maju, dalam mencapai kekuasaannya, menyusup ke negara-negara berkembang melalui penasihat politik, misionaris, para ahli, dan MNC untuk mengintegrasikan mereka ke sistem kapitalis demi mendapatkan sumber daya alam yang cukup dan mendorong ketergantungan.

Teori Marxis kurang mendapat perhatian di Amerika Serikat, karena negara tersebut tidak memiliki partai sosialis besar. Teori ini lebih mencuat di sebagian wilayah Eropa dan merupakan salah satu kontribusi teori terpenting di kalangan akademisi Amerika Latin, misalnya melalui teologi pembebasan.

Berikut adalah beberapa pengertian hubungan internasional menurut para ahli.

Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu

juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.

Menurut Warsito Sunaryo, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.<sup>18</sup>

Menurut Suwardi Wiraatmaja

Hubungan internasional mencakup segala hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.<sup>19</sup>

### **Presepektif Politik dalam Hubungan Internasional**

Strukturalisme perspektif ini berkembang dari pemikiran para pengkritik liberalism seperti halnya liberalisme muncul sebagai reaksi terhadap merkantilisme, perspektif strukturalis berkembang sebagai reaksi terhadap meluasnya liberalism diabad 19. Basis pokok perspektif ini adalah marxisme.<sup>20</sup>

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah Internasional dan sistem yang membentuk hubungan internasional serta para aktor yang terlibat didalamnya.<sup>21</sup> Pengertian Hubungan Internasional Hubungan internasional atau hubungan antarbangsa merupakan interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Hedi sasrawan, pengertian hubungan internasional, di akses dari <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-hubungan-internasional.html>, pada tanggal 13 desember 2015 pukul 15:21

<sup>19</sup> Faisal hi UMM “pengertian hubungan internasional” di akses dari <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli>, pada tanggal 13 desember 2015 pukul 15:54

<sup>20</sup> Yulia Siska, M.Pd, Sejarah Politik, ysw wacana, Bandar Lampung, 2015, hlm. 87.

<sup>21</sup> Pangeran arti, pengertian hubungan internasional, di akses dari <http://pangeranarti.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-hubungan-internasional.html>, pada tanggal 13 desember 2015 pukul 17:18

<sup>22</sup> Wayan suyadna “pendidikan kewarga negaraan kelas XI SMA” di akses dari <https://wayansuyadnya.wordpress.com/1-1-hubungan-internasional-pengertian-pola-arti-penting-dan-sarananya/>, pada tanggal 13 desember 2015 pukul 19:55

Hubungan internasional atau *international relation* yaitu hubungan antara Negara-negara dan bangsa-bangsa. Sebetulnya bukan merupakan hal yang baru pada zaman sekarang. Pada dewasa ini, tiap Negara terdorong oleh beberapa alasan mereka harus mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain, lebih-lebih bagi dengan Negara tetangganya, alasan mengapa Negara-negara itu saling mengadakan hubungan satu sama lain ada bermacam-macam misalnya saja alasan politik, ekonomi, ataupun sosial kultural. Jadi, di sini *intention* sesuai artinya dengan hubungan antar raja-raja atau hubungan antara kepala Negara-negara dalam abad 17 internasional hubungan-hubungan antara Negara, sedangkan individu tidak dimasukan dalam hubungan ini. Dalam abad 18 sesuai dengan pertumbuhan bangsa-bangsa *nation* dan *national* maka internasional berarti hubungan antar bangsa. sampai sekarang berlakulah terminologi itu hanya saja lebih besar lagi ruang lingkupnya.

Elemen-elemen hubungan internasional George B de Huszar dan Stevenson dalam *political science* menyebutkan bahwa elemen-elemen hubungan internasional ialah (Negara yang berdaulat, Nasionalisme, Imperialisme, Prinsip keseimbangan kekuatan dan, Diplomasi).<sup>23</sup>

Hubungan internasional adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global diantara Negara-negara dalam system internasional, termasuk peran Negara-negara, organisasi-organisasi, antar pemerintah, organisasi-organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan internasional yang selanjutnya disingkat HI adalah suatu bidang akademis dan kebijakan public dan dapat bersipat positif atau normatif karena hubungan internasional berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri Negara-negara tertentu.

Pada awal perkembangan internasional mencakup hubungan antar Negara sebagaimana dikemukakan oleh Schawer Zanberger yang menyatakan bahwa ilmu hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional.

---

<sup>23</sup> Solestyawati ismail gani, Hubungan Internasional, "Pengantar Ilmu Politik" hlm142, 144 148,, 1987

Menurut Faturrahman bahwa politik adalah proses untuk mencapai kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, yang penting hasrat kekuasaan itu terpengaruh meski dengan menjual akidahnya demi kekuasaan itu. Kemudian ia mengatakan kerja-kerja penguasa sekarang sama dengan kerja-kerja predator yakni menghisap urat nadi rakyat bangsa terkuras habis dan menjadi jinak sekaligus budak bagi penguasa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Fatahullah Jurdi, study ilmu politik, thn 2014, hlm 17, 313

# BAB III

## ILMU POLITIK DENGAN KEKUASAAN SEBAGAI INTI POLITIK

**Dina Purwaningsih**  
**(14140013)**

### **Politik**

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota. Dari kata tersebut (polis) muncullah istilah “politikos” yang berarti kewarganegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) politik berarti:

1. Pengetahuan tentang ketata negaraan yaitu mengenai sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya.
2. Segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya, tentang pemerintahan ataupun terhadap negara lain.
3. Kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah tertentu.

Politik memiliki definisi yang banyak tergantung sudut pandang yang digunakan oleh si pendefinisi. Beberapa ahli misalnya Ramlan Surbakti yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada lima pandangan tentang politik, yang salah satunya ia mendefinisikan sebagai berikut: politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.<sup>25</sup>

Menurut Kartini Kartono (1996) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ramlan, Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Widia Sarana Indonesia Gramedia. 1992), h. 1-2

<sup>24</sup> Kartini, Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 64

### **Defenisi Ilmu Politik dengan Kekuasaan sebagai inti Politik**

Ossip K. Fletchteim (dalam *Fundamental of Political Science*) menjelaskan ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara (*Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state*).<sup>27</sup> Fletchteim juga menekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain.<sup>27</sup>

### **Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya**

Hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya adalah memberikan pemahaman tentang posisi ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain, merunut keterkaitan di antara ilmu-ilmu tersebut dan mengidentifikasi kontribusi ilmu politik pada ilmu lainnya.<sup>28</sup>

### **Media dan Politik**

Memberikan pemahaman bagaimana media sangat berperan dalam menentukan arah politik di suatu negara dan rejim berkuasa”.<sup>29</sup>

Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut *zoon politikon*. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha

---

<sup>25</sup> Ossip K. Fletchteim, ed., *Fundamental of Political Science* (New York, Ronald Press Co.,1952).

<sup>28</sup> Budiardjo, Miriam (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 25-38

<sup>29</sup> Faturrohman, Deden dan W. Sobari (2002), *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 207-228

meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.

Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur: negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber (resources) yang ada.

Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan (persuasive) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka..<sup>30</sup>

## **Tentang Negara**

Pandangan Locke tentang negara terdapat dalam bukunya yang berjudul “Dua Tulisan tentang Pemerintahan” (*Two Treatises of Civil Government*). Ia

---

<sup>30</sup> <http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08/definisi-atau-pengertian-politik.html>



menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (*the state of nature*), keadaan perang (*the state of war*), dan negara (*commonwealth*).

Tahap keadaan alamiah adalah tahap dimana manusia memiliki hubungan harmonis, memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa terjadi kekacauan karena telah patuh terhadap ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Hukum kodrat dari Tuhan menurut Locke adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Dengan demikian, Locke menyebut ada hak-hak dasarnya yang terikat di dalam kodrat setiap manusia dan merupakan pemberian Allah. Konsep ini serupa dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam masyarakat modern.<sup>31</sup>

## Kesimpulan

Pelaksanaan negara sebagai konsep politik ternyata memiliki arti yang luas, dapat dilihat dari pendapat tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, Max Weber, dan Locke. Namun intinya mereka memandang negara sebagai organisasi yang bisa melakukan kekuasaan secara legal dengan kekerasan sekalipun kepada warga negaranya. Meskipun demikian, kekerasan yang dimaksud bukan kekerasan yang bersifat sewenang-wenang, tetapi dalam batas-batas yang wajar. Mengenai sifat negara dan prinsip negara secara normatif memang memiliki tujuan bagi kemakmuran rakyat, tetapi kenyataannya tergantung dari para pelaku politiknya ingin mencapai tujuan apa.

Mengenai keterkaitan negara sebagai konsep politik dalam demokrasi, mereka akan memberi kebebasan yang luas bagi warga negara untuk beraspirasi dan melaksanakan teori *separation of power* (pembagian kekuasaan) secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi pelaksanaannya juga kembali lagi kepada para pelaku politiknya yang hanya memandang negara sebagai mata pencaharian semata untuk menambah kekuasaan.

---

<sup>31</sup> <http://Tokoh Filsafat Modern.dox.html>

## DAFTAR PUSTAKA

- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Widia Sarana Indonesia Gramedia. 1992.
- Kartini, Kartono. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Budiardjo, Miriam (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 25-38
- Ossip K. Fletchtem, ed., *Fundamental of Political Science* (New York, Ronald Press Co., 1952).
- Faturohman, Deden dan W. Sobari (2002), *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 207-228
- <http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08/definisi-atau-pengertian-politik.html>
- <http://Tokoh Filsafat Modern.dox.html>

## BAB IV KETERKAITAN ANTARA AGAMA & MASYARAKAT

**Gusti Ayu Putu Eka I.Y**  
**(14140017)**

### **Fungsi AGAMA**

- **Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia**

Agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia karena ia sentiasanya memberi penerangan kepada dunia(secara keseluruhan), dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Penerangan dalam masalah ini sebenarnya sulit dicapai melalui indra manusia, melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. Contohnya, agama Islam menerangkan kepada umatnya bahwa dunia adalah ciptaan Allah(S.W.T) dan setiap manusia harus menaati Allah(S.W.T).

- **Menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia**

Sebagian pertanyaan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan pertanyaan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Contohnya pertanyaan kehidupan setelah mati, tujuan hidup, soal nasib dan sebagainya. Bagi kebanyakan manusia, pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik dan perlu untuk menjawabnya. Maka, agama itulah fungsinya untuk menjawab soalan-soalan ini.

- **Memberi rasa kebersamaan kepada sesuatu kelompok manusia.**

Agama merupakan satu faktor dalam pembentukan kelompok manusia. Ini adalah karena sistem agama menimbulkan keseragaman bukan saja kepercayaan yang sama, melainkan tingkah laku, pandangan dunia dan nilai yang sama.

- **Memainkan fungsi peranan sosial.**

Kebanyakan agama di dunia ini menyarankan kepada kebaikan. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kode etika yang wajib

dilakukan oleh penganutnya. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi peranan sosial.

Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Tetapi dari segi sains sosial, fungsi agama mempunyai dimensi yang lain di antaranya:

- *Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia.*

Agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia sentiasanya memberi penerangan mengenai dunia (sebagai satu keseluruhan), dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Penerangan bagi perkara ini sebenarnya sukar dicapai melalui inderia manusia, melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. Contohnya, agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah SWT dan setiap manusia harus menaati Allah SWT.

- *Menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia*

Persoalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Contohnya soalan kehidupan selepas mati, matlamat menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu. Maka, agama itulah berfungsi untuk menjawab soalan-soalan ini.

- Agama merupakan satu faktor dalam pembentukan kelompok manusia. Ini adalah kerana sistem agama menimbulkan keseragaman bukan saja kepercayaan yang sama, malah tingkah laku, pandangan dunia dan nilai yang sama.<sup>32</sup>

### **Keterkaitan Antara Agama & Masyarakat**

Telah kita ketahui di Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan adat istiadat yang juga berhubungan dengan masyarakat dan agama. Dari berbagai budaya yang ada di Indonesia dapat dikaitkan hubungannya dengan agama dan masyarakat dalam melestarikan budaya. Sebagai contoh budaya Ngaben yang merupakan upacara kematian bagi umat Hindu di Bali yang sampai sekarang masih terjaga kelestariannya. Hal ini membuktikan bahwa agama mempunyai

---

<sup>32</sup> <http://charrrors.blogspot.com/2013/09/fungsi-dan-tujuan-agama.html>

hubungan yang erat dengan budaya sebagai patokan utama dari masyarakat untuk selalu menjalankan perintah agama dan melestarikan kebudayaannya. Selain itu masyarakat juga turut mempunyai andil yang besar dalam melestarikan budaya, karena masyarakatlah yang menjalankan semua perintah agama dan ikut menjaga budaya agar tetap terpelihara.

Selain itu, ada juga hubungan lainnya, yaitu menjaga tatanan kehidupan. Maksudnya hubungan agama dalam kehidupan jika dipadukan dengan budaya dan masyarakat akan membentuk kehidupan yang harmonis, karena ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Sebagai contoh jika kita rajin beribadah dengan baik dan taat dengan peraturan yang ada, hati dan pikiran kita pasti akan tenang dan dengan itu kita dapat membuat keadaan menjadi lebih baik seperti memelihara dan menjaga budaya kita agar tidak diakui oleh negara lain.<sup>33</sup> Manusia di dunia ini sangat membutuhkan agama sebagai pegangan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Abudin Nata dalam bukunya “ Metodologi Studi Islam “ ada tiga alasan perlunya manusia terhadap agama :

#### 1. Latar belakang fitrah manusia

Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut buat pertama kali ditegaskan dalam ajaran islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Rum, 30:30).

*“ Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu “*

#### 2. Kelamahan dan kekurangan manusia

Manusia memiliki keterbatasan akal untuk menentukan hal-hal di luar kekuatan pikiran manusia itu sendiri, dan juga manusia merupakan makhluk lemah yang sangat memerlukan agama.

#### 3. Tantangan manusia

Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan syetan, dan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan

---

<sup>31</sup> <http://eliana-hubunganagamadanmasyarakat.blogspot.com/>

upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berusaha memalingkan manusia dari Tuhan.

Agama berfungsi untuk membimbing umat manusia agar hidup tenang dan bahagia di dunia dan akhirat, mempererat hubungan sosial dan kemasyarakatan, dan penawar bagi tekanan jiwa. Manusia memiliki dua jenis kebahagiaan. Pertama, yang berhubungan dengan inderawinya dengan objek eksternal, seperti kebahagiaan yang diperoleh melalui pengecapan lidah dan indera peraba seperti kontak fisik. Kedua, kebahagiaan yang berhubungan dengan kedalaman ruh dan kesadaran manusia, yang tidak ada kaitannya dengan tubuh-tubuh tertentu. Kebahagiaan ini termasuk kebahagiaan menyembah Tuhan / shalat.

Pengaruh kedua dari keyakinan keagamaan dalam masalah hubungan sosial kemasyarakatan adalah untuk memaksa orang untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama demi terwujudnya ketertiban masyarakat.

Peranan yang ketiga sebagai penawar bagi tekanan jiwa yang gelisah, stress atau gundah gulana. Kehidupan manusia kita sukai atau tidak mengandung penderitaan, kesedihan, kegagalan, kekecewaan, kehilangan, dan kepahitan. Disinilah peran agama mulai dibutuhkan. Dengan adanya pengalaman agama yang kuat maka manusia akan terhindar dari tekanan yang dapat membelunggu kehidupannya. Mereka sadar bahwa semua yang terjadi dalam dunia ini adalah sebagai cobaan untuk menguji keimanan dan mereka yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi umatnya..<sup>34</sup>

Bagi ahli psikologi bahwa sebagian besar penyakit mental yang disebabkan oleh kerusakan psikologi dan kepahitan kehidupan ditemukan diantara orang-orang yang tidak beragama. Orang-orang yang beragama, bergantung pada seberapa jauh ketetapan hatinya kepada agamanya, seringkali terlindungi dari penyakit-penyakit seperti itu. Karenanya salah satu akibat kehidupan kontemporer yang bersumber dari ketiadaan keyakinan keagamaan adalah meningkatnya penyakit saraf dan psikologis. (Achmad Gholib, Studi Islam, Faza Media, Jakarta, 2006 ).<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Nata, Abudin. 1998 . *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>35</sup> Gholib, Achmad. 2006 . *Studi Islam*. Jakarta: Faza Media

## Unsur Agama

Unsur pertama yaitu kepercayaan terhadap kekuatan Gaib. Kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk bermacam macam. Dalam agama primitif kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius (sakti), ruh, jiwa yang terdapat pada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Tuhan atau Allah dalam istilah lebih khusus dalam agama Islam.

Unsur kedua yaitu bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud.

Unsur ketiga yaitu adanya rasa respons yang bersifat emosional dari manusia. Respons tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut, penyembahan dan pada akhirnya respons tersebut mengambil bentuk dan cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.

Unsur keempat yaitu, paham tentang adanya kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dan dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, peralatan menyelenggarakan upacara dan sebagainya.<sup>36</sup>

## Kesimpulan

Agama merupakan tempat mencari makna hidup yang final dan ultimate. Kemudian, pada urutannya agama yang diyakininya merupakan sumber motivasi tindakan individu dalam hubungan sosialnya, dan kembali kepada konsep hubungan agama dengan masyarakat, di mana pengalaman keagamaan akan terefleksikan pada tindakan sosial, dan individu dengan masyarakat seharusnya tidak bersifat antagonis.

Manusia hakikatnya adalah makhluk biologis, psikologi dan sosial yang memiliki dua predikat statusnya dihadapan Allah sebagai Hamba Allah dan fungsinya di dunia sebagai *khalifah* Allah), mengatur alam dan mengelolanya untuk mencapai kesejahteraan kehidupan manusia itu sendiri dalam masyarakat dengan tetap tunduk dan patuh kepada sunnatullah. Rasa agama dan perilaku

---

<sup>5</sup>Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, Raja wali Press, Jakarta : 2006, h.14

keagamaan (agama dan kehidupan beragama) merupakan pembawaan dari kehidupan manusia, atau dengan istilah lain merupakan “fitrah” manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1998

Gholib, Achmad. *Studi Islam*. Jakarta: Faza Media; 2006

Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, Raja wali Press, Jakarta; 2006

<http://charrors.blogspot.com/2013/09/fungsi-dan-tujuan-agama.html>

<http://eliana-hubunganagamadanmasyarakat.blogspot.com/>



## BAB V

### SUMBER KEDUDUKAN AGAMA

**Kadek Resianto**  
**(14140022)**

#### **Pendahuluan**

Di antara filsafat modern yang dikenal dan sangat mempengaruhi paradigma berpikir Barat adalah Positivisme Logis. Positivisme Logis tidak mengakui metafisika. Mereka hanya mengakui persepsi panca indera sebagai satu-satunya yang “ada”. Kalangan ilmuan Barat mengakui bahwa dengan adanya filsafat Positivisme Logis, Barat sukses mencapai hasil yang gemilang dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Thomas Aquinas (1224-1274 M) adalah filsuf Barat yang dikenal sangat religius. Dia menentang pemikiran tokoh-tokoh filsuf Barat yang menyangkal tentang metafisika. Konsep metafisika Thomas tentang *Essentia* dan *Exientia* memiliki kesamaan dengan konsep metafisika *al-Haqq al-Awwal/al-Haqq al-Wahid* filsuf muslim Al-Kindi (801-660 M). meskipun tidak secara eksplisit mengungkapkan pengaruh filsuf muslim terhadap pemikirannya, namun dengan adanya bukti keasamaan pemikiran dengan filsuf muslim, terutama al-Farabi, al-Kindi yang kemudaian mempengaruhi pemikiran Ibn Rusyd yang diadopsi oleh Aquinas.

Aquinas adalah sosok filsuf yang sangat berpegang teguh pada keimanannya, disaat banyak serangan para ilmuan Barat yang tidak mengakui “ada” yang tak terlihat oleh panca indra. Di justru membela dan bahkan memberikan jawaban tentang “ada” tersebut. Aquinas juga membedakan antara *Prima Causa* (Tuhan selaku penyebab utama) dan *Causa Scunda* (manusia yang punya otonomi terbatas).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Dick Hartoko, Kamus Populer Filsafat, Jakarta: CV Rajawali, 1986, hlm. 9

### **Biografi Thomas Aquinas**

Thomas Aquinas atau Thomas dari Aquino (1224- 1274 M) lahir di Rocca Sicca, dekat Napels, dari keluarga bangsawan Italia.<sup>38</sup> Ayahnya sendiri adalah seorang Pangeran Landulf dari Aquino dan tergolong seorang Kristen yang sangat taat. Itulah sebabnya Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino untuk dibina agar kelak menjadi seorang biarawan. Dari situlah, Thomas terdidik agamanya dengan sangat baik yang akhirnya pada tahun 1245 saat usianya 16 tahun, ia ikut dalam sekte Dominikan yang pada saat itu sangat berperan aktif dalam otoritas gereja.

Aquinas semula belajar di Napels, kemudian di Paris, lalu di Koln, dan kemudian di Paris lagi. Dalam studinya di Universitas Paris itu, ia mulai mengenal dan mendalami ilmu pengetahuan dari filsuf-filsuf Yunani seperti Aristoteles berkat ajaran dari gurunya, albertus Magnus, kemudian dia memadukannya dengan theology ummat kristiani dan juga dari filsuf muslim lainnya.

Sejak tahun 1252 ia mengajar di Paris dan Italia. Aquinas seorang ahli teologi Katolik dan filosof. Ia menerima gelar Doktor dalam teologi dari Universitas Paris dan mengajar di sana sampai tahun 1259. Kemudian selama 10 tahun ia mengajar di biara-biara Dominikan di sekitar Roma kemudian kembali ke Paris dan mempelajari karya-karya Aristoteles. Aquinas berpulang tanggal 7 Maret 1274 pada usia 48 tahun.

### **Peranan politik Agama dalam Negara**

Pada awalnya, menurut Soedjatmoko, Kepemimpinan agama (tradisional) berada di garda depan arus perubahan masyarakat. Setiap zaman memperlihatkan tokoh-tokoh spiritual yang aktif menegaskan identitas agama di masyarakat. Yang menjadi soal, apakah pola keberagamaan yang lahir dari kesadaran personal setiap pemeluknya mampu menjadi ideologi dasar dan menunjukkan peran politiknya secara monumental serta sejauh mana? Tentu kita memerlukan sebuah kajian yang cukup serius mengenai hal ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba

---

<sup>38</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, cet. Ke-5, hlm. 104

menganalisa peran politik agama dalam negara, yang diharapkan memperjelas posisi yang seharusnya diambil oleh agama dalam negara.

Sebagai thesis awal, Tonybee –sebagaimana dikutip Donald Eugene Smith– meyakini bahwa peradaban-peradaban besar yang masih berlaku secara mendasar berorientasi keagamaan dan karena itu secara berangsur-angsur menjanjikan pemecahan-pemecahan keagamaan terhadap sejumlah permasalahan organisasi sosial politik. Selanjutnya dikatakan: “Yang paling pokok adalah hakikat pemerintahan yang secara essensial bersifat sakral yang merupakan keyakinan kuat dari umat Hindu, Budha, Muslim dan Katholik pada awal abad ke 19.”

Di beberapa “negara” abad ke-7, abad pertengahan dan modern, ternyata agama tidak terintegrasi secara penuh. Ada dua faktor mendasar, mengapa agama gagal menjadi “ideologi” dasar atau penuh sebuah negara. Pertama, keinginan pemimpin-pemimpin agama menciptakan sistem pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan religio-politik, dibarengi sikap toleran terhadap pemerintah-pemerintah yang cenderung sekuler. Hal ini erat kaitannya dengan sikap-sikap tokoh agama yang cenderung memilih status quo dengan alasan “maslahat umat” seperti yang terjadi dalam sejarah terbentuknya Dinasti Bani Umayyah, dimana para “Shahabah” yang beranggapan bahwa model pemerintahan Bani Umayyah tidak sesuai dengan ajaran rasulullah memilih diam, juga terhadap perilaku politik sekuler dari Dinasti Bani Umayyah hingga masa keruntuhannya.

### **Sistem Organik, Penyatuan Ideologi Agama dalam Negara**

Agama Hindu, terikat dengan sistem kasta: dalam pengertian bahwa tatanan sosial yang ditentukan Tuhan dalam bentuk hierarki adalah bagian dari hukum alam yang abadi. Setiap kasta memiliki dharma –norma yang telah ditentukan Tuhan (Deva)– sendiri-sendiri, dan yang berlaku secara umum yang dikenal sebagai Varnashrama-dharma.

Di beberapa kerajaan Hindu yang jatuh beberapa saat setelah kemerdekaan India pada tahun 1947 dan di kerajaan Nepal, tugas pokok raja adalah mempertahankan tatanan sosial yang bersifat sakral tadi. Norma-norma tingkah laku sosial yang didasarkan atas otoritas kitab suci dan adat sejak dahulu

dilaksanakan terutama melalui dewan-dewan kasta yang bersangkutan dengan pelestarian kesucian ritual dan status masing-masing kasta tersebut. Maka ciri khas dari sistem religio-politik organik Hindu adalah: ideologi yang mewakili masyarakat sakral dalam kerangka hirarki kasta dan status kekuasaan raja yang absolut –di Nepal, raja dianggap sebagai titisan dewa Vishnu, yaitu dewa pemelihara menurut mitologi Hindu–, memiliki status ketuhanan dan bertanggungjawab mempertahankan tatanan sakral tersebut.

### **Sistem Gereja, Simbiosis Mutualisme antara agama dan negara**

Komponen utama yang mendukung sistem gereja ialah: ideologi agama yang integralis –seperti kristen–, struktur kegerejaan yang relatif maju dan otoritas politik yang mungkin lebih tinggi, lebih rendah atau setingkat. Pada masyarakat Budha Birma misalnya, Sangha (semacam gereja) tidak memberikan hukum ketuhanan apa pun untuk mengatur masyarakat, tidak mengeluarkan teori apa pun tentang organisasi sosial yang sakral dan tidak melakukan pengendalian sosial terhadap tingkah laku orang-orang awam, tetapi ia menjadi faktor pemersatu yang sangat kuat dalam masyarakat.

Penguasa (Raja) menjadi partner Sangha, meskipun mempunyai otoritas menentukan “penguasa Sangha” (Sangharaja), mendukung aturan disipliner pada semua hirarki keagamaan dengan kekuasaan duniawinya, melembagakan “pembaharuan” Sangha dan secara menyeluruh berusaha meningkatkan kesucian dan martabat kalangan biksu.

Sebaliknya, Sangha memberikan dukungan terhadap kekuasaan raja, dan adakalanya nama pemerintah memperingatkan rakyat di wilayah tertentu untuk melunasi pajak, dan rakyat menghormati mereka.

Berbeda dengan agama Budha di Birma, agama Budha di Tibet –yang asketik dengan amalan magi-keagamaan karena pengaruh Shamanisme (kepercayaan sejenis animisme yang dipeluk oleh bangsa-bangsa Ural-Altic di Asia Utara dan Eropa)– baru berkembang teratur pada abad ke-8, ketika vihara-vihara dibentuk, diberi tanah negara dan diberi hak memungut pajak, meskipun pada akhirnya vihara-vihara membentuk sekte masing-masing dan mengalami perpecahan yang parah pada abad ke-14.

Dalai Lama V selaku pimpinan sekte Geluppa (Topi Kuning) yang berkuasa di Tibet mempersatukan negara dalam agama dan politik. Disini terlihat peran agama (gereja) berada di atas pemerintahan. Menurut Smith, bentuk pemerintahan keagamaan (gereja) di Tibet bersifat hirarkis dari agama Budha Tibet, dimana vihara-vihara dan struktur pemerintahan merupakan mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Sistem integralisme di Tibet terdiri dari tiga komponen: ideologi integralis yang mendukung kekuasaan mutlak Dalai Lama di bidang duniawi sebagai titisan Dewa; struktur keagamaan yang sangat maju serta sistem tuan tanah sehingga biksu mempunyai kekuasaan di bidang ekonomi dan sosial: kekuasaan mutlak agama terhadap pemerintahan sipil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dick Hartoko, Kamus Populer Filsafat, Jakarta: CV Rajawali, 1986, hlm. 9  
 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1, Yogyakarta: Kanisius, 1989, cet. Ke-5, hlm. 104

## **BAB VI**

# **POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Laksmita Permana Sari**  
**(14140024)**

### **Pengertian Politik menurut ARISTOTELES**

Pemahaman orang Yunani kuno (klasik) terhadap pengertian "politik" bahwa perkataan politik sebagai suatu istilah yang berasal dari bahasa mereka sendiri itu diartikan sebagai "Negara Kota" (Polis). Dan dalam kaitan ini Aristoteles (384-322) SM. Yang untuk pertama kalinya memperkenalkan perkataan "politik" dengan melalui pengamatan tentang "manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik" dengan itu Aristoteles (384-322) SM hendak mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa hakekat politik itu berada di dalam "kehidupan sosial" yang sesungguhnya adalah merupakan politik dan melalui interaksi sosial sebagai suatu proses yang berlangsung antara satu dengan yang lainnya atau interaksi dari satu atau dua dan lebih orang dan ini sudah dianggap akan melibatkan hubungan politik (Political Relationship).

Aristoteles (384-322) SM melihat hal ini sebagai suatu kecendrungan alami dan yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. Manakala manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, manakala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi dengan melalui sumber yang tersedia dan manakala mereka berusaha mempengaruhi orang lain untuk menerima pandangan mereka maka mereka akan melihat dirinya sibuk dengan kegiatan politik.

Dalam pandangannya yang luas ini maka setiap orang adalah politisi. Meskipun demikian Aristoteles (384-322) SM berkesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seseorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah dengan melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan dan suatu kerangka yang di

rancang untuk dapat memecahkan persoalan atau konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif (Negara).<sup>39</sup>

### **Pengertian Politik menurut Prof. DR .Anwar Arifin**

Anwar Arifin menyimpulkan bahwa politik merupakan aktivitas-aktivitas manusia dalam bermasyarakat, terutama tentang perjuangan mengangkat atau memilih penguasa yang berfungsi menetapkan kebijakan pemerintah. Memang politik meliputi bermacam-macam aktivitas dalam suatu Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu sehingga politik meliputi , Kekuasaan, pengambilan keputusan , kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi . demikian juga terdapat pandangan yang menyebut aturan, kekuasaan, pengaruh, wewenang, kepentingan dan pemerintah sebagai cakupan politik. Meskipun demikian politik tidak hanya menyangkut tentang perjuangan untuk mengangkat atau memilih penguasa untuk menetapkan kebijakan, tetapi politik juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan, implementasi kebijakan, tetapi politik juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan, implementasi kebijakan dan pengalokasian nilai-nilai otoratif. Dengan demikian politik juga berkaitan dengan kerja sama dalam kelompok manusia yang berbentuk asosiasi.<sup>40</sup>

### **Pengertian Politik menurut George B de Huszar dan Thomas H.Stevenson**

*“Political science is the field of study concerned primarily with the power relationship among men, between men and the state, and among states, it is involved, then, with human control, regulation and influence. While at one time political science confined its attention almost entirely to governmental considerations, today it investigates the economic, social and geographic conditions underlying governmental phenomena.*

Ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama-tama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan Negara, dan antara Negara dengan Negara . ia menyangkut hal-hal yang ada hubungannya dengan human control, pengaturan dan ada pula hubungannya dengan pengaruh. Sedangkan di lain pihak ilmu politik memusatkan perhatian hampir keseluruhannya

<sup>39</sup> P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, Graha Ilmu, Jakarta, 2011, Hal 4-5

<sup>40</sup> Prof. Dr. Anwar Arifin, Politik Pencitraan-pencitraan Politik, Graha Ilmu, Jakarta, 2014, Hal 7

terhadap pertimbangan pemerintah, sekarang ia menyelidiki tentang keadaan ekonomi, sosial, dan geografi dibawah perwujudan Negara.<sup>41</sup>

### **Pengertian Politik menurut Johan Kaspar Bluntschli**

Dalam buku *The Teory of the State*: “ Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang Negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The Science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestation its development).<sup>42</sup>

### **Pengertian Politik menurut Ramlan Surbakti**

Ramlan Surbakti juga mengatakan bahwa ada lima pandangan mengenai politik. Pertama, Politik merupakan usaha-usaha warga negara yang ditempuh untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, Politik adalah segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, Politik merupakan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, Politik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum. Kelima, Politik yaitu sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>43</sup>

### **Hubungan Internasional menurut Dr. Hilman Adil**

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dalam interaksi antara dua pihak manapun, sumber daya aksi-aksi pihak-pihak atau pelaku-pelaku bersangkutan. Akan tetapi, ada 2

---

<sup>41</sup> Rudi Salom SINaga, Pengantar Ilmu Politik kerangka berfikir dalam dimensi arts Praxis dan Policy, Graha Ilmu, Medan, 2012, Hal 9

<sup>42</sup> Roger F. Soltau, ”Introduction to Politics”, diakses dari <http://dunsarwere.blogspot.com/2015/08/20-pengertian-dan-devinisi-politik-dan.html> pada tanggal 12 desember 2015 pukul 18:00

<sup>43</sup> Ramlan Surbakti, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-ilmu-politik-menurut-pakar.html> pada tanggal 12 desember 2015 pukul 19:10



komplikasinya yang terlibat, jika interaksi terjadi selama jangka waktu tertentu. Setiap pelaku mungkin dipengaruhi oleh interaksi yang dialami pada masa lalu, dan berdasarkan ini dikatakan bahwa interaksi itu sendiri merupakan sumber daya perilaku. Kedua, pengalaman interaksi masa lalu, pelaku-pelaku dapat memperkirakan apa yang bakal terjadi dan masing-masing dapat bertindak sesuai dengan perkiraan tersebut. Hampir setiap contoh hubungan manusia melukiskan hal ini secara konkret.<sup>44</sup>

### **Hubungan Internasional Menurut Tygvo Nathlessen**

Hubungan Internasional adalah bagian dari ilmu politik oleh karena itu komponen hubungan internasional sendiri tak lepas dari politik internasional, organisasi dan administrasi internasional serta hukum internasional.<sup>45</sup>

### **Hubungan Internasional Menurut Coulombis dan Wolfe**

Hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa diamati dan mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan perilaku serta mengungkapkan karakteristik-karakteristik atau tipe-tipe hubungan antar unit-unit sosial.<sup>46</sup>

### **Hubungan Internasional Menurut Drs. R Soeprapto**

Hubungan internasional studi yang orientasinya bersifat efektif (orientasi pasca perilaku) yang sering mengkombinasikan unsure-unsur pendekatan ilmiah dengan tujuan yang jelas. Nilainya seperti mensubstitusikan perang dengan metode-metode perdamaian untuk menyelesaikan pertikaian, pengendalian penduduk, perlindungan terhadap lingkungan, pemberantasan penyakit, kemelaratan manusia.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Dr. Hilman Adil, Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, Hal 24

<sup>45</sup> Tygvo Nathlessen, diakses dari <http://Hedisastrawan.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-hubungan-internasional.html> pada tanggal 12 desember 2015 pada pukul 19:40

<sup>46</sup> Coulombis dan Wolfe, diakses dari <http://duniabaca.com/definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 12 desember 2015 pada pukul 19:55

<sup>47</sup> Drs. R Soeprapto, diakses dari <http://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/> pada tanggal 12 desember 2015 pada pukul 20:10

### **Hubungan Internasional Menurut Warsito Sunaryo**

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu bisa diartikan sebagai Negara, bangsa, maupun organisasi Negara sepanjang bersifat internasional.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Warsito Sunaryo, diakses dari <http://pangeranarti.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-hubungan-internasional.html> pada tanggal 12 desember 2015 pada pukul 20:34

## **BAB VII**

# **IMPERIALISME DAN KOLONIALISME**

## **DI NUSANTARA**

**Maryati**  
**(14140026)**

### **Kolonialisme**

Koloni berasal dari kata *colonia* (bahasa Latin) yang artinya tanah pemukiman (jajahan). jadi koloni berarti pemukiman suatu negara di luar wilayah negaranya yang kemudian dinyatakan sebagai bagian wilayahnya.

Adapun kolonialisme mengandung arti upaya penguasaan atas suatu daerah/wilayah oleh negara penguasa untuk memperluas daerahnya atau wilayahnya. Penguasaan daerah tersebut umumnya dilakukan secara paksa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara induk (motherland).

Macam-macam bentuk kolonialisme:

- koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah untuk dikuras habis kekayaan alam dan tenaga penduduknya (kerja paksa) untuk kepentingan negara penguasa
- Koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah baru, dengan cara menyingkirkan atau memusnahkan penduduk asli atau pribumi yang digantikan oleh pendatang yang menyebabkan kedudukan penduduk asli terabaikan.
- Koloni deportasi, yaitu daerah atau wilayah koloni yang dipakai sebagai tempat buangan para narapidana yang sudah tidak dapat ditangani lagi oleh pemerintah. Mereka kebanyakan para kriminal yang dihukum seumur hidup. Dari pada pemerintah harus memberi makan mereka seumur hidup lebih baik mereka dijadikan tenaga buruh yang tidak dibayar.

### **Imperialisme**

Imperialisme berasal dari kata *imperium* (bahasa Latin) yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu sistem penjajahan yang dilakukan

dengan jalan membentuk pemerintah jajahan dengan menanamkan pengaruh segala bidang kehidupan dan mengendalikan daerah yang dijajahnya.

#### Pembagian Imperialisme

- Imperialisme kuno. (muncul pada kurang lebih 1500 M) berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Imperialisme ini lebih menekankan pada perluasan wilayah yang dilakukan suatu negara terhadap negara atau daerah lain. Imperialisme kuno mempunyai semboyan gold (memupuk kekayaan), gospel (menyebarkan agama), dan glory (mencapai kekayaan). Sebagai contoh, Spanyol dan Portugis yang melakukan penjelajahan samudra serta menguasai daerah baru, mengumpulkan kekayaan dan menyebarkan agama oleh para misionaris yang turut dalam pelayaran tersebut.
- Imperialisme Modern. Berlangsung pada awal terjadinya Revolusi industri (1500 M) sampai akhir perang dunia 2 (1942). Tujuan imperialisme modern didasari oleh keinginan negara penjajah untuk mengembangkan perekonomiannya. Mereka membangun industri secara besar-besaran yang memerlukan bahan mentah serta daerah untuk memasarkan hasil industrinya. Hal ini menyebabkan adanya usaha untuk mencari daerah jajahan. Negara yang menjadi pelopor imperialisme modern adalah Inggris (sebagai pelaksana Revolusi industri)
- Imperialisme Ultramodern (neokolonialisme). Tujuan imperialisme ini lebih menekankan pada penguasaan mental, ideologi, dan psikologi. Imperialisme ini berlangsung setelah perang dunia 2 sampai dengan sekarang

#### **Perkembangan Kolonialisme di Indonesia**

Perkembangan Kolonialisme di Indonesia - Revolusi Industri yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian, khususnya di kawasan Eropa telah mendorong negaranegara Barat untuk melakukan penjelajahan samudera. Penjelajahan ini bertujuan untuk mencari daerah yang akan dijadikan jajahan.

Di daerah-daerah yang telah berhasil dikuasai, para penjelajah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan memasarkan hasil industri dari negaranya. Pada awal kedatangannya, para penjelajah yang menemukan daerah baru dan mendarat di suatu tempat, memperkenalkan dirinya sebagai pedagang. Mereka melakukan interaksi perdagangan dengan penduduk pribumi, bahkan di antara mereka ada pula yang mendirikan pemukiman (koloni).

Pada perkembangan selanjutnya, tanpa disadari oleh penduduk pribumi daerah itu oleh mereka dianggap sebagai daerah miliknya. Dengan leluasa mereka mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan yang ada di daerah baru itu. Dalam sistem politik, pendudukan, dan penguasaan suatu daerah oleh Negara lain disebut penjajahan atau istilah populernya disebut kolonialisme.

Proses kolonialisme yang selalu dihubungkan dengan imperialisme yang terjadi di beberapa kawasan, seperti di Asia, Afrika, dan Amerika dipelopori oleh Inggris, kemudian disusul oleh Portugis dan Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis. Negara-negara tersebut mengirimkan para penjelajahnya untuk mengarungi samudera dan mencari jalan menuju ke Dunia Timur yang terkenal itu. Selengkapnya Tentang Penjajahan Portugis di Indonesia:

- Portugis di Maluku
- Dampak dikuasainya Malaka Oleh Portugis

Dalam penjelajahan tersebut Portugis mengirimkan para penjelajahnya, yaitu sebagai berikut.

- Bartholomeus Diaz (1487-1488) yang diutus raja Portugis untuk mengatur perjalanannya ke Afrika Barat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sampai abad ke-15 para pelaut Portugis hanya mampu mendarat di Pantai Emas saja. Dengan perjalanan inilah, Bartholomeus Diaz akhirnya berhasil sampai ke ujung selatan Afrika yang disebut Tanjung Pengharapan (Cape of Good Hope).
- Vasco da Gama (1497-1498) yang diutus raja Portugis yang bernama Manuel I, karena merasa penasaran atas hasil penjelajahan yang dilakukan oleh Columbus. Perjalanan Vasco da Gama ini bertolak dari Lisabon menuju Kepulauan Tanjung Verde dan akhirnya tiba di Tanjung Harapan Baik tahun 1497. Pada tahun 1498, Vasco da Gama beserta rombongannya

berhasil berlabuh di Kalikut, pantai Malabar India yang pada masa itu terkenal sebagai kota dagang.

- Alfonso d'Albuquerque (1510-1515). Ia berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India pada tahun 1510 dan Malaka (1511). Dari Malaka ia meneruskan penguasaan atas Myanmar. Dari Myanmar inilah ia menjalin hubungan dagang dengan Maluku.

Dipihak lain, Spanyol pun tidak mau ketinggalan untuk melakukan penjelajahan samudera ke Dunia Timur yang terkenal dengan sumber rempahrempah. Sama halnya dengan Portugis, Spanyol segera mengirimkan para penjelajahnya seperti:

- Ferdinand Magelhaens (1480-1521). Magelhaens yang dibantu oleh kapten Juan Sebastian del Cano dan Pigafetta mulai berlayar ke arah Barat-daya dengan mengikuti rute Christopher Columbus (orang Italia yang mengabdikan dirinya pada Raja Spanyol dan berhasil sampai ke benua Amerika yang diyakininya sebagai India) dengan melintasi Samudera Atlantik terus ke ujung selatan Amerika dan sampailah di Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Di Filipina (Pulau Cebu), Magelhaens tewas terbunuh oleh suku Mactan.
- Juan Sebastian del Cano. Pada tahun 1522 ia sampai di Maluku, tetapi kedatangan mereka itu telah menimbulkan pertentangan antara Spanyol dan Portugis yang kedua-duanya saling menuduh telah melanggar Perjanjian Tordesillas, yaitu perjanjian antara bangsa Portugis dan Spanyol yang mengakhiri peperangan selama puluhan tahun antara kedua negara yang bertikai di Eropa untuk memperebutkan daerah jajahan. Perjanjian ini diprakarsai oleh Paus Paulus yang membagi rute pelayaran Spanyol ke timur dan Portugis ke arah barat). Pertentangan di antara mereka berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Saragosa (1534) di Indonesia. Dalam perjanjian itu diputuskan bahwa wilayah Portugis tetap di Maluku, dan Filipina juga daerah Portugis. Tetapi disebabkan Spanyol merasa berhak atas kepulauan itu maka Spanyol berkuasa di Filipina.

### **VOC (Belanda)**

Dengan adanya keberhasilan yang diraih oleh para penjelajah Portugis dan Spanyol maka negara-negara Eropa lainnya mencoba untuk datang ke Dunia Timur, khususnya Indonesia. Pada kurun waktu berikutnya, Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudera. Hal ini didorong oleh ditutupnya Lisabon oleh Spanyol bagi kapal-kapal Belanda. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum kejadian itu, Belanda sudah terbiasa berhubungan dagang dengan Portugis lewat Lisabon dan dari Lisabon barang-barang disalurkan oleh Belanda ke negeri-negeri Eropa lainnya. Karena selama perang 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol maka Belanda tidak dapat lagi membeli rempah-rempah di Lisabon yang sudah dikuasai Spanyol. Dengan demikian, situasi tersebut telah menyebabkan Belanda berusaha untuk datang sendiri ke kepulauan rempah-rempah, yaitu Indonesia.

### **Prancis**

Sesudah VOC dibubarkan, pemerintahan di Nusantara langsung berada di bawah pemerintahan Belanda. Namun semenjak tahun 1806, ketika Raja Louis Napoleon diangkat menjadi raja Belanda, sehingga Indonesia secara tidak langsung telah berada di bawah kekuasaan Prancis. Di Eropa, musuh bebuyutan Prancis adalah Inggris. Prancis di bawah Napoleon Bonaparte masih belum mampu menaklukkan Inggris. Untuk itu, kehadiran Inggris di Asia Tenggara telah mengancam kedudukan Belanda di Indonesia yang telah menjadi daerah kekuasaan Prancis. Dalam menghadapi masalah dengan Inggris, pada tahun 1808, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia.

Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Untuk keperluan itu, Daendels membangun jalan raya (Grote Postweg) dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya 1.100 km. Dengan jalan tersebut, pasukan Belanda akan dapat bergerak cepat. Dalam pembangunan jalan tersebut, pemerintahan Hindia-Belanda di bawah komando Daendels menggunakan tenaga kerja dari bangsa Indonesia yang dikerahkan lewat para penguasa pribumi. Dikatakan tidak kurang 1000 orang pekerja perhari harus disediakan para bupati di setiap daerah untuk dipekerjakan sebagai tenaga rodi

untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut. Selain membangun jalan raya, Daendels juga mendirikan pabrik senjata dan mesiu, serta membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon. Herman William Daendels; pada masa pemerintahannya, Rakyat Indonesia banyak yang dijadikan sebagai tenaga rodi. Di bidang pemerintahan, Daendels mengubah sistem pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan Eropa. Dalam pelaksanaannya, pulau Jawa dibagi menjadi sembilan wilayah yang disebut prefektur. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang residen, dan setiap residen membawahi beberapa bupati. Para bupati diberi gaji tetap dan tidak diperkenankan meminta upeti kepada rakyat.

Dengan diterapkan sistem pemerintahan yang seperti itu maka wibawa para bupati menjadi merosot di mata rakyat. Sementara itu, kekuasaan raja masih diakui, tetapi tetap harus tunduk terhadap semua peraturan yang dibuat pemerintah Hindia-Belanda.

Sistem pemerintahan Daendels diterapkan sangat keras dan disiplin, serta cenderung bertangan besi. Hal ini menyebabkan Daendels tidak disukai oleh berbagai pihak, baik oleh aparat pemerintah yang membantunya maupun oleh penguasa dan rakyat pribumi. Hubungan antara pribumi dengan Daendels menjadi buruk. Rencana perlawanan yang menentang pemerintahan Daendels di berbagai daerah mulai bermunculan. Untuk mempertahankan kedudukannya, Daendels membutuhkan banyak uang.

Dengan sikap berani, Daendels menjual tanah negara kepada pihak swasta asing. Dalam transaksi jual beli tersebut disepakati bahwa selain menguasai tanah, si pembeli juga menguasai penduduk yang tinggal di tanah tersebut. Perilaku Daendels yang demikian itu telah menyebabkan ia dipanggil dan kemudian kedudukannya di Indonesia digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Dalam menjalankan tugasnya, Janssens ternyata kurang cakap dan lemah. Hal itu terbukti, dengan adanya Perjanjian Tuntang, yang isinya bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janssens kepada Inggris.



## **Inggris**

Sebelum Perjanjian Tuntang (1811), sebenarnya Inggris telah datang ke Indonesia. Perhatian atas Indonesia dimulai sewaktu penjelajah F. Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya, ekspedisi lainnya dikirimkan pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama East Indies Company (EIC). EIC ini mengemban misi untuk mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia. Pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Pada tahun 1604, Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Banda, tahun 1609 mendirikan pos di Sukadana (Kalimantan), tahun 1613 berdagang dengan Makassar, dan pada tahun 1614 mendirikan loji di Batavia.

Dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda. Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir Inggris dari Indonesia. Setelah terjadi peristiwa Ambon Massacre, EIC mengundurkan diri dari Indonesia dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei sampai memperoleh kesuksesan. Inggris kembali berkuasa di Indonesia melalui keberhasilannya memenangkan perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Selama lima tahun (1811-1816), Inggris memegang pemerintahan dan kekuasaannya di Indonesia. Selengkapnya di Kekuasaan Inggris di Indonesia.

## **Pemerintahan Hindia Belanda**

Pemerintahan Hindia-Belanda mengisi kekuasaannya dengan menjalankan berbagai kebijakan yang pada dasarnya meneruskan kebijakan yang telah diterapkan Raffles dalam kurun waktu sebelumnya. Selama periode antara tahun 1816 dan 1830, Pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada timbulnya berbagai peperangan di beberapa daerah, seperti Perang Padri dan Perang Jawa. Peperangan tersebut merupakan peperangan yang besar dan memakan biaya yang banyak. Bahkan, menyebabkan Pemerintah Hindia-Belanda mengalami kesulitan keuangan. Hasil sewa tanah yang selama ini dijalankan tidak dapat menutupi kondisi keuangan yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia-Belanda di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch segera memberlakukan sistem baru yang disebut sistem tanam paksa (Cultuur Stelsel). Ciri utama sistem

tanam paksa ini adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian (*innatura*), khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil pajak tersebut selanjutnya dikirim ke negeri Belanda. Selengkapanya di Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

## **Perjuangan Pada Masa Kolonialisme**

### ***Perlawanan Sebelum Tahun 1800***

#### **1. Perlawanan Rakyat Mataram**

Pada awalnya Mataram dengan Belanda menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng(*loji*) untuk kantor dagang di Jepara. Belanda juga memberikan dua meriam terbaik untuk Kerajaan Mataram. Dalam perkembangannya, terjadi perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jendral VOC Jan Piterzoon Coen memerintahkan Van Der Marct menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Sultan Agung mempersiapkan serangan terhadap kedudukan Belanda di Batavia.

Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Baurekso tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian disusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul, yang dibantu dua bersaudara, yakni Kiai Dipati Mandurojo dan Kiai Upa Santa. Upaya serangan pertama gagal untuk menghalang mundur pasukan Belanda. Tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam perlawanan tersebut. Mataram mempersiapkan serangan kedua ini pun gagal. Selain kelemahan pasukan pertama, lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda. Di samping Sultan Agung, perlawanan terhadap kekuasaan VOC juga dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said.

#### **2. Perlawanan Rakyat Banten**

Konflik dalam urusan kerajaan serta persaingan dalam tahta kerajaan juga menyebabkan perlawanan terhadap kekuasaan barat mengalami kegagalan. Misalnya konflik internal kesultanan Banten yang menyebabkan Banten jatuh ke tangan VOC Belanda. Setelah sultan Ageng Tirtayasa mengangkat anaknya yang

bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda segera ikut campur dalam urusan Banten dengan cara mendekati Sultan Haji. Sultan Ageng yang anti terhadap VOC segera menarik kembali tahta untuk anaknya. Tentusaja tindakan itu tidak disukai oleh sang putra mahkota, sehingga dia meminta bantuan ke VOC untuk mengambil kembali tahtanya. Akhirnya, melalui kerjasama dengan VOC, Sultan Haji memperoleh kembali tahtanya dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah banten kepada VOC.

### 3. Perlawanan Rakyat Makasar

Di Pulau Sulawesi, perlawanan untuk mengusir kekuatan VOC juga tidak berhasil. Penyebabnya hampir sama dengan daerah lainnya di Nusantara, yaitu karena adanya konflik dan persaingan diantara kerajaan-kerajaan Nusantara. Misalnya konflik antara Sultan Hasanudin dari Makasar dengan Aru Pallaka dari Kesultanan Bone yang memberi jalan Belanda untuk menguasai Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi tersebut.

Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanudin menduduki Sumbawa sehingga jalur perdagangan di Nusantara bagian timur dapat dikuasainya. Oleh karena itu, penguasaan ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam melakukan aktifitas perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasanudin dan Belanda selalu terjadi. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Spelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanudin.

Untuk menghadapi Sultan Hasanudin, Belanda meminta bantuan kepada Aru Pallaka yang bersengketa dengan Sultan Hasanudin. Dengan kerjasama tersebut akhirnya Makasar jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Hasanudin harus menandatangani Perjanjian Bonghaya pada tahun 1667 yang berisikan hal berikut.

- (1) Sultan Hasanudin harus memberikan kebebasan kepada VOC untuk berdagang dikawasan Makasar dan Maluku
- (2) VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur dengan pusatnya Makasar
- (3) Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki pada zaman Sultan Hasanudin dikembalikan kepada Aru Pallaka dan dia diangkat menjadi Raja Bone.

#### 4. Pemberontakan Untung Surapati.

Untung ialah seorang budak dari Bali. Ia dibeli oleh pedagang dari Belanda dan dijadikan pegawai VOC. Kesalahan yang dibuatnya, yaitu menjalin hubungan dengan seorang gadis yang merupakan putri dari tuannya, sehingga dia dipenjara. Di dalam penjara ia memimpin teman-temannya untuk membongkar pintu penjara dan kemudian ia merampok orang-orang Belanda. Untung kemudian menjadi buronan, Belanda selalu menemui kegagalan dalam menangkapnya.

Di sisi lain, VOC sedang berusaha melakukan penangkapan terhadap Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa yang meloloskan diri. Dalam usahanya VOC menarik kelompok Untung untuk membantunya menangkap Pangeran Purbaya. Kelompok Untung berhasil menangkap Pangeran Purbaya. Namun, setelah hampir mendekati Batavia, Untung berubah pikiran karena mendapat penghinaan dari pimpinan pasukan VOC dan ia memutuskan untuk kembali melawan VOC.

Ketika bergerilya melawan VOC di wilayah Priangan dan melanjutkan perjalanan ke Cirebon, ia terlibat perkelahian dengan seorang pangeran Cirebon yang bernama Surapati. Untung dituduh telah melakukan pembangkangan terhadap Sultan Cirebon. Namun, ia selamat dari tuduhan tersebut dan Surapati yang kemudian dipersalahkan, dan akhirnya dihukum mati. Setelah kejadian itu, Untung dijuluki nama baru, yaitu dengan sebutan Untung Surapati.

Ketika Mataram dipimpin oleh Sunan Amangkurat II, Untung Surapati melanjutkan perjuangan di wilayah Mataram. Dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, Sunan Amangkurat II merangkul Untung. Namun ia menyadari akan kelicikan sunan ketika menjerumuskan Trunojaya. Maka, setelah membunuh Kapitan Tack dan anak buahnya Untung pun menyingkir ke Jawa Timur. Kapitan Tack adalah utusan Belanda yang bertugas untuk menangkap Untung Surapati.

Perjuangan Untung Surapati semakin kuat dengan dibangunnya pusat perjuangan untuk melawan VOC di Pasuruan Jawa Timur yang bernama Wiranegara. Wiranegara dipimpin dan diperintah oleh Untung Surapati.

Konflik lain terjadi antara Pangeran Pugar yang merupakan adik dari Amangkurat II dan Amangkurat III atau Sunan Mas. Konflik ini terjadi karena

perbedaan prinsip. Pangeran Pugar memihak Belanda, sedangkan Sunan Mas anti Belanda. Dalam konflik ini, tentu VOC memilih Pangeran Pugar.

Kemudian Pangeran Pugar dan VOC membuat perjanjian dan menandatangani di Semarang. Isi dari perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut.

- (1) Seluruh daerah Priangan, Cirebon dan Madura bagian timur diserahkan kepada VOC.
- (2) Pangeran Pugar dibebaskan dari segala utangnya terdahulu, tetapi selama 25 tahun Sunan wajib menyerahkan 8000 koyan beras kepada VOC.
- (3) Di daerah Kartasura VOC bersedia menempatkan pasukannya untuk melindungi sunan.

Karena telah berhasil memperoleh kemenangan, Pangeran Pugar dinobatkan menjadi susuhunan oleh VOC dengan nama Pakubuwono

### ***Perlawanan Sesudah Tahun 1800***

#### **1. Perlawanan Sultan Nuku (Tidore)**

Kesultanan Tidore di bawah pimpinan Sultan Nuku melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, Sultan Nuku melakukan persiapan perang dengan cara meningkatkan kekuatan perangnya hingga 200 kapal perang dan 6000 orang pasukan. Setelah itu, perjuangan Sultan Nuku untuk mengusir kekuatan Belanda tersebut dilakukan pula jalur diplomasi.

Upaya diplomasi yang ditempuh Sultan Nuku tersebut ialah mengadakan hubungan dengan Inggris. Upaya diplomasi tersebut dilakukan dalam rangka meminta bantuan dan dukungan dari Inggris, terutama dalam memperkuat senjata untuk menghadapi persenjataan Belanda yang lebih maju dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki kesultanan Tidore. Siasat untuk mengadu domba antara Inggris dan Belanda berhasil dilakukan, sehingga pada 20 Juni 1801 Sultan Nuku berhasil membebaskan Kota Soa-Siu dari kekuasaan Belanda. Maluku Utara akhirnya dapat dipersatukan dibawah kekuasaan Sultan Nuku.

## 2. Perlawanan Patimura

Pada tahun 1817, terjadi perubahan penguasaan di Indonesia. Belanda kembali berkuasa di Indonesia menggantikan Inggris. Perkembangan itu telah menggelisahkan masyarakat Maluku. Belanda menerapkan kebijakan yang sangat berbeda dengan Inggris. Rakyat pun kecewa, rakyat dipaksa menyerahkan berbagai macam hasil bumi, seperti kopi dan rempah-rempah. Rakyat mendapat bayaran yang sangat kecil, bahkan kadang kadang tidak dibayar. Pada bulan Mei 1817, rakyat Maluku di Saparua melancarkan perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulessy atau patimura. Thomas Matulessy dilahirkan di Haria, Pulau Saparua Maluku. Pada tahun 1783. Pada masa pemerintahan Inggris, Patimura masuk dinas militer berpangkat sersan.

## 3. Perang Diponegoro

Perlawanan terhadap Belanda juga terjadi di daerah Maluku lainnya, seperti di Haruku, Pulau Seram, Larike, Asilulu, Wakasihu. Perlawanan rakyat Maluku tersebut sempat menghancurkan pertahanan Belanda. Pada bulan Juli 1817, pihak Belanda mendatangkan bantuan dengan kekuatan yang lebih besar dari Batavia. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Muda Buykes. Kemudian Belanda melancarkan serangan besar-besaran, sehingga pasukan Patimura terdesak oleh Belanda. Pada Bulan Agustus 1817, Patimura terpaksa menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya. Dengan tipuan muslihat, Belanda berhasil menguasai kembali Benteng Deverdijk pada tanggal 18 November 1817. Belanda juga berhasil menangkap dan menghukum mati kapitan Paulus Tiahahu.

Setelah itu, perlawanan lainnya dilakukan oleh pehlawan wanita, yaitu Cristian Martha Tiahahu yang berusia 17 tahun yang pergi ke hutan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sekitar bulan November 1817, Patimura terdesak dan akhirnya dapat ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di alun alun Ambon di depan Benteng Victoria. “Dalam bulan Desember 1817 kapitan patimura bersama tiga orang panglimanya dijatuhi hukuman mati yang dijalankannya di benteng Niuew Victoria di Ambon”. Sebelum hukuman gantung dilakukan, Patimura berkata Patimura akan mati, tetapi Patimura-Patimura muda akan bangkit.

### **Dampak Kolonialisme dan Imperialisme bagi Indonesia**

Dampak Politik, Sosial, Ekonomi, dan Budaya dari keberadaan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia, sebagai berikut.

#### **1. Perubahan dalam Bidang Politik**

- Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamog praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian.
- Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perfektuf
- Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern
- Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.

#### **2. Perubahan dalam dalam Bidang Sosial**

- Pembentukan status sosial dimana yang tertinggi adalah Eropa lalu Asia dan Timur Jauh yang terakhir kaum Pribumi
- Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah belanda.
- Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk/patuh pada tuan tanah Barat/Timur Asing. Sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan.

### 3. Perubahan dalam Bidang Ekonomi

- Belanda membuka tambang minyak bumi di Tarakan Kaltim
- Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan
- Liberalisme ekonomi
- Eksploitasi ekonomi, monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda
- Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya.
- Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar.
- Perkebunan di Jawa berkembang sedangkan di Sumatra kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi.
- Untuk mendukung program penanaman modal Barat di Indonesia pemerintah Belanda membangun : Irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api dan pelabuhan.
- Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi (kerja paksa).
- Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani.

### 4. Perubahan dalam Bidang Budaya

- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.



- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito menyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
- Budaya Barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, kebiasaan minum minuman keras yang dilakukan oleh golongan bangsawan. Kebiasaan tersebut bukan milik asli bangsa Indonesia, tetapi kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsa Barat yang dibawa oleh para penjajah (Westernisasi menyebar lewat jalur pendidikan dan pemerintahan).
- Birokrat menggunakan bahasa belanda sebagai simbol status mereka
- Masuknya agama katholik dan protestan

### **Sumber Kutipan**

<http://atariqb.blogspot.com/2014/11/dampak-dan-faktor-terjadinya.html>

<http://matapelajaransekolahsmk.blogspot.com/2014/05/pengaruh-kolonialisme-dan-imperialisme.html>

<http://fightforourfuture.blogspot.com/2013/03/pengaruh-kolonialisme-dan-imperialisme.html>

<http://letare-kolonial.blogspot.com/>

[http://uchikjuli.blogspot.com/2012\\_05\\_01\\_archive.html](http://uchikjuli.blogspot.com/2012_05_01_archive.html)

## BAB VII

# SISTEM POLITIK NUSANTARA

## DALAM HISTORIOGRAFI

**Muhammad Ali Umron**  
(14140030)

Bidang-bidang kajian ilmu politik Dalam contemporary Politik Science, terbitan UNESCO tahun 1950, ilmu politik dibagi menjadi ilmu politik dibagi menjadi empat bidang:

1. Teori politik : Teori politik Sejarah perkembangan ide-ide politik

Lembaga- lembaga politik Undang-undang dasar Pemerintahan nasional. Pemerintahan daerah atau lokal Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah Perbandingan lembaga-lembaga politik

2. Partai-partai, golongan-golongan(grups) dan pendapat umum: Partai-partai politik Golongan-golongan asosiasi-asosiasi

Partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi Pendapat umum.

3. Hubungan internasional: Politik internasional

Organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi, dan administrasi internasional

4. Hukum internasional.

Dari keempat bidang penting dalam ilmu politik hanya dijelaskan secara garis besar saja. Berikut ini pembahasan mengenai lembaga- lembaga politik, perilaku politik, perbandingan politik, hubungan internasional, dan teori politik.<sup>49</sup> Menurut Budiardjo (1993), jika dilihat dari dasar konseptual, kerangka, fokus dan ruang lingkupnya, maka ilmu politik bisa dikategorikan sebagai ilmu yang paling muda, karena baru dilahirkan pada akhir abad ke-19. Sebaliknya, jika ditinjau dari sisi yang lebih luas, yakni sebagai pembahasan yang lebih rasional tentang berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka sebaliknya ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan sering dikatakan bahwa ilmu politik

---

<sup>49</sup> <http://www.averroespress.net/press-corner/katalog-buku/320-teori-teori-politik.html>

adalah ilmu sosial yang paling tua. Hal ini bisa dipelajari semenjak zaman Yunani Kuno di mana pemikiran tentang negara sudah dikemukakan (450 SM).

Dalam konteks nusantara Indonesia, pemikiran tentang politik sudah ditemukan semenjak masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15, di mana di masa itu telah ditulis sebuah karangan yang sangat terkenal, bahkan sampai sekarang, yakni Kitab Negarakertagama. Pada masa itu pula ada pujangga yang mengarang Babad Tanah Jawi, sebuah kitab yang di dalamnya menggambarkan perkembangan nusantara di masa lalu. Namun demikian, karena pada saat itu dunia dikuasai oleh banyaknya pemikiran Barat, maka pemikiran-pemikiran dari negara-negara Asia tidak banyak terungkap. Akibatnya pemikiran tentang politik sampai kini lebih banyak didominasi oleh pemikiran Barat.

Teori politik memiliki dua makna: makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan Hubungan Internasional”. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara.

Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu

Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.

Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekretaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.

Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu Negara.<sup>50</sup>

Sebagai Negara yang besar dan beragam, Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Islam datang sebagai agama terakhir yang masuk ke Indonesia setelah ajaran Hindu, Budha dan Kristen. Islam datang dengan damai di Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia pada masa awal masuknya Islam ke Negara ini masih menganut ajaran Hindu, Budha dan kepercayaan terhadap nenek moyang. Dari berbagai historiografi yang ada tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia terdapat beberapa teori yang mengungkapkan bagaimana caranya Islam masuk dan berkembang dengan cepat di Indonesia. Dari sumber atau fakta yang jelas dan rinci mengenai bagaimana masuknya Islam ke Indonesia, akhirnya para ilmuwan sejarah mengemukakan teori yang menjadi tumpuan sejarah dan berkembangnya Islam di Indonesia.

Teori-teori yang berkembang itu salah satunya adalah teori yang dipelopori oleh kalangan orientalis Belanda, diantaranya yaitu Snouck Hurgronje yang

---

<sup>48</sup> Budiardjo, Miriam. 1993. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia

mengatakan bahwa Masuknya islam ke Indonesia dimulai pada abad ke 13M yang diawali dengan kedatangan orang-orang yang berasal bukan dari Arab langsung melainkan dari Gujarat dengan fakta ditemukannya makam Sultan Malik As-Sholeh, seorang raja pertama dari kerajaan islam pertama di Aceh, yaitu kerajaan Samudera Pasai, dan beliau berasal dari Gujarat.

Sarjana-sarjana muslim mengungkapkan teori yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje sebelumnya. Prof. Hamka misalnya dalam seminar yang diadakannya pada tahun 1963 yang berjudul “Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia”. Hamka dan sarjana muslim yang lain berpendapat bahwa islam masuk ke Indonesia dimulai pada abad ke 7-8M yang dibawa langsung dari Arab, dengan adanya bukti jalur pelayaran internasional yang melalui selat malaka yang menghubungkan antara Dinasty Tang di Cina, Sriwijaya dan Bani Umayyah.<sup>51</sup>

Perkembangan islam di Indonesia bisa dikatakan melalui tiga periode, yaitu periode masuknya islam ke Indonesia, periode kekuasaan kolonial Belanda terhadap Indonesia, dan terjadinya liberalisasi kebijakan kolonial Belanda di Indonesia. Periode awal ditandai dengan masuknya islam pada daerah pelabuhan saja, kemudian berlanjut ke daerah pesisir pantai dan pedesaan. Seperti yang sudah dipaparkan di atas merupakan bagian awal penyebaran agama islam. melalui perdagangan, pernikahan dengan warga sekitar, pendidikan dan lain lain. Perkembangan islam kemudian dimulai di daerah perkotaan/ tepatnya istana, para ulama dan sufi mengembangkan islam dari kalangan istana dengan latar belakang islam yang diterima masyarakat dibuat fleksibel karena latar belakang penduduk Indonesia yang dipengaruhi ajaran Hindu, Budha dan kepercayaan lokal yang dianut mereka sebelum masuknya islam.

Pada periode kedua islam menyebar ketika Belanda dengan VOC-nya menduduki Indonesia. Perjanjian Giyanti pada abad 18 menjadikan VOC sebagai penguasa politik di tanah jawa dan berhasil memecah mataram menjadi dua bagian yaitu: Surakarta dan Yogyakarta. Dengan adanya perjanjian itu pihak kerajaan jawa tidak punya kuasa terhadap VOC. VOC mencampuri urusan

---

<sup>49</sup> A.Hasymy dalam buku Prof.DR. Musyriyah Sunanto 2007 “Sejarah Peradaban Islam Indonesia” Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9

penyebaran agama di keraton dan para ulama Kraton terpinggirkan, sehingga berpindah ke daerah lain untuk membangun pesantren dan menyebarkan agama islam. Para ulama dan warga berjuang untuk melawan kolonial belanda seperti Syaikh Yusuf Al-Makassari.<sup>52</sup>

Perkembangan, Sistem Politik, Militer, Ketatanegaraan, Runtuhnya, Kemunduran-kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir dan terbesar di Jawa adalah Majapahit. Kerajaan ini terletak di sekitar Sungai Brantas, dengan pusat di hutan Tarik di Desa Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, sekitar tahun 1293 M. Setelah berhasil lolos dari maut penyerangan Kediri, ia bersama para bangsawan Singasari lain yang setia seperti Nambi, Lembu Sora, Ronggo Lawe, dan Kebo Anabrang, kemudian meminta bantuan kepada Arya Wiraraja, yang sebelumnya adalah pejabat Singasari yang oleh Kertanegara dijadikan bupati di Sumenep, Madura. Atas anjuran Aria Wiraraja, Bupati Sumenep, Wijaya disarankan menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Atas jaminan Wiraraja pula Wijaya diterima di Kediri.

Raden Wijaya oleh Jayakatwang diperbolehkan membuka sebuah hutan untuk dijadikan desa baru, yakni Tarik. Setelah dibuka, hutan ini disulap menjadi desa tempat membina kekuatan militer oleh Wijaya guna membalas dendam terhadap Kediri. Kemudian hutan Tarik ini dinamai Majapahit. Sejarah Majapahit ini dapat diketahui dari Pararaton dan Sutasoma karangan Mpu Tantular, Negarakretagama karangan Prapanca, berita Cina Ying-Yai Sheng Lan, serta Prasasti Kudadu.

Dua tahun setelah pemberian hutan Tarik kepada Wijaya dan kawan-kawan, datanglah tentara Kubilai Khan dari Mongolia yang mendarat di Tuban dan Surabaya. Kedatangan tentara Kubilai Khan ke Jawa ini bertujuan untuk menghukum Kertanegara, raja Singasari, yang telah memotong telinga utusannya. Kedatangan tentara Kubilai Khan ini memberi kesempatan kepada Raden Wijaya untuk merebut kekuasaan dari Jayakatwang.

Melalui muslihat yang cerdik, Wijaya lalu mengajak pasukan Mongol yang baru mendarat di Tuban. Pasukan Mongol yang tak tahu bahwa Kertanegara telah tiada, dengan mudah diliciki oleh Wijaya bahwa Kediri seolah-olah adalah

---

<sup>52</sup> Taufik Abdullah dalam buku Prof.DR. Musyrifah Sunanto 2007 "Sejarah Peradaban Islam Indonesia" Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 15

Singasari dan Jayakatwang adalah Kertanegara. Pasukan Mongol mempercayai saja ucapan Wijaya. Lalu terjadilah peristiwa yang diharapkan oleh Wijaya: pasukan Mongol kemudian menyerang Kediri dan merebutnya. Pasukan Wijaya pun bergabung dengan tentara Kubilai Khan dalam menghancurkan Kediri dan Jayakatwang.

Dalam penyerangan ini Jayakatwang tewas terbunuh. Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang pasukan Kubilai Khan. Ia berhasil mengusir tentara Kubilai Khan ini kembali ke negerinya. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Majapahit.

Raja-raja yang memerintah Majapahit di antaranya: Raden Wijaya (1293–1309), Sri Jayanegara (1309–1328), Tribhuwanatunggadewi (1328–1350), Hayam Wuruk (1350–1389), dan Wikramawardhana (1389–1429). Raden Wijaya naik tahta pada tahun 1293 M. Raden Wijaya bergelar Kertajasa Jayawardhana. Gelar Kertarajasa dipakai karena Raden Wijaya masih keturunan Ken Arok. Raden Wijaya mengawini keempat putri Kertanegara yaitu Tribhuwana, Narendraduhita, Prajnaparamita, dan Gayatri (Rajapatni). Selain keempat putri Kertanegara, Wijaya juga mengawini Dara Petak, putri boyongan dari Melayu.

Raden Wijaya memerintah dengan bijaksana sehingga keadaan kerajaan menjadi aman dan tenteram. Raden Wijaya tidak lupa atas jasa para pembantunya yang telah ikut mendirikan Majapahit. Aria Wiraraja diberi kedudukan sebagai penasihat. Ia berkedudukan di daerah Lumajang dan Blambangan. Nambi diangkat menjadi Rakyan Mapatih. Lembu Sora diangkat sebagai patih di Daha. Kebo Anabrang diangkat sebagai panglima perang Kerajaan Majapahit. Sementara Ranggalawe diangkat sebagai menteri perkembangan Majapahit.

Pada masa Raden Wijaya sempat terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh sahabat-sahabat dekat raja yang merasa tidak puas dengan jabatannya, di antaranya oleh Lembu Sora, Nambi, dan Ranggalawe. Namun pemberontakan-pemberontakan ini akhirnya dapat dipadamkan. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 dan dimakamkan di Candi Simping di Blitar sebagai Siwa dan Wisnu serta di Antapura sebagai Budha.

Sepeninggal Raden Wijaya pemerintahan di pegang oleh puteranya yang bernama Kala Gemet yang bergelar Sri Jayanegara. Tidak seperti ayahnya,

Jayanegara dikenal sebagai raja yang tidak bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Oleh karena itu, banyak pembantunya merasa tidak puas dan melakukan pemberontakan, di antaranya pemberontakan yang dilakukan Juru Demung (1313), Wandana dan Wagal (1314), Nambi (1316), Semi (1318), dan Kuti (1319). Di antara pemberontakan tersebut, yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Pada saat itu, pasukan Kuti berhasil menduduki ibu kota negara. Jayanegara terpaksa menyingkir ke Desa Badander di bawah perlindungan pasukan Bhayangkara pimpinan Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai patih Kahuripan (1319–1321) dan patih Kediri (1322–1330).

Pada 1328, Jayanegara meninggal. Abu jenazahnya dimakamkan di Sela Petak dan di Bubat sebagai Wisnu serta di Sukalila sebagai Buddha Amoghsidi. Jayanegara tidak memiliki anak. Oleh karena itu, kekuasaan Majapahit diberikan kepada Gayatri, putri Kertanegara dan janda Raden Wijaya yang masih hidup. Namun karena lebih memilih sebagai biksuni, tahta kemudian diserahkan kepada putri Gayatri, Tribhuwanatunggadewi. Tribhuwanatunggadewi memerintah Majapahit bersama suaminya yang bernama Kertawardhana. Menurut *Negarakertagama* disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Tribhuwanatunggadewi ini sering terjadi pemberontakan. Di antaranya: pemberontakan Sadeng dan Kuti tahun 1331. Pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Berkat jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi mahapatih di Majapahit menggantikan Arya Tadah. Dalam upacara pelantikan sebagai mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya: tidak akan berhenti sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Sumpah ini dikenal dengan “Sumpah Amukti Palapa”. Untuk mewujudkan cita-citanya ini, Gajah Mada membangun armada laut yang kuat di bawah pimpinan Laksamana Nala.

Pada 1343, dengan bantuan Adityawarman, Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali. Adityawarman kemudian diangkat sebagai penguasa Melayu. Selanjutnya, pasukan Gajah Mada menguasai Sriwijaya, Tumasik, dan



semenanjung Melayu di wilayah barat. Seram, Guam, dan Dompu di wilayah timur juga berhasil dikuasainya.

Pada 1350, Tribhuwanatunggadewi turun tahta dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Ketika itu, Hayam Wuruk berusia 16 tahun. Ia didampingi Gajah Mada sebagai Mahapatih. Hayam Wuruk bergelar Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai masa kejayaannya. Dalam Negarakretagama dijelaskan bahwa pada masa Hayam Wuruk, wilayah Majapahit meliputi seluruh Nusantara bahkan sampai ke Tumasik (Singapura) dan Semenanjung Malaya. Daerah yang belum dapat dikuasai Majapahit adalah Pajajaran.

Pada 1364, Gajah Mada wafat setelah mengabdikan diri lebih dari 30 tahun di Majapahit. Pada 1389, Hayam Wuruk juga wafat. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran. Hayam Wuruk tidak memiliki putra mahkota dari permaisuri. Oleh karena itu, putrinya yang bernama Kusumawardhani diangkat sebagai penguasa Majapahit bersama suaminya yang bernama Wikramawardhana. Sebenarnya Hayam Wuruk memiliki seorang putra yang bernama Bhre Wirabhumi dari selirnya. Untuk menghindari pertikaian, Bhre Wirabhumi diberi kekuasaan di daerah Blambangan, ujung timur di Pulau Jawa.

Setelah Hayam Wuruk meninggal, terjadi perang saudara antara kedua anak Hayam Wuruk ini. Pengangkatan Kusumawardhani sebagai penguasa Majapahit tidak disenangi Bhre Wirabhumi. Rasa tidak senang ini kemudian berkembang menjadi perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg (1401–1406). Dalam Perang Paregreg ini Bhre Wirabhumi terbunuh. Perang berkepanjangan ini membuat Majapahit menjadi semakin lemah. Biaya perang serta jumlah korban yang demikian besar membuat Majapahit tidak bisa mempertahankan keutuhan wilayah. Akhirnya, setelah Wikramawardhana meninggal, Kerajaan Majapahit pecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Rajarajanya antara lain: Suhita (1429–1447), Kertawijaya (1447–1451), Rajasawardhana (1451–1453), Purwa Wisesa (1451–1466), Sunghawikrama Wardhana (1466–1447). Keruntuhan Majapahit diketahui dari Candrasengkala

yang berbunyi Sirno Ilang Kertaning Bumi I yang berarti tahun 1400 Saka atau 1478 M.

Di samping perang saudara yang berkepanjangan, penyebab lain keruntuhan Majapahit adalah semakin berkembangnya pengaruh Islam di Nusantara, terutama di daerah-daerah pantai Jawa, seperti Gresik, Giri, dan Demak. Daerah-daerah ini kemudian melepaskan diri dari Majapahit. Keadaan ekonomi Majapahit yang buruj pun turut menyebabkan keruntuhan Majapahit. Pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk mengurus wilayah kekuasaannya yang demikian luas. Oleh karena itu, banyak daerah yang kemudian tidak terurus dan menyatakan melepaskan diri dari Majapahit.

Akan tetapi, adapula pendapat bahwa Majapahit (yang kekuasaannya tinggal seluas ibukotanya sendiri) benar-benar runtuh setelah ibukota kerajaan tersebut diserang oleh sejumlah santri-santri muslim dari Kudus yang dibantu oleh Raden Patah dari Demak. Mereka ingin menghancurkan kerajaan non-Islam pada 1527 M. Ibukota Majapahit tersebut oleh Tome Pires ditulis Dayo. Patah merupakan anak Raja Majapahit terakhir Brawijaya V dari selir yang berasal dari Campa, Cina bagian selatan (Vietnam).

Pada masa Majapahit, sistem ketatanegaraan telah terstruktur dengan baik. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahan raja dibantu oleh Dewa Sapta Prabu yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada raja. Anggota dewa sapta prabu adalah para sanak saudara raja. Urusan keagamaan diurus oleh dharma dyaksa, yaitu dharmadyaksa ring kasiwan untuk urusan agama Hindu dan dharmadhyaksa ring kasogatan untuk urusan agama Budha.<sup>53</sup>

## **Kesimpulan**

Secara harfiah, historiografi berasal dari gabungan dua kata, yaitu histori yang berarti sejarah dan grafi yang berarti deskripsi atau penulisan. Jadi, berdasarkan asal katanya historiografi berarti penulisan sejarah. Secara lebih luas, historiografi dapat diartikan sebagai sejarah penulisan sejarah. Kronik-kronik yang ditulis pada

---

<sup>5</sup> Suwito, T. 2009. Sejarah : Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, p. 368

masa kerajaan-kerajaan kuno merupakan salah satu bentuk historiografi. Bentuk ini termasuk dalam historiografi tradisional.

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.averroespress.net/press-corner/katalog-buku/320-teori-teori-politik.html>

Budiardjo, Miriam. 1993. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia

Sunanto, Musyrifah. 2007. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suwito, T. 2009. *Sejarah : Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

## **BAB IX**

# **POLITIK NEGARA**

**Rizky Perdana Arisandy**  
**(14140038)**

Pengertian ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yang termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian.

Dari beberapa ilmuwan yang berupaya mengembangkan ilmu politik secara positif dengan analisis politik. Sedangkan yang lainnya mengembangkan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus. Pembelajaran politik diperumit dari terlebatnya ilmuwan politik dalam proses politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, misalnya jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta pemilihan umum untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan.

Ilmuwan politik berperan sebagai penasihat politikus tertentu, atau sebagai politikus. Ilmuwan politik sering terlihat bekerja di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka bekerja di lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberikan nilai tambah yang menyumbangkan keahliannya pada perusahaan.

Negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933

## Referensi Politik Negara

### *Aristoteles*

Politik Negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti Negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Tujuan terbentuk nya Negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga Negara, bukan individu tertentu.<sup>54</sup>

### *Johan Kaspar Bluntschli*

Dalam buku *The Teory of the State*: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (*The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development*).<sup>55</sup>

Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.<sup>56</sup>

Pada zaman Plato, doktrin teokratis tentang asal mula negara yang mempercayai bahwa negara dicipta oleh para dewa-dewi dan yang ditetapkan menjadi raja atau kaisar adalah juga dewa-dewi dan keturunannya mulai memudar popularitasnya dan digantikan oleh kemunculan ajaran kaum sofis. Protagoras, seorang tokoh Sofis terkemuka mengungkapkan bahwa negara dicipta oleh manusia itu sendiri. Pada mulanya manusia hidup sendiri-sendiri, namun ternyata hidup sendiri mengundang banyak gangguan dan kesulitan, terutama yang berasal dari luar dirinya sendiri, seperti gangguan binatang buas, bencana alam dan lain-lain. Ajaran Phytagoras tentang asal mula negara ini sangat memengaruhi pemikiran Plato. Plato membenarkan ajaran tersebut, namun dia melihat bahwa

<sup>54</sup> Yulia siska M.Pd, sejarah politik, Ysw waana, Bandar lampung, 2015, hlm. 9

<sup>55</sup> Lukman hakim, “politik negara”, di akses dari <http://fatih-io.biz/pengertian-politik-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 13 desember pukul 12.01

<sup>56</sup> Herma putra “ pengertian politik menurut para tokoh dan ahli” Tuesday , 6 agustus 2013, di akses dari <http://herma-putra.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-politik-menurut-para-tokoh.html>, pada tanggal 13 desember 2015 pukul 12.18

gangguan yang dihadapi manusia tidak semata dari luar dirinya, namun justru terutama berasal dari dalam dirinya sendiri.

Bagi Plato negara dibentuk oleh keterbatasan dan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi banyak keinginan dan kebutuhan. Sebagaimana Plato mengatakan bahwa suatu negara terbentuk karena tidak ada seorangpun di antara kita yang sanggup hidup mandiri, kita membutuhkan banyak hal. Sehingga hal tersebut hanya dapat dipenuhi apabila manusia bekerja sama untuk dapat saling menutupi keterbatasan dan memenuhi kekurangan sekaligus kebutuhan masing-masing. Kerja sama manusia demi kepentingan bersama, melahirkan kecakapan, keterampilan, dan spesialisasi serta pembagian tugas yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik. Persekutuan hidup dan kerja yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik itu, kemudian membentuk apa yang disebut dengan negara. Sehingga negara seharusnya dilihat sebagai sarana yang mengharuskan adanya tanggung jawab dari warganya untuk saling membantu, mengisi, bekerja sama, menukar jasa, dan saling membangun.

Oleh karenanya bagi Plato, ide tertinggi adalah kebaikan dan kebajikan, sehingga negara ideal merupakan suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan, yaitu negara yang bersendikan keadilan, selain kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Pemikiran Plato tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya yang hidup di masa 27 tahun perang Peloponessos. Sparta berhasil mengalahkan Athena yang kala itu berdasarkan pemerintahan yang demokratis, diyakini secara kuat oleh ningrat Athena pemerintahan Athena yang sedemikian rupa telah gagal dalam memenuhi kebutuhan rakyat baik di bidang moral, politik, ataupun spiritual. Tidak hanya itu, kekuasaan dan hukum menjadi sumber penyelewengan seiring dengan penguasa yang korup sehingga dalam hal ini moralitas menjadi esensial sebagaimana menurut Plato manusia dan negara memiliki kesamaan. Dalam hal ini, selanjutnya Plato mengungkapkan bahwa negara ideal pada hakikatnya adalah suatu keluarga karena dalam keluarga semua saudara. Oleh karena itu pula, menurut Plato negara tidaklah boleh terlalu besar

ataupun terlalu kecil. Ukuran suatu negara hendaknya disesuaikan dengan kemampuan untuk menjaga dan memelihara kesatuan dalam negara itu sendiri.<sup>57</sup> Aristoteles merupakan murid Plato yang lahir di kota Stagira, sebuah perkampungan Yunani di Pantai Macedonia. Berbeda dengan Plato, Aristoteles berasal dari keluarga menengah, ayahnya Nichomachus adalah sahabat dan dokter keluarga Amyntas II, Raja Macedonia. Sejak kecil Aristoteles diasuh dan dididik oleh ayahnya sendiri dalam bidang kedokteran dengan harapan agar ia dapat menggantikan kedudukan ayahnya di Macedonia, namun kemudian Ayahnya meninggal sebelum menamatkan pelajarannya. Pada usia 18 tahun ia pergi ke Athena, belajar pada Plato selama lebih kurang dua puluh tahun lamanya. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Athena, mengembara ke Asia kecil kemudian ke Macedonia menjadi guru Iskandar Zulkarnain.<sup>58</sup>

### **Daftar Pustaka**

- Siska, Yulia. 2015. *Sejarah Politik*. Bandar lampung: YSW Wacana.
- Lukman hakim, “politik negara”, di akses dari <http://fatih-io.biz/pengertian-politik-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 13 desember pukul 12.01
- Herma putra “ pengertian politik menurut para tokoh dan ahli” Tuesday , 6 agustus 2013, di akses dari <http://herma-putra.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-politik-menurut-para-tokoh.html>, pada tanggal 13 desember 2015 pukul 12.18
- Rapar, J.H. 2001. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Basalim, H.Umar. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta : PT Bumi Aksara

---

<sup>57</sup> Rapar, J.H. 2001. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

<sup>58</sup> Basalim, H.Umar. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta : PT Bumi Aksara

## BAB X KOMUNISME

Sariyati  
(12140061)

Di antara pandangan Marx yang dianggap penting oleh pendukung aliran Marxisme adalah teori perjuangan kelas (*Struggle of Classess*).<sup>59</sup> Kelas merupakan sebuah konsep yang menentukan kedudukan sosial manusia dari segi kepemilikan benda atau harta yang tidak dapat dipisahkan dari konsep ekonomi. Kecenderungan Marx untuk menganalisis ide-ide tentang teori kelas ditonjolkan dalam bagian akhir karyanya yaitu *Das Capital*. Secara umum, konsep kelas sosial yang diutarakan oleh Marx telah diterjemahkan dalam versi sistem ekonomi kapitalisme.

Dalam karyanya tersebut, Marx telah membagi tiga kelas utama dalam struktur masyarakat kapitalis, yaitu kelas buruh upahan (*Wage Labourers*), kelas kapitalis, dan kelas pemilik tanah (*Landowner*). Walau bagaimanapun, perkembangan struktur industri kapitalisme hanya memperkenalkan dua jenis kelas saja, yaitu borjuis dan proletar. Semua kelas buruh upahan akan diklasifikasikan sebagai kelas proletar. Sedangkan kelas kapitalis dan pemilik tanah dimasukkan dalam kelas borjuis. Namun kedua kelas yang diklasifikasikan dalam kelas borjuis tersebut bersaing ketat dalam memperoleh dan merebut keuntungan atau kekayaan. Dan mereka yang ‘kalah’ akan diletakkan di posisi kelas proletar.

Kelas proletar dan borjuis memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Kelas borjuis memiliki dan menguasai alat-alat produksi serta menguasai seluruh rangkaian sistem produksi, sedangkan kelas proletar dijadikan sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk kelas borjuis dalam rangkaian proses produksi. Kelas proletar seringkali dianggap sebagai kelasnya orang-orang yang hanya memiliki tenaga kerja. Mereka tak memiliki apapun selain tenaga yang mereka gunakan untuk bekerja. Sebagai imbalannya, mereka menerima gaji dari kaum borjuis

---

<sup>59</sup> Indriaty Ismail & Mohd Zuhaili Kamal Bashir (2012). *Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial*. International Journal of Islamic Thought, Vol.1, p.28.



dengan jumlah yang sangat rendah. Ini tentu saja tidak adil bagi mereka. Jurang perbedaan antara kedua kelas inilah yang menyulut perjuangan dan pertentangan antara kelas-kelas sosial. Marx menyebutkan bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertentangan antara kelas yang menindas dan kelas yang tertindas. Ia mengatakan bahwa pertentangan tersebut kadang kala dapat dilihat secara tersembunyi, tetapi terkadang juga dapat berlaku dan dilihat secara terbuka.

Marx diasah oleh analisisnya yang semakin matang terhadap sistem kapitalisme dini di awal Revolusi Industri di Inggris. Marx menaruh perhatian yang mendalam terhadap fenomena dehumanisasi kaum pekerja, termasuk buruh perempuan dan anak-anak. Kelas buruh yang diperas tenaganya dengan imbalan upah yang jauh di bawah nilai jual komoditi yang dihasilkannya, sementara nilai lebih (*surplus value*) komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh kaum buruh memperkuat sistem produksi kapitalis dan menguntungkan kaum borjuis.<sup>60</sup> Setelah menyadari bahwa sistem ekonomi merupakan pondasi, yang di atasnya superstruktur politik didirikan, Marx mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari sistem ekonomi ini.<sup>61</sup>

*Das Capital*, karya Marx yang paling monumental telah membuktikan bahwa Marx adalah orang yang konsisten dalam studi mengenai sistem ekonomi modern, yakni kapitalisme, ekonomi politik klasik, sebelum Marx, yang berkembang di Inggris, negeri yang paling maju saat itu.<sup>62</sup>

Sistem sosial baru yang akan didirikan kaum proletar tidaklah sama seperti kelas feodalisme atau kapitalisme. Kaum proletar, justru sebaliknya, akan mengimplementasikan sebuah kondisi sosial yang tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas merupakan manifestasi dari perjuangan kaum proletar untuk menghapus jurang pemisah di antara kelas sosial. Dengan terwujudnya kondisi tersebut, sistem kekuasaan tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menindas suatu golongan masyarakat. Perjuangan kelas seperti itu hanyalah berakhir melalui penghapusan sistem kapitalisme dan terwujudnya masyarakat tanpa kelas (komunisme).

---

<sup>58</sup> Marx, Karl. 1955. *The Poverty of Philosophy*. Brussels : Progress Publishers

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 82

<sup>62</sup> Indriaty Ismail & Mohd Zuhaili Kamal Bashir. *Op.Cit.*, p.31

Kaum buruh sebagai kaum proletar untuk memenangkan revolusi sosialis salah satu syarat pokok menurut dalil Marxis adalah mayoritas daripada penduduk harus terdiri atas proletariat. Dan oleh sebab itu, di negeri di mana proletariat belum cukup berkembang dan belum merupakan mayoritas daripada penduduk, kemenangan sosialisme tidaklah mungkin.

Taktik perjuangan kelas yang digunakan Marx seringkali menjadi isu perdebatan di antara pemikir - pemikir Marxisme setelahnya. Taktik tersebut merujuk kepada konsep diktator proletariat. Konsep tersebut menjadi kunci utama dalam memahami teori Marx berkenaan bentuk masyarakat komunis dan fungsi negara proletariat.

Marx dan Engels dalam karyanya *The Communist Manifesto* (1970: 74) telah mengemukakan *Political Rule of Proletariat* yang menyarankan agar golongan proletariat menaklukkan penguasaan negara agar mereka bisa memanfaatkan kuasa politiknya untuk merampas semua modal dari cengkaman golongan borjuis dan memusatkan semua alat produksi di bawah kekuasaan negara yang dikuasai oleh golongan proletariat sendiri.<sup>63</sup>

## Kesimpulan

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari *Manifest der Kommunistischen* yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada *perjuangan kelas (sejarah dan masa kini)* dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori

---

<sup>61</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva. 2011. *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. xi

dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi karena Pancasila memiliki nilai-nilai filsafat mendasar juga rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai sebuah landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, Pancasila merupakan wujud dari konsensus nasional, itu semua karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah sketsa negara moderen yang telah disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai-nilai dari kandungan Pancasila itu sendiri dilestarikan dari generasi ke generasi.

Ideologi pancasila sendiri adalah suatu pemikiran yang beracuan Pancasila. Pancasila dijadikan ideologi dikarenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ismail, Indriaty & Mohd Zuhaili Kamal Bashir. 2012. *Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial*. International Journal of Islamic Thought, Vol.1, pp.28-33
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso. 2011. *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Marx, Karl. 1955. *The Poverty of Philosophy*. Brussels : Progress Publishers

## **BAB XI**

# **FASISME**

**Anis Marifatul Janah**  
**(14140003)**

Fasisme adalah sebuah gerakan politik penindasan, nama fasisme berasal dari kata latin ‘fascies’ artinya kumpulan tangkai yang diikatkan kepada sebuah kapak, yang melambangkan pemerintahan di romawi kuno. Fasisme sesungguhnya merupakan ideologi yang di bangun menurut hukum rimba, fasisme juga bertujuan membuat individu dan masyarakat berfikir dan bertindak seragam, untuk mencapai tujuan ini fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama semua metode propaganda bahkan melakukan genocide (pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan atau bangsa).

Fasisme sebagai ideologi berkembang pada abad ke 20 ia menyebar dengan pesat di seluruh dunia pada perang dunia 1. Pemerintahan yang menganut ideologi fasisme dekat dengan kekerasan diktator dimana kekuatan yang brutal pertumpahan darah dan kekerasan menjadi hukum. Sampai di akhir perang dunia ke 2 ideologi fasisme menjadi salah satu malapetaka terbesar dalam sejarah umat manusia yang merenggut nyawa 55 juta orang.

Di saat sekarang ini tidak ada satu negarapun yang menyebut diri sebagai fasis atau secara terbuka mempraktikan fasisme, namun mungkin ada pemerintahan, kelompok atau partai politik yang mengikuti pola pola fasistik walaupun nama dan taktiknya telah berubah, mereka masih terus menimbulkan kesengsaraan serupa pada rakyat.

Prinsip mendasar di balik fasisme masa kini adalah Darwinisme, yang dimunculkan seakan akan suatu teori ilmiah meski tidaklah demikian adanya, namun darwinisme yang menyatakan klaim klaim seperti “manusia adalah hewan yang telah berkembang sempurna” beberapa ras telah tertinggal dalam proses evolusi, dan melalui seleksi alam yang kuat akan bertahan dan yang lemah tersingkir telah menjadi sumber bagi banyak ideologi berbahaya sepanjang abad ke-20 terutama fasisme. Di samping itu kemerosotan kondisi sosial juga dapat

membuat dukungan terhadap fasisme makin berkembang sehingga fasisme terus menerus menjadi ancaman bagi kemanusiaan.

### **Pengertian Fasisme Dari Beberapa Sumber**

Kata fasisme di ambil dalam bahasa italia, fascio, sendirinya dari bahasa latin, fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman kekaisaran romawi di bawa ke depan penjabat tinggi. Fasis ini merupakan simbol dari kekuasaan penjabat pemerintah. Pada abad ke-20 fasisme muncul di italia dalam bentuk Benito Mussolini.<sup>64</sup> Sementara itu, di jerman juga muncul sebuah paham yang masih biasa di hubungkan dengan fasisme, yaitu nazisme pimpinan adlof hitler. Nazisme berbeda dengan fasisme italia karena yang di tekankan tidak hanya nasionalisme saja, tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat kuat.

Karena kuatnya nasionalisme sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang di anggap lebih rendah<sup>65</sup>, sebuah Negara fasis tidak akan lahir sebelum Negara itu merasakan akan kehidupan demokrasi, selain itu fasis juga lahir dalam sebuah Negara industri di mana ketegangan-ketegangan ekonomi dan social dan system ini hanya dapat di atasi dengan dua cara secara liberal atau totaliter suatu system kenegaraan yang pernah mencapai masa kejayaanya dalam abad ini adalah Negara fasis.<sup>66</sup>

Negara fasis bersifat totaliter serta penyelenggaraannya tidak berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan idiologi atau kepentingan gerakan yang menguasai Negara. Negara fasis melulu berdasarkan kekuasaan dan meremehkan hukum. Idiologi Negara fasis condong kearah chauvisme, suka memandang hina terhadap Negara, bangsa, kebudayaan lain. Kesamaan hak dan harkat dari semua bangsa, kebudayaan lain.<sup>67</sup>

Fasis me menurut buku sejarah politik yulia siska S.Pd., M.Pd. Pengertian fasisme berasal dari bahasa italia “fascio” yang di ambil dari bahasa latin “fasces”

---

<sup>64</sup> Vincent Bero, Musolini Diantara Bayang-Bayang Hitler Dan Romantika Clara Petacci,(Jakarta: Transmedia Pustaka,2007), hlm. 13.

<sup>65</sup> Ruper butler, hitler young tigers (sepak terjang remaja nazi pemuja hitler dalam perang dunia II), (Jakarta : planet buku, 2008), hlm. 15

<sup>66</sup> Wiliam ebenstain, isme-isme yang mengguncang dunia, (Yogyakarta: narasi, 2006)

<sup>67</sup> Franz magnis-suseno, kuasa dan moral, Pt Gramedia, Jakarta ,thn , hlm. 27.

yang artinya seikat batang kayu. Dalam budaya romawi kuno, fasces ini di berikan kapak di bagian tengahnya, lalu di gunakan sebagai simbol kekuatan dari beberapa unsur yang menyatu.<sup>68</sup>

Dalam pengertian penulis secara pribadi, FASIS adalah doktrin untuk ikut mencampuri ekonomi, memusatkan kekuasaan secara luar biasa dalam hal politik, menjalankan paham kebangsaan ekstrim dalam hal kebudayaan, langkah selanjutnya tentulah menggunakan tindakan perang untuk mewujudkan tujuan “pemulihan rasa kebangsaan”.

Fasisme sangatlah dalam melukai umat manusia, hal ini tidak perlu diragukan lagi. Dibandingkan dengan komunisme, mana yang lebih mengerikan? Mari kita buat suatu perbandingan sederhana.

1. Jumlah manusia yang dibantai. Pembantaian yang dilakukan fasis Jerman terhadap orang Yahudi, “Pembantaian besar di Nan Jing” yang dilakukan oleh fasis Jepang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan korban perang sejumlah puluhan juta, orang-orang yang secara tidak langsung terkena dampaknya berjumlah seratusan juta.
5. Komunisme, “pembersihan besar-besaran” ex Uni Soviet, berbagai “aksi” negara-negara Eropa Timur, “Khmer Merah”-nya Kamboja, PKT mendalangi “reformasi agraria”, “reformasi industri dan perdagangan”, “gerakan menentang tiga jahat”, “gerakan menentang lima jahat”, “bencana alam tiga tahun”, “revolusi kebudayaan”, “pembantaian 4 Juni”, “penindasan terhadap Falun Gong” dan lain-lain, orang yang langsung dicelakai dan tewas sejumlah seratusan juta, jumlah orang yang dicelakai secara tidak langsung berjumlah beberapa ratus juta”.
2. Sasaran pembunuhan. Fasisme membunuh orang dari negara lain, atau bangsa lain. Komunisme khususnya membunuh orang senegara dan sebangsa.
3. Metode membunuh. Fasisme pada dasarnya menggunakan metode perang, pembantaian terhadap bangsa Yahudi dan Tionghoa menggunakan gas beracun, penembakan, pemenggalan kepala dan lain-lain. Komunisme, menggunakan metode yang penuh sensasi di sepanjang sejarah,

---

<sup>68</sup> Yulia Siska,M.Pd, Sejarah Politik, ysw wacana, Bandar Lampung, 2015, hlm. 56.

berkembang sampai sekarang, sudah sampai pada “perampasan organ tubuh secara hidup-hidup dari praktisi Falun Gong dan orang-orang yang berbeda pandangan dengannya”, tindakan biadab yang kejam semacam ini sudah melampaui imajinasi manusia manapun dan melampaui batas bawah garis moral manapun.

4. Perampasan ekonomi. Fasisme ke luarnya melakukan perampasan ekonomi, ke dalam meskipun ikut mencampuri ekonomi, namun masih tetap menjaga kekayaan pribadi. Komunisme, ke luar, dengan nama yang diperindah melakukan “the united front” dan “bantuan”, ke dalam melakukan perampasan ekonomi, terhadap para anteknya memberikan manfaat tertentu, rakyat kebanyakan ditakdirkan kerja berat dan hidup miskin. Perkembangan sampai sekarang masih tetap seperti dulu.
5. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Fasisme tidak menyangkal teisme, bahkan menepuk dada menyatakan sebagai “rakyat kerajaan Allah” (nenek moyang orang Arian-Jerman adalah Tuhan, orang Jepang adalah kawulo Amaterasu-oominokami Tenshoo-daijin dan lain-lain). Bahkan secara di luar dugaan menunjukkan sangat menghormati agama Kristen, Katholik, agama Budha Tibet dan lain-lainnya, hal ini diserahkan saja pada para ahli agama dan teologia untuk mendiskusikannya, artikel ini tidak mengulasnya. Komunisme, menyangkal segala bentuk teisme, merusak segala kebudayaan yang diajarkan oleh Tuhan, menganiaya segala penganut ajaran Tuhan, hal ini juga merupakan akar kaum komunis melakukan kejahatan tanpa rasa kuatir, kejam tanpa batas bawah.

Munculnya fasisme merupakan tragedi yang ditakdirkan bagi umat manusia, kemunculannya ditakdirkan mendatangkan peperangan, malapetaka, berlumuran darah, keganasan. Umat manusia hanya dengan mengembangkan nilai-nilai universal, mengembangkan moral, mengembangkan bangsa dan saling mengasihi antar bangsa, barulah dapat menghindari kemunculannya lagi.

Kemunculan komunisme merupakan tragedi yang belum pernah terjadi bagi umat manusia, ia menyangkal keberadaan Tuhan, menyangkal semua tenaga supernatural, menyangkal segala moralitas dalam dunia, menyangkal segala sifat

baik umat manusia. Di mana ia berada, hak hidup umat manusia dan hak atas kekayaan dirampas, pikiran diberangus, kebebasan sampai taraf maksimum dirampas.

Kebanyakan negara dan bangsa di dunia telah mencampakkan komunisme, “arwah” tersebut masih tetap bertahan megap-megap di Tiongkok. Dalam makna tertentu, sejarah umat manusia yang berkembang sampai saat ini, menentang ataupun tidak, “setiap pribadi manusia secara konkrit” akan mengalami ujian akhir, apakah dapat berpikir secara mandiri, apakah masih memiliki pandangan dasar tentang baik dan jahat, apakah masih memiliki sifat-sifat manusia yang mendasar, apakah masih memenuhi syarat untuk menjadi “manusia”, dengan menolak atau menerima komunisme. Komentator web yang beken maupun kecil, para tukang pukul besar-kecil yang masih tetap diperalat olehnya, janganlah masih tetap dikacaukan pikirannya! Dalam sejarah sampai saat ini, ideologi tersebut adalah yang paling mahir dalam mencelakai “orang-orang sendiri”!<sup>69</sup>

Dalam buku Mikhail Gorbachev pada bab 6 membahas sedikit tentang fasis yang ada di Eropa, khususnya pada bab 6 yaitu dalam bab “Eropa dalam kebijakan luar negeri Soviet” pada alenia 9 yaitu : sejak dulu peperangan merupakan peristiwa yang menonjol dalam sejarah Eropa, pada abad ke dua puluh, benua itu telah menjadi ajang dua perang dunia yang paling destruktif dan memakan banyak korban yang pernah di kenal umat manusia. Bangsa kami memberikan pengorbanan yang paling besar di altar perjuangan kemerdekaan melawan fasisme Hitler. Lebih dari dua puluh juta rakyat Soviet terbunuh dalam perang mengerikan itu. Kami tidak bermaksud membangkitkan kembali kenangan ini di sini untuk meremehkan peranan bangsa Eropa lainnya dalam pertempuran melawan fasisme. Rakyat Soviet menghargai sumbangan yang telah di berikan oleh semua Negara koalisi anti-Hitler dan oleh para pejuang perlawanan untuk mengalahkan bangsa-bangsa fasis. Tetapi kami sama sekali menolak anggapan bahwa Uni Soviet “baru” bergabung melawan Nazi di Jerman pada tahun 1941, sedangkan Negara lainnya sebelumnya telah terpaksa melawan Hitler “sendirian”. Ketika Ny. Thatcher member tahu saya hal seperti itu, saya berkeberatan,

---

<sup>69</sup> Era baru, perbandingan antara fasisme dan komunisme , dampak pada umat manusia di akses dari, <http://erabaru.net/2015/10/05/perbandingan-antara-fasisme-dan-komunisme-dampak-pada-umat-manusia/>, pada tanggal 11 desember 2015 pada pukul 10:32



mengingatkan kepadanya bahwa Uni Soviet secara politis sudah berjuang melawan fasisme sejak tahun 1933 dan sejak tahun 1936 dengan senjata, dengan mendukung pemerintahan republic spanyol.

Dalam buku ini menceritakan bagaimana kuatnya paham fasisme yang ada di Jerman di bawah naungan Hitler, hingga Negara-lain bersatu untuk mengalahkannya dan akhirnya fasis kalah dengan ideologi baru yaitu sosialis.

Dalam buku ilmu Negara umum karya prof. Mr. Kranenburg, Mr. Tk. B. Sabaroedin, Pada hlm 89 yaitu : “mein kampf” Hitler, maka Koellreuter terakhiri bagian uraiannya ini dengan : “und nach Adolf Hitler liegt die mission der national sozialistischen bewegung nicht in der begründung einer monarchie oder der festigung einer republic, sondern in der schaffung eines germanischen staats.”<sup>70</sup> semua ini tidak memberikan penerangan satupun “menciptakan Negara Jerman” Negara manakah? Sebagaimana kita lihat di atas terdapatlah lebih dari satu : tidak lah terdapat hanya satu “Negara Jerman”. Barangkali yang ia maksudkan ialah pengangkatan atas perisai : akan tetapi- hal ini pilihan rakyat dalam bentuk gambaran yang primitive. Dalam Negara modern hal itu harus di organisir. Dalam buku ini lebih menjelaskan bagaimana Negara Jerman menjadi sebuah Negara di bawah Adolf Hitler.<sup>71</sup>

### Daftar Pustaka

- Vincent Bero, Musolini. 2007. *Di Antara Bayang-Bayang Hitler Dan Romantika Clara Petacci*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Ruper Butler. 2008. *Hitler Young Tigers (sepak terjang remaja nazi pemuja Hitler dalam perang dunia II)*. Jakarta : planet buku
- Ebenstain, Wiliam. 2006. *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia*. Yogyakarta: Narasi
- Suseno, Franz magnis. *Kuasa Dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia
- Siska, Yulia. 2015. *Sejarah Politik*, Bandar Lampung: YSW Wacana.
- Era baru, perbandingan antara fasisme dan komunisme , dampak pada umat manusia di akses dari, <http://erabaru.net/2015/10/05/perbandingan-antara->

<sup>70</sup> menurut Adolf Hitler tujuan gerakan nasional sosialis tidak terletak dalam mendirikan monarchi atau menegakan republic, melainkan dalam menciptakan Negara Jerman.

<sup>71</sup> KRANENBURG, Mr. Tk. B. SABAROEDIN, ilmu Negara umum, muliasari, Jakarta, 1983, hlm 89

## **BAB XII**

# **FILSAFAT POLITIK PLATO DAN ARISTOTELES**

**Meiza Suri**

**14140027**

### **Plato**

Athena masih merupakan kota niaga yang cukup penting namun kejayaannya selaku negara kota yang pernah dikagumi dan disegani telah lampau. Pada zaman itulah sokrates dan plato hidup diathena. sebelum athena mengenal demokrasi, bentuk negara kota athena ialah monarki kemudian oligarki. Pada saat yang memegang pemerintahan itu satu orang (tiran), bentuk negaranya disebut monarki. sesudah kekuasaan para tiran berlalu maka athena mengenal pemerintah oleh beberapa orang secara bersama sama. bentuk negara yang demikian itu disebut oligarki (beberapa).

Baru pada sekitar 594 sm solon, negarawan yang sangat bijaksana itu meletakkan dasar dasar demokrasi . para petani dibebaskan dari segala hutang mereka. Sedangkan orang orang yunani yang telah dijadikan budak harus memperoleh kembali kemerdekaan mereka. Sejak saat itu orang orang athena dilarang mengambil orang sebangsanya untuk dijadikan budak.

Walaupun reformasi salon tidak sanggup menggeser kedudukan para bangsawan dan kekuasaan politik athena, sehingga pada hakikatnya bentuk negara athena tetap oligarki. Namun pemikiran politik solon merupakan suatu ayunan langkah maju yang sangat penting menuju demokrasi. Yang paling utama yang patut diketengahkan lalu salon berhasil membentuk suatu perwakilan rakyat yang memperoleh hak dan kuasa untuk mengangkat pejabat pejabat negara membuat undang undang dan mengambil keputusan untuk berperang atau berdamai.

### **Aristoteles**

Menurut aristoteles demokrasi merupakan timbul dari ide yang mengatakan bahwa semua manusia yang dalam hal tertentu memiliki persamaan sesungguhnya pada hakikatnya memang sama. Karna semua manusia sama sama

bebas maka semua manusia secara mutlak memiliki kesamaan hak. dasar dari negara demokratik ialah kebebasan, yang bagi mereka yang menganut paham demokrasi mengatakan bahwa kebebasan itu hanya dapat dinikmati dalam negara demokratik.

Aristoteles mengatakan bahwa selain itu, para penganut paham demokrasi memuja kebebasan yang keliru dan merusak keutuhan negara. Mereka berpendapat bahwa demi kebebasan maka setiap orang harus hidup menurut kehendaknya masing masing karna itulah bukti yng paling nyata yang sanggup menunjukkan bahwa mereka benar benar bebas. Apabila ada warganegara yang tidak dapat hidup menurut apa yang disukainya itu menunjukkan kebebasan yang sesungguhnya tidak ada. Yang ada ialah perbudakan warganegara. Pemikiran yang demikian itu menurut aristoteles, pada puncaknya akan menuntut apsenya pemerintahan negara. Karna semua orang bebas dan karna semua orang memiliki kesamaan hak. Maka yang terbaik ialah biarkanlah orang orang memerintah dirinya sendiri, namun apabila tudak mungkin maka biarkanlah setiap orang ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Bahkan lebih dari pada itu, berdasarkan kesamaan hak, semua orang dapat menuntut partisipasi yang sama dalam segala hal hal.

Menurut aristoteles, satu hal lain yang paling mencolok dalam kepenjabatan menurut paham demokrasi ialah bahwa seluruh pelayanan para peenjabat, baiik penjabat esekutif atau mereka yang duduk di dewan perwakilan rakyat maupun yang duduk di dewan pengadilan, haruslah memperoleh bayaran atau upah. Itulah akibatnya apabila mayoritaas yang terdiri dari orang orang miskin dan yang tidak berpendidikan yang berkuasa . adapun mutu pelayanan dari penjabat penjabat di negara demokratik ditentukan oleh besar kecilnya jumlah upah yang diterima.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Dr. J.h. Rapar, divisi buku perguruan tinggi, pt rajagrafindo persada, jakarta, 2001, hlm 25

## **Filsafat politik Santo Agustinus dan Machiavelli**

### **Santo Agustinus**

Kehidupan dan pemerintahan negara Allah.

Agustinus mengatakan bahwa Allah yang mencipta, membangun mendirikan negara surgawi, adalah Allah yang membuat kebijakan Allah itu melampaui segala kebijaksanaan para raja atau para filsuf. Sebab kebodohan Allah jauh lebih bijak dari pada kebijakan manusia. Yang paling bijaksana dan kelemahan Allah jauh lebih kuat dari pada kekuatan manusia yang paling kuat. Kekuasaan merupakan suatu hal yang paling penting dan paling utama bagi suatu pemerintahan. Tidak heran apabila ada yang mengatakan bahwa pemerintah adalah sistem kekuasaan. Bahkan ada pula yang mengidentikkan pemerintah adalah dengan kekuasaan itu sendiri. Allah menunjukkan bahwa Allah berada di atas segala kekuasaan. Dan Allah yang berada di atas segala kekuasaan itu adalah Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu Agustinus mengatakan “ia patut disebut mahakuasa”

### **Machiavelli**

Machiavelli mendefinisikan politik dan etika negara.

Seluruh pemikiran politik Machiavelli sebenarnya bermuara keselamatan, kebebasan, kedaulatan dan kejayaan negara. Apabila di dalam prinsip, ia berupaya menguraikan tentang kekuasaan dan tentang betapa perlunya memiliki militer yang tangguh. Kesemuanya itu adalah demi keselamatan, kebebasan, kedaulatan dan kejayaan negara. Dan apabila didalam discorsi ia mendambakan suatu reformasi di bidang agama, adalah semata mata untuk keselamatan, kebebasan, kedaulatan dan kejayaan juga. Machiavelli berpendapat bahwa negara dan kepentingan negara harus memperoleh tempat yang khusus dalam pemikiran, perilaku dan tindakan para penguasa.

Menurut Machiavelli bagi Italia yang sedang dilanda oleh disintegrasi politik, degradasi di bidang politik, kesusilaan dan moralitas, sesungguhnya membutuhkan suatu tindakan terapeutik darurat. Dan tindakan yang paling tepat menstabilkan kekuasaan (yang pada saat itu tidak stabil) agar dapat melayani

kepentingan negara dan demi keselamatan, kebebasan , kedaulatan dan kejayaan negara.

Bagi machiavelli sang penguasa harus bertekad hanya mengatur sistem nilai politik yang sama rata tertuju bagi kepentingan negara sedangkan sistem nilai sistem nilai lainya haruslah diabaikan . dengan demikian machiavelli membangun suatu teori politik yang dikenal dengan istilah “kepentingan negara”<sup>73</sup>

Thomas Aquinas adalah filsuf dan teology Abad Pertengahan eropa terbesar. Pikirannya sampai sekarang masih sangat berpengaruh. Thomas Aquinas berhasil mempersatukan ajaran-ajaran Augustinus yang sampai saat itu menentukan pemikiran di Eropa dengan filsafat Aristoteles dan dengan demikian memberikan impuls-impuls baru bagi kehidupan intelektual di Barat. Sejak Thomas filsafat mulai berkembang sebagai ilmu tersendiri.<sup>74</sup>

Thomas Aquinaslah yang menjadikan Aristoteles dasar pemikirannya, tetapi dengan tidak menyingkirkan gagasan-gagasan dasar Augustinus. Ia memperlihatkan bahwa atas dasar kerangka pikiran Aristotelesteologi Augustinus dapat diberi pendasaran yang lebih mantap.

Pengaruh Thomas Aquinas amat besar. Berkat dia, Aristoteles menjadi “sang filsuf” di Barat sampai abad ke-17. Pendekatan Aristoteles yang bertolak dari realitas di dunia memungkinkan perkembangan ilmu-ilmu alam yang selama seribu tahun seakan-akan dilupakan di Barat dan dengan demikian menempatkan Eropa Barat pada jalur kerohanian yang akan menghasilkan budaya modernitas.

Thomas pada hakikatnya bukanlah seorang teoretisi atau filosof politik. Ia adalah seorang teolog sejati yang mengabdikan hidupnya untuk mengembangkan doktrin-doktrin kristiani. Thomas membahas dan melahirkan berbagai pemikiran tentang hukum, Negara, dan kekuasaan politik.

Hukum Alam, Negara, dan Kekuasaan

---

<sup>73</sup> J.H Rapar-ed.1., Filsafat Politik cet. 1 (edisi gabungan ), Jakarta: Pt raja grafindopersada juni 2001, Filsafat politik santo agustinus dan machiavelii Hlm 354.

<sup>74</sup> MUMU MILANO , Demokrasi Menurut Pemikiran Thomas Aqinas Mmuyamin.blogspot.co.id /2010/03/ thomas-aquinas.html MINGGU, 07 MARET 2010

Thomas mengatakan hukum alam “tidak lain merupakan partisipasi makhluk rasional (manusia) dalam hukum abadi (eternal law). Makhluk ciptaan tuhan yang lain adalah makhluk irasional. Sebab hanya manusialah yang dianugerahi Tuhan penalaran, intelegensia, dan akal budi (reason). Makhluk lainnya hanya diberikan instink.

Hukum abadi (eternal law) adalah kebijaksanaan dan akal budi abadi Tuhan. Hukum itu merupakan dasar bagi seluruh hukum sebenarnya (true law) yang sungguh-sungguh tidak diragukan keberadaannya tetapi tidak bisa diketahui oleh akal pikiran manusia. Menurut Thomas tidak mungkin hukum kodrat bertentangan dengan hukum abadi, sebab hukum kodrat mencerminkan hukum abadi Tuhan.

Thomas berpendapat bahwa eksistensi Negara bersumber dari sifat alamiah manusia. Salah satu sifat alamiah manusia adalah wataknya yang bersifat social dan politis. Manusia adalah makhluk social dan politis. Mungkin hal ini nampak dipengaruhi oleh Aristoteles. Tetapi ia memodifikasi konsep binatang politik Aristoteles sehingga cocok dengan filsafat dan doktrin-doktrin Kristiani.

Ia tidak hanya menonjolkan aspek insting hewani sebagaimana Aristoteles melainkan juga menekankan aspek akal budi yang ada dalam diri manusia. Insting dan akal budi merupakan dua esensi kodrati yang menjadikan manusia makhluk politik.

Sebagai makhluk demikian, manusia tergantung pada manusia lain. Tidak mungkin manusia dapat mencapai kebaikan hidup tanpa manusia lain. Dan kebutuhan atau ketergantungan pada manusia lain itu terdapat dalam berbagai sector pemenuhan kebutuhan hidup.

Negara merupakan lembaga social manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota. Lebih dari itu, untuk mengembangkan akal budi dan pemikirannya, individu juga membutuhkan komunitas politik, Negara. Negara dengan demikian merupakan kebutuhan kodrati manusia.

Negara karena merupakan bagian integral alam semesta, memiliki sifat dan karakter dasar yang mirip dengan mekanisme kerja alam semesta pula.

Negara merupakan suatu system tujuan yang memiliki tatanan hierarkis dimana yang berada diatas dan lebih tinggi memerintah. Menata, membimbing, dan mengatur yang berada dibawah atau lebih rendah.

Negara, sebagaimana manusia harus tunduk kepada hukum alam. Bila dirinya berhadapan dengan dirinya sendiri yang akan membawanya kepada kehancuran. Sama seperti manusia yang melawan kodratnya sendiri. Hukum kodrat inilah yang mendasari perilaku dan aspirasi manusia membentuk Negara.

Thomas mengajukan beberapa argument mengapa secara alamiah manusia membutuhkan Negara. Pertama, Thomas sependapat dengan Aristoteles bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Karena itu, manusia tidak hanya tergantung dan membutuhkan manusia lain (makhluk sesama jenis) melainkan juga berbagai substansi alam yang berada diatas didunia ini.

Dalam diri manusia terdapat juga kecendrungan kodrati agar segala sesuatu dapat menjadi bagian dari dirinya (menjadi miliknya), sebagaimana hewan pun memiliki karakter kodrati demikian. Juga, ada kecendrungan dalam diri manusia untuk menemukan, mencari dan mempertahankan apa yang dianggapnya baik sesuai dengan akal budinya.

Thomas mengklasifikasi menjadi tiga kategori, yaitu : man-the substance yaitu Manusia memiliki watak ingin memiliki segala sesuatu yang membuatnya bahagia. man-the animal yaitu Manusia memiliki kecendrungan hewani, kejam suka membunuh dan mengkhianati terhadap sesamanya. man-the moral agent yaitu Manusia memiliki watak cinta, kebenaran, kebaikan dan saling mencintai sesama manusia dan isi alam lainnya. Ia memiliki sifat konstruktif dan positif dari segi moralitas. Dalam konteks pengaturan ketiga jenis watak kodrati manusia itu, suatu negara memiliki kekuasaan yang dibutuhkan.

Kedua, sisi lain watak alamiah manusia adalah manusia bertindak sesuai dengan intelegensianya, karena manusia adalah makhluk yang berpikir. Maka manusia berbuat dan berperilaku dituntun oleh kemampuan daya pikirnya. Tidak sekedar digerakkan oleh instingnya seperti dalam perilaku binatang.

Ketiga, seorang manusia sederajat berhadapan dengan manusia lainnya ketika pertama kali dilahirkan. Tetapi jelas bahwa manusia memiliki perbedaan.

Ada sebagian manusia yang memiliki kelebihan yang melimpah yang tidak dimiliki manusia lain.

Maka Thomas berkesimpulan bahwa kebanyakan manusia harus menerima kepemimpinan segelintir manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan itu dan memiliki keabsahan sebagai penguasa-penguasa politik. Alam menyeleksi manusia yang patut menjadi penguasa politik itu nampak dari kelebihan dan bakat untuk berkuasa.

### **Tugas dan Kewajiban Penguasa**

Kekuasaan karena berasal dari Tuhan harus dipergunakan demi kebaikan bersama dan tidak dibenarkan untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan kekuasaan tidak dibenarkan, karena itu berarti “pengingkaran terhadap anugerah Tuhan”. Thomas berpendapat bahwa seorang penguasa Negara memiliki kewajiban-kewajiban terhadap rakyat yang dikuasainya. Tugas penguasa Negara yang utama adalah mengusahakan kesejahteraan dan kebajikan hidup bersama. Maka penguasa Negara dituntut untuk memungkinkan rakyat memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialnya.

Selain itu, Negara juga memiliki fungsi spiritual keagamaan yang bersifat sacral. Maka penguasa Negara dituntut menyediakan sarana ibadah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya masyarakat spiritual di dunia ini.

Penguasa Negara juga pembela dan penjaga keadilan. Untuk menjadi pembela keadilan penguasa diberikan hak menetapkan hukum. Penguasa menjadi legislator yang mengatur komunitas politik. Hukum yang dirumuskan penguasa tentu harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum kodrat dan tidak boleh bertentangan dengan hukum abadi Tuhan.

Apabila penguasa membuat hukum yang bertentangan dengan hukum kodrat maka rakyat diberi hak untuk menentangnya. Pemikiran ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk bersifat kritis terhadap Negara. Menjaga perdamaian merupakan kewajiban lain penguasa Negara yang kredibilitas ditentukan oleh kemampuannya melaksanakan kewajiban itu.



### **Bentuk-bentuk Negara: Monarki Terbaik dan Tirani Terburuk**

Bentuk Negara menurut Thomas demikian penting karena bentuk pemerintah akan menentukan hakikat atau watak keseluruhan komunitas politik. Thomas sangat dipengaruhi Aristoteles terutama karyanya *Politics*. Itu nampak dari dua kriteria Thomas yaitu jumlah penguasa dan tujuan-tujuan Negara. Negara yang baik adalah Negara yang penguasanya selalu berusaha mewujudkan kebaikan bersama, sedangkan Negara yang buruk penguasanya memiliki uested interested dan mementingkan kebaikan dan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan dua kriteria Thomas mengklasifikasi bentuk-bentuk pemerinatahan. Pertama, Negara yang diperintah satu orang dan bertujuan mencapai kebaikan bersama dinamakan monarki (monarchy), tetapi bila tujuannya hanya mencapai kebaiakn sendiri, penguasanya bengis maka Negara itu dinamakan Tirani (tyranny).

Kedua, Negara yang diperintah beberapa orang mulia dan memiliki tujuan kebaikan bersama dinamakan aristokrasi (aristocracy), bila tidak demikian Negara itu dinamakan oligarki (oligarchy). Dalam oligarki penguasa Negara menindas rakyatnya melalui represi ekonomi. Ketiga, Negara yang bertujuan mencapai kebaikan bersama, dijadikannya kebebasan sebagai dasar persamaan politik, kuatnya control kaum jelata terhadap penguasa dan Negara bersangkutan diperintah banyak orang dinamakan timokrasi atau politea (polity), adapun negara yang kebebasan dan tujuannya tidak demi kebaikan bersama serta diperintah banyak orang dinamakan demokrasi.

Demokrasi bukan bentuk Negara ideal menurut Thomas sama seperti menurut Aristoteles yang memandang demokrasi sebagai bentuk Negara terburuk. Bentuk Negara terbaik menurut Thomas adalah pemerintah oleh satu orang atau monarki. Menurut Thomas pemerintah olehb satu orang, lebih memungkinkan terciptanya perdamaian dan kesatuan Negara.

Denagn penguasa tunggal keanekaragaman pandangan, tujuan dan cita-cita Negara yang ersifat destruktif dapat dihindari. Penguasa sejauh berdasarkan nilai-nilai moralitas dan hukum kodrat, dapat menetapkan secara personal tujuan dan cita-cita Negara. Ini sulit dilakukan apabila Negara diperintah beberapa atau banyak orang.

Negara dengan penguasa tunggal disebut terbaik karena ia sesuai dengan hakikat hukum kodrat dimana alam selalu diperintah oleh satu oknum. Contohnya, tubuh kita yang semua anggota-anggotanya hanya digerakkan oleh satu oknum yaitu hati. Juga dalam dunia binatang analogi serupa ditemukan. Lebah-lebah hanya memiliki satu ratu. Dan ini terpenting keseluruhan alam semesta ditur hanya satu Tuhan pencipta, penata, pengatur segalanya. Tuhan tidak mempunyai saingan. Ini semua menurut Thomas sesuai dengan penalaran dan akal budi.

Bila monarki adalah bentuk Negara terbaik, maka tirani menurut Thomas merupakan bentuk Negara terburuk. Demokrasi meskipun buruk tetapi masih dapat diterima dibandingkan tirani. Alasannya, dalam Negara tirani kemungkinan terjadinya penyelewengan kekuasaan sangat besar. Raja bisa bertindak sewenang-wenang di luar tanpa batas tanpa adanya control dari rakyat.

Negara dengan penguasa satu orang seperti monarki dapat berubah menjadi tiran karena tiadanya pengawasan atau kontrol terhadap kekuasaannya yang berbasiskan kekuasaan turun temurun. Maka Thomas membuat mekanisme untuk mencegah munculnya penguasa tiran.

Pertama, raja atau penguasa tunggal yang memerintah Negara hendaknya harus dianggap berdasarkan pemilihan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat. Raja harus dipilih berdasarkan kualitas yang dimilikinya. Kekuasaan tidak boleh diperoleh karena dari penguasa sebelumnya.

Kedua, mekanisme lain untuk menutup kemungkinan lahirnya seorang tiran ialah dengan membatasi kekuasaan penguasa tunggal bersangkutan.

Ketiga, kesempatan penguasa menjadi tiran juga tertutup manakala dalam system pemerintahan terdapat pemilikan kekuasaan secara bersama-sama. Maksudnya adalah sharing of power dalam pemerintahan.

Jika telah dilaksanakan tetapi belum berhasil maka rakyat yang diperintah boleh mentolerir tirani itu. sebab kalau tirani itu dilawan untuk dijatuhkan akan terjadi malapetaka politik dalam Negara yang akan membuat rakyat lebih menderita.

Jika seorang tiran dibunuh, maka jangan berharap kehidupan berubah karena mungkin saja penumbang tiran itu lebih kejam dan bengis daripada sebelumnya. Berpijak pada ajaran Kristus, Thomas menilai cara menumbangkan

penguasa tiran dengan membunuhnya tidak sesuai dengan ajaran kristiani, khususnya ajaran Santo Petrus. Ia mengajarkan bahwa umat kristiani hendaklah patuh kepada penguasa mereka, terlepas apakah penguasa itu jahat atau baik hati. Senjata lain menghadapi kaum tiran menurut Thomas adalah doa kepada tuhan. Penguasa tiran hendaklah selalu didoakan agar berubah hatinya dari bengis dan kejam menjadi lemah lembut dan baik hati.

#### Daftar Pustaka

Suhelmi, Ahmad, 2007, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suseno, Frans Magnis, 1997, *13 tokoh etika*, Yogyakarta: Kanisius.

#### Demokrasi Menurut Pemikiran MACHIAVELLI

Amalia-hidayatul-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\_detail-99138

pemikiran%20politik%20MACHIAVELLI.html diposting oleh amaliya-hidayatul-fisip13 pada 13 April 2014

#### PEMIKIRAN POLITIK BARAT SITUASI POLITIK

Anonim. 2011. Analisa Pemikiran Niccolo Machiavelli. <http://politik.kompasiana.com/2011/09/24/analisa-pemikiran-niccolo-machiave>, diakses tanggal 18 Maret 2012

Anonim. Nicollo Machiavelli 1469-1527. <http://media.isnet.org/iptek/100/Machiavelli.html>, diakses 18 Maret 2012

Hart, Maichel H. 1978. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah* (diterjemahkan oleh Mahbub Djunaidi). Jakarta: Dunia Pustaka Jaya  
<http://sejarah.kompasiana.com/2011/06/06/niccolo-machiavelli/>

Yuniarto, Djoko. Pemikiran Niccolo Machiavelli. [http://djokoyuniarto.multiply.com/journal/item/14/Pemikiran\\_Niccolo\\_Machiavelli?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://djokoyuniarto.multiply.com/journal/item/14/Pemikiran_Niccolo_Machiavelli?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), diakses tanggal 18 Maret 2012

Suhelmi, Ahmad. "Pemikiran Politik Barat (Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan)", Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syam, Firdaus. "Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filasafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3", Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

### **BAB XIII**

## **ORDE LAMA ORDE BARU: POLITIK HIRUK PIKUK**

**Doli Hariyanto S.**

**15140001P**

### **Indonesia Pasca Kemerdekaan**

Dalam perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (South West Pacific Area Command/SWPAC).

Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari

akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.

*Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:*

1. *Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya.*
2. *Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya.*
3. *Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya.*
4. *Pertempuran Padang dan Sekitarnya*
5. *Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.*<sup>75</sup>

Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sutan Syahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

---

<sup>75</sup> Notosusanto, Nugroho,” Sejarah Nasional Indonesia VI hal 191

Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.

Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan terperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemaikmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemaikmuran akan menjadi rekan (partner) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.

Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir kemudian berkomentar, "Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi... Saya harus memasukkan orang seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet."

**Perjanjian Linggarjati** Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami

tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut:

- Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
- Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pamarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasi dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak. Kepergian S M Kartosoewirjo ini

dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNPI menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya. Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia.<sup>29</sup> Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

Pada tanggal 27 Mei 1947 terjadi Agresi Militer Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli



1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur.. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sedang arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama di dalam politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi

yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah. Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu 'kabinet presidentil' darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.

**Agresi Militer II** terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara

ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

*Menurut Soeharto di dalam bukunya mengatakan : <sup>76</sup>Serangan umum 1 maret pada siang hari itu kami beritakan ke luar negeri melawati Sumatra. Dan dari Sumatra berita di siarkan ke check pointnya di Birma dan dari Birma diteruskan ke New Delhi dan terus tersebar ke seluruh dunia serta menggetarkan yg ada di dalam sidang sidang PBB*

Dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

### **Perjanjian Roem Royen**

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.

### **Serangan Umum Surakarta**

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut.

---

<sup>76</sup> Dwipayana, Soeharto : *Pikiran ucapan dan Tindakan saya* hal 62

### **Konferensi Meja Bundar**

**Konferensi Meja Bundar** adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:

- Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
- Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

### **Penyerahan kedaulatan oleh Belanda**

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika *soevereiniteitsoverdracht* (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan *politieele acties* (Aksi Polisi) pada 1945-1949 adalah ilegal.

### **Orde Lama : Demokrasi Liberal**

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

*Periode ini masuknya Indonesia dalam demokrasi liberal, demokrasi yg berkembang dalam berkembang selama berabad abad melalui melalui modifikasi, baik dalam teori khusus maupun praktek yang dikenal dengan demokratis. Arti kata demokratis, tergantung pada berbagai kata demokratis, tergantung pada kepercayaan politik si pembicara*<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Sargent Lyman Ideologi POLitik Kontemporer Hal 43

Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin Masyumi, di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini merupakan kabinet dimana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, sehingga kabinet ini merupakan Zaken Kabinet.

Program - program dari Kabinet Natsir, di antaranya meliputi :

- mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
- mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat.
- menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
- menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.
- memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
- mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.
- membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat
- Penerapan program benteng, yaitu pengusaha nasional golongan ekonomi lemah diberi bantuan kredit
- Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro)
- Pembentukan DPRD

Keberhasilan yang pernah dicapai Kabinet Natsir :

- Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional

- Indonesia masuk PBB
- Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.
- Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
- Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
- Seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.

Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan DR. Sukiman (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryoanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI).

### **Kabinet Sukiman Suwiryo**

Berikut akan saya jelaskan apa saja program kerja Kabinet Sukiman. Berikut Program Kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut.

1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
3. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
4. Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.

### **Jatuhnya Kabinet Sukiman**

Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act (MSA) atau undang-undang kerja sama keamanan.

Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya Kabinet Sukiman Jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada presiden.

### **Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)**

Kabinet Wilopo disebut juga zaken kabinet, karena terdiri atas para pakar di bidangnya. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo dengan program kerjanya sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kemakmuran, pendidikan dan keamanan rakyat.
2. Berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Tantangan yang dihadapi Kabinet Wilopo selain kondisi ekonomi yang kritis juga munculnya gerakan separatisme di sejumlah daerah. Ujian terberat Kabinet ini adalah “Peristiwa 17 Oktober 1952” dan “Peristiwa Tanjung Morawa”.

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat menekan Presiden Soekarno agar membubarkan kabinet. Sedangkan Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara merupakan bentrokan antara aparat kepolisian dan para petani liar.

Peristiwa ini mendapatkan sorotan tajam, baik dari pers maupun dari parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Dan pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno

### **Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)**

Kabinet Ali Sastroamijoyo I dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo dan merupakan koalisi antara PNI dan NU. Program kerjanya sebagai berikut :

1. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada pertengahan tahun 1955.
2. Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah.
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.



Kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika pada tahun.1955. Sedangkan masalah yang dihadapi adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952.

### **1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap**

Program kerja Kabinet Burhanuddin :

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat

Didalam buku SNI dijelaskan Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Pada Tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya. Hasil pemilihan Umum 1 ini ternyata dimenangkan oleh 4 partai politik yaitu PNI,Masyumi, NU, dan PKI, sedang lainnya partai mendapat suara kecil dari 4 partai lainnya.<sup>78</sup>

Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

### **Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)**

Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo yang merupakan koalisi tiga partai, yaitu PNI, Masyumi dan NU. Program Kabinet ini disebut rencana pembangunan lima tahun yang memuat program-program jangka panjang sebagai berikut :

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
2. Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai.
4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

---

<sup>78</sup> Notosusanto Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia VI hal 317

5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Masalah yang dihadapi kabinet Ali Satroamijoyo II adalah pergolakan di daerah yang semakin menguat, seperti pembentukan dewan militer di Sumatera dan Sulawesi. Dalam kabinet sendiri timbul perpecahan antara Masyumi dan PNI.

Masyumi menghendaki agar Ali Satroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai dengan tuntutan daerah, tetapi dari PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Posisi Kabinet Ali melemah setelah pada bulan Januari 1957 Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 1957, Ali terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden.

#### **Kabinet Karya atau Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)**

Kabinet Karya atau Djuanda dipimpin oleh Djuanda dengan 3 orang wakilnya, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid dan dr. Leimena. Tugas kabinet ini adalah menghadapi pergolakan di daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat, dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kabinet Djuanda menyusun program yang disebut Pancakarya. Oleh karena itu, Kabinet Djuanda disebut sebagai Kabinet Karya. Berikut program-program Pancakarya :

1. Membentuk Dewan Nasional.
2. Normalisasi keadaan Republik.
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.
4. Perjuangan Irian Barat.
5. Mempergiat pembangunan.

Pada tanggal 14 September 1957 diadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di daerah. Munas berlangsung di gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 yang dihadiri tokoh-tokoh dari pusat dan daerah.

Masalah yang dibahas dalam Munas seperti masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembangunan wilayah RI. Kemudian

Munas dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada bulan November 1957.

### **Demokrasi Terpimpin**

Selama 4 tahun, Konstituant ditandai dengan perdebatan yang tak berujung pangkal. Tugas pokok untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara menjadi macet dan tidak berhasil. Dalam suasana kemacetan ini, kemudian Presiden Soekarno yang mencanangkan Demokrasi Terpimpin menganjurkan agar Konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara RI yang tetap.

Menanggapi usul Presiden Soekarno itu, maka Konstituante mengadakan sidang untuk mendengarkan pendapat dari masing-masing fraksi. Ternyata anjuran Presiden tidak membawa hasil. Keadaan yang demikian dipandang oleh presiden sebagai keadaan krisis, di mana keadaan ketatanegaraan membahayakan persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, demi keselamatan bangsa dan negara dikeluarkanlah Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini diucapkan pada hari Minggu pukul 17.00 WIB pada suatu upacara resmi di Istana Merdeka. Adapun isi dari Dekrit Presiden tersebut sebagai berikut:

1. Pembubaran Konstituante
2. Berlaku kembali UUD 1945
3. Akan dibentuk MPRS dan DPAS

*Selanjutnya dalam penetapan presiden no 2 tahun 1959 tanggal 31 desember 1959 dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) , yang anggotanya ditunjuk adan diangkat oleh presiden dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :*

1. *Setuju kembali ke UUD 1945*
2. *Setia dengan perjuangan RI*

### 3. *Setuju dengan manifesto Politik*<sup>79</sup>

Dengan dikeluarkannya dekrit ini, berarti UUD 1945 berlaku lagi sebagai Dasar Negara RI. Tindakan Presiden ini semua dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

#### **Sistem Politik Demokrasi Terpimpin**

Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan

Menyusun Kabinet Kerja. Kabinet Kerja I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menteri pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. program ini dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada akhirnya ditetapkan dalam Tap MPRS No. I/MPRS/1960 yang berintikan USDEK yaitu UUD 1945, sosialis Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

Menyusun Lembaga-lembaga Negara. Pada tanggal 22 Juli 1959 keluar penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk DPR berdasarkan UUD 1945, maka DPR yang telah dibentuk berdasarkan Ulu no. 37 tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Tetapi penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga tersebut berdasarkan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, tanggal 5 Maret 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960 DPR diganti dengan DPR GR yang anggotanya berasal dari tiga partai besar (PNI, NU, PKI). Ketiga partai ini dianggap telah mewakili semua golongan seperti nasional, agama dan Komunis yang sesuai dengan konsep Nasakom. DPAS dipimpin oleh Presiden dan Roeslan Abdul Gani sebagai wakil

---

<sup>79</sup> Notosusanto Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia VI hal 420

ketuanya. Pelantikan wakil ketua DPAS dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di istana negara bersama dengan Hamengkubuwono pelantikan Mr. Moh. Yamin sebagai ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan aparatur Negara. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketahui oleh Chaerul Shaleh, dan pada tanggal 10 November - 7 Desember 1960 mengadakan Sidang Umum pertama di Bandung, menghasilkan dua ketetapan, yaitu sebagai berikut : 1) Tap MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang manifesto politik sebagai garis besar haluan negara. 2) Tap MPRS No. 11/MPRS/1960 tentang pembangunan nasional semesta berencana 1961 -1969. Disamping dua ketetapan di atas MPRS juga mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

### **Sistem Ekonomi Terpimpin**

Dalam bidang ekonomi dipraktekkan system ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etelisme menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpilih adalah sebagai berikut :

- Penanganan/penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional lebih bersifat politis dan tanpa terkendali
- Defisit yang makin meningkat yang ditutup dengan mencetak mata uang sehingga menyebabkan inflasi
- Tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha/hasil orang lain

Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961 - 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan

telah diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961, dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

- Rencana pembangunan kurang matang
- Biaya pembangunan balk yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai
- Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
- Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas

### **Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin**

Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain sebagai berikut :

- Ikut ambil bagian dalam upaya perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang bernama United Nations Operation of Congo (UNOC).
- Pada tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang -ienguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden Soekarno ini berjudul To Build The World a New ( membangun dunia baru )
- Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok
- Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian Games IV) di Jakarta 24 4 September 1962.

Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin merenggang setelah Barat bersifat pasif dalam masalah pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis komunis

erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif diganti dengan politik luar negeri poros Jakarta - Pnom Pghen-Peking. Presiden Soekarno mempertentangkan Nefo - Oldefo Indonesia dengan negara-negara Komunis termasuk dalam Blok Nefo (New Emerging Forces) terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dan Amerika Serikat. Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut :

#### **Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia**

Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia

Pelaksanaan Dwikora diawali dengan pembentukan Siaga di bawah pimpinan Marsek Omar Dahi, yang bertugas mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan Indonesia terhadap masalah-masalah negeri Malaysia. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pukulan berat bagi Indonesia sehingga PBB dianggap telah dikuasai oleh kekuatan Blok Aldefo pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan ke luar dari keanggotaan PBB. Dan aksi upaya damai untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia - Malaysia dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiga negara, meliputi Indonesia, Filipina dan Malaysia di Tokyo, tetapi tidak memperoleh kesepakatan. Konfrontasi Indonesia - Malaysia berakhir setelah terjadi perubahan politik di Indonesia yaitu pada masa Orde Baru

#### **Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September**

Situasi politik di Indonesia yg begitu menegangkan membuat banyak isu simpang siur yg terjadi. Salah satunya isu dewan djendral yang mengatakan bahwa Para

Militer akan melakukan Coup d'Etat ( kudeta) terhadap pemerintahan Soekarno sekaligus berencana membasmi PKI sekaligus Pahlawan KEMUNIS di Indonesia.

CC PKI yang bergerak saat itu adalah Syam dengan memerintahkan Letkol Untung, komandan pasukan Cakrabirawa untuk menculik para jenderal yang telah diincar pada dini hari 30 september 1965 dan para korban itu adalah :

- Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
- Mayjen TNI Raden Suprpto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
- Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
- Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
- Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
- Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

- Bripkas Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
- Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)



- Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

*Gerakan 30 September adalah sebuah misteri pembunuhan yang pemecahannya akan membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional Indonesia. Hal-hal yang dipertaruhkan dalam “kontroversi tentang dalang” sungguh besar. Rezim Suharto membenarkan tindakan represi berdarahnya terhadap PKI dengan menekankan bahwa partai itulah yang memulai dan mengorganisasi G-30-S. Walaupun aksi-aksi pada 1 Oktober tersebut tak lebih dari pemberontakan berskala kecil dan terbatas oleh pasukan Angkatan Darat dan demonstrasi oleh kalangan sipil, rezim Suharto menggambarkannya sebagai awal dari serangan PKI yang masif dan keji terhadap semua kekuatan nonkomunis. Gerakan 30 September dilihatnya sebagai tembakan salvo pembuka dari PKI untuk sebuah revolusi sosial.*

*Dalam membangun ideologi pembenaran bagi kediktatorannya, Suharto menampilkan diri sebagai juru selamat bangsa dengan menumpas G-30-S. Rezim Suharto terus-menerus menanamkan peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda negara: buku teks, monumen, nama jalan, film, museum, upacara per-ingatan, dan hari raya nasional. Rezim Suharto memberi dasar pembenaran keberadaannya dengan menempatkan G-30-S tepat pada jantung narasi historisnya dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tak terperikan. Pernyataan bahwa PKI mengorganisasi G-30-S, bagi rezim Suharto, bukan sekadar fakta biasa; tetapi sangfakta sejarah mahabesar, yang menjadi sumber pokok keabsahan rezimnya<sup>80</sup>.*

Didalam proses pembasmian PKI banyak pelanggaran pelanggaran yg dilakukan seperti menghakimi para anggota PKI beserta sayap organisasi nya, sedangkan tidak semua orang bertanggung jawab atas tewasnya 6 jendral dalam Peristiwa G30S. dan diperkirakan banyak nyawa melayang sia sia dikarenakan kesalahan paham para masyarakat Indonesia.

*Perkiraan korban yang jatuh sekitar 100ribu sampai sejuta, tapi ada iorang bilang sekitar 500 ribuan, tidak ada yang oernah tauKarean bagaimana pembunuhan itu terjadi diluar sorot politik apalagi lampu sorot pers.<sup>81</sup>*

<sup>80</sup> Roosa, Jhon. DALIH PEMBUNUHAN MASSAL:GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO , hal 8

<sup>81</sup> Majalah Tempo. Kitab Merah, Kumpulan kisah kisah Tokoh G30S/PKI hal 308

### **Terbitnya Supersemar**

situasi politik di Indonesia yg tidak stabil ditambah keamanan yg begitumencekam membuat perekonomian Indonesia kacau balau , keadaan ini membuat para Mahasiswa melakukan Demonstrasi besar besaran menuntut pemerintah segera menstabilkan Negara dari gejolak gejolak politik yg merugikan bangsa.

**Surat Perintah Sebelas Maret** atau **Surat Perintah 11 Maret** yang disingkat menjadi **Supersemar** adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.

Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

## **ORDE BARU**

### **Pembentukan Kabinet Ampera**

Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu:

1. memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;

2. melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
3. melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
4. melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu.

Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis.

Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.

*Sidang MPRS tanggal 18 Juni 1966 pun melahirkan ikrar bersama untuk memulihkan kemuliaan, kejayaan, dan amal daya pancasila sebagai satu satunya landasan Idiil, arah dan tujuan daripada kehidupan Negara dan bangsa dan kesempatan ini pula wakil rakyat kita berjanju untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dan tugas pelaksanaan ini dipikulkan kepada saya.*<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Dwipayana G, Soeharto Pikirin, Ucapan dan Tindakan Saya hal 199

Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

### **Daftar pustaka**

- Dwipayana G, “ Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”, PT. Sinar Lamtoro Gung Persada, 1989
- Majalah Tempo,” Kitab Merah, Kumpulan Kisah Kisah Tokoh G30s/PKI, 2004
- Notosusanto, Nugroho, ‘ Sejarah Nasional Indonesia, PT. Balai Pustaka. 2009
- Roosa Jhon,” Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Hasta Mitra 2008
- Sargent Lyman ,” Ideologi Politik Kontemporer, Bina Aksara 1986

## BAB XIV

# KONSEP NEGARA INTEGRALISTIK

**I Putu Budi Sandika**

**14140020**

### **Negara Integralistik Pemikiran Mr. Soepomo**

Pemikiran Soepomo tentang konsep negara integralistik atau paham negara kekeluargaan menurut banyak pihak sangat berpengaruh dalam perumusan UUD 1945. Tanggal 31 Mei 1945, di Gedung Chuo Sangi In di jalan Pejambon 6 Jakarta, Soepomo berpidato di hadapan sidang umum BPUPKI. Dalam pidatonya tersebut telah menjadi salah satu bahan pembicaraan untuk mempersiapkan Undang-undang Dasar 1945. Kita menemukan terminologi yang digunakan dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu negara persatuan. Hakekat Cita Negara Integralistik sebagai negara persatuan dengan paham kekeluargaan telah terwujud dalam Pembukaan maupun Batang tubuh UUD 1945.

Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Bagi Soepomo, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran. Lagi menurutnya, pemikiran ini juga didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia. Bagi Soepomo, hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri.

Struktur sosial Indonesia meliputi aliran pikiran dan semangat kebatinan. Struktur kerohaniannya bersifat persatuan hidup antara persatuan kawulo dan gusti. Persatuan dunia luar dan dunia batin. Persatuan mikrokosmos dan

makrokosmos. Persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya. Inilah yang disebut Soepomo sebagai ide atau konsep negara integralistik. Dalam susunan persatuan antara rakyat dan pemimpinnya itu, segala golongan diliputi semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Inilah struktur sosial asli bangsa Indonesia. Hakekat republik Indonesia adalah Republik Desa yang besar dengan unsur dan wawasan yang modern.

### **Polemik Seputar Konsep Negara Integralistik**

Konsep negara integralistik Soepomo dalam sidang BPUPKI tidak serta-merta disambut positif oleh semua peserta. Dan bukan hanya para hadirin yang hadir pada waktu itu, tetapi juga oleh para ahli dan akademisi yang hidup sesudahnya. Di bawah ini penulis akan menguraikan sedikit seputar polemik dan perbedaan pendapat yang terjadi.<sup>83</sup>

### **Pemikiran David Bouchier**

Menurutnya, konsep negara integralis sangat tepat menggambarkan nilai-nilai asli negara Indonesia yang berdasar asas kekeluargaan. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat haruslah dapat melindungi dan menyatu dengan rakyatnya. Bouchier yang mencoba menganalisis teori integralistik Soepomo dengan memaparkan pandangan berbagai ahli terhadap teori organisasi tampaknya ingin menunjukkan bahwa memang konsep integralistik Soepomo bukanlah asli Indonesia, karena ia sangat terpengaruh oleh berbagai tokoh yang menjelaskan teori tentang integralistik..

Sebenarnya tawaran memilih negara integralistik oleh Soepomo adalah pilihan semu, karena dipengaruhi oleh keadaan perang saat itu hanya teori integralistiklah yang mungkin diambil. Cita-cita Negara Indonesia haruslah disesuaikan dengan lingkungan Asia Timur Raya, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Somubuco, dan Soepomo termasuk orang yang tidak dapat menolak nasihat itu yang sebenarnya bersifat lebih dari memaksa. Dua aliran

---

<sup>83</sup> Prof.Dr.Midian Sirait, Paham Kebangsaan Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, Hlm.86

pikiran negara lainnya—teori individualistis dan teori kelas—tidak dapat dijadikan pilihan sama sekali karena kedua teori negara tersebut adalah dasar negara musuh Jepang, yaitu Amerika, Inggris, dan Rusia. Namun, walaupun pilihan itu bukanlah pilihan sejati, Soepomo tetap melanjutkan dengan mengemukakan contoh negara-negara lain yang gagal menerapkan teori negara yang telah dianutnya.

Menurutnya, dasar susunan hukum negara Eropa Barat adalah individualis dan liberalisme dapat memisahkan manusia sebagai seseorang dari masyarakatnya, kemudian mengasingkan diri dari segala bentuk pergaulan lainnya. Eropa akhirnya mengalami krisis rohani yang maha hebat akibat dari semangat perseorangan tersebut. Sementara Rusia memiliki susunan negara yang diktator dari proletariat. Hal itu adalah keistimewaan keadaan sosial dari Rusia, namun dasar pengertian negara itu tidak cocok dengan sifat asli masyarakat Indonesia.<sup>84</sup>

### **Pemikiran J. H . Logemann**

Logemann adalah pakar hukum pertama yang mengkritik pandangan Integralistik Soepomo. Logemann menyatakan bahwa konsep negara Integralistik itu pada hakekatnya tidak lain dari pada konsep Negara organik. Logemann meragukan kemungkinan keberhasilan dari struktur desa yang agraris itu jika dipindahkan kedalam struktur Negara modern. Pidato soepomo tidak memperhatikan faktor perubahan sosial akibat perkembangan struktur ekonomi dari agraris ke Industri dari Negara – negara modern. Ia menganggap bahwa struktur desas Indonesia akan tetap langgeng karena struktur itu merupakan struktur asli masyarakat Indonesia. Menurut logemann ini merupakan suatu pandangan yang utopis.

Kritik logemann yang paling penting adalah ketika ia melihat bahwa dalam pidato soepomo tidak disinggung tentang kedaulatan rakyat. Logemann menyatakan bahwa rupanya dalam konstruksi ini kehendak rakyat tidak

---

<sup>84</sup> David Bouchier, *Negara Integralistik*, <http://nusamagz.blogspot.co.id> ,diakses pada tanggal 7 Desember 2015 Jam 17.46 WIB

memerlukan jaminan yang khusus maupun organ khusus. Dengan demikian, menurut Logemann sudah jelas bahwa pemimpin negara yang bertugas memelihara keselarasan (*de harmonie*) memperoleh kedudukan yang paling kuat. Dengan begitu maka sikap otoritarianisme dan totalitarianisme akan berkembang.<sup>85</sup>

### **Konsep Negara Integralistik Pemikiran HEGEL**

Negara dalam pemikiran Hegel merupakan penjelmaan ‘Roh Absolut’ (*Great Spirit* atau *Absolut Idea*). Karena itu negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak – hak transedental individu. Hegel melihat negara sebagai organ politik yang suci. Hegel mensakralisasi negara. Pandangan ini mempunyai konsekuensi terhadap gagasannya tentang kekuasaan negara, yaitu bahwa pemegang kekuasaan (*state authority*) adalah akal impersonal dan perwujudan kemauan kolektif (*general will*) yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, kekuasaan kepala negara adalah mutlak. Hegel berpendapat bahwa negara bukanlah alat kekuasaan melainkan tujuan itu sendiri. Maka, bukan negara yang harus mengabdikan kepada rakyat melainkan rakyat lah yang harus mengabdikan dan diabdikan demi negara. Hal itu dilakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Negara masih menegasi kebebasan dan kemerdekaan individu dengan asumsi bahwa individu tidak memiliki makna dalam totalitas negara. Ia harus lebur dalam kesatuan negara (Suhelmi, 2001).

Hegel juga berasumsi bahwa negara harus universal, dimana negara harus menyediakan kerangka tempat bentuk terjadinya semua bentuk utama pengalaman manusia. Negara juga universal dalam arti tidak memihak golongan khusus dalam masyarakat madani; negara dapat mengatur masyarakat madani lewat fungsi – fungsi pengamanan dan penertibannya. Negara modern juga akan sanggup memperdamaikan individu dan komunitas, warga negara. Negara-bangsa modern juga akan mampu menampung berbagai macam subjektivitas sambil tetap mempertahankan rasa kesatuan sosial dan politis tempat kebebasan sesuai pemahaman yang dimiliki bisa terjamin. Kapasitas untuk memperdamaikan dan

---

<sup>85</sup> J. H . Logemann, *Konsep Negara Integralistik*, <http://nusamagz.blogspot.co.id> , diakses pada tanggal 7 Desember 2015 Jam 17.58 WIB



membraurkan aspek – aspek berbeda dalam kehidupan sosial inilah yang memberi kekuatan pada negara modern (Gaus & Kukhatas, 2004).

Dari beberapa uraian diatas maka itulah yang disebut dengan negara integralistik. Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang tersusun secara integral. Masyarakat merupakan kesatuan organis yang tidak terpisah dan bergerak bersama kedalam satu tujuan tunggal yang hakiki. Dalam proses penemuan tujuan hakiki ini, pemimpin berperan sebagai kepala yang akan menuntun pergerakan dari unsur-unsur organis lainnya, sehingga tercipta keselarasan antara pimpinan dan rakyat. Ancaman terhadap ketidakseimbangan susunan organis harus dituntaskan oleh alat yang diciptakan oleh negara agar tidak menghambat perjalanan “suci” masyarakat dalam mewujudkan kepentingan bersama. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan.<sup>86</sup>

### **Pemikiran Benedictus de Spinoza**

Benedictus de Spinoza adalah seorang sarjana Belanda, ia hidup pada tahun 1632-1677. Menurut Spinoza, manusia itu, baik waktu masih dalam keadaan alamiah, maupun sesudah bernegara, perbuatannya tidak semata-mata berpedoman atau di dasarkan pada rasio saja, akan tetapi sebagian besar dari perbuatan manusia itu dipengaruhi corak pada perbuatan manusia.

Dalam Teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza mengatakan bahwa negara dibentuk tidak untuk kepentingan perseorangan atau golongan, namun menjamin kepentingan seluruh masyarakat sebagai persatuan. Negara terdiri dari susunan masyarakat yang integral, meliputi segala golongan, segala bagian, dan segala anggota yang saling berhubungan satu sama lain dan bersatu dalam masyarakat yang organis.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hegel, *Konsep Negara Integralistik*, <http://ikadevihadianti-fisip12.web.unair.ac.id> ,diakses pada tanggal 7 Desember 2015 Jam 18.57 WIB

<sup>87</sup> Soehino.S.H, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hlm.104

## BAB XV

# TEORI KONTRAK SOSIAL<sup>88</sup>

**Silvina**  
**14140040**

Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Jaman Pencerahan (Enlightenment) yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara. Dalam perspektif kesejarahan, Jaman Pencerahan ini adalah koreksi atau reaksi atas jaman sebelumnya, yaitu Jaman Pertengahan. Walau pun begitu, pemikiran-pemikiran yang muncul di Jaman Pencerahan tidaklah semuanya baru. Seperti telah disinggung di atas, teori kontrak sosial yang berkembang pada Jaman Pencerahan ternyata secara samar-samar telah diisyaratkan oleh pemikir-pemikir jaman-jaman sebelumnya seperti Kongfucu dan Aquinas. Yang jelas adalah bahwa pada Jaman Pencerahan ini unsur-unsur pemikiran liberal kemanusiaan dijadikan dasar utama alur pemikiran.

Idea atau gagasan tentang kontrak sosial (*social contract*) telah dikemukakan oleh Plato, seorang filsuf Yunani (Greek) lebih 2500 tahun yang lalu dalam tulisannya *Republic*. Ramai selanjutnya para pemikir besar bidang politik dan hukum yang terkemudian, menerangkan dan mengembangkan lebih lanjut konsep kontrak sosial ini, diantaranya adalah Hugo Grotius, Imanuel Kant, John Locke, Jean Jaques Rousseau dan Thomas Hobbes.

Ahli-ahli filsafat itu umumnya cenderung bersetuju tentang perlunya kontrak sosial atau ikatan perjanjian antara eksekutif pemegang otoritas (pemimpin, wakil) dengan rakyat (konstituen, para pemilih). Ide dasar kontrak sosial itu dibangun berdasarkan tesis atau premis utama bahwa kekuasaan utama

---

<sup>88</sup> Politikp.blogspot.com>2011/10>teorikontraksosial 8 oktober 2011

berdirinya suatu negara terletak pada rakyat banyak (*popular sovereignty*) dan mandat rakyat tersebut dapat ditinjau ulang, dibatalkan atau akan ada tindakan tertentu bila salah satu pihak melakukan ‘pelanggaran kesepakatan’.

### **Hobbes (1588-1679)**

Hobbes menyatakan bahwa secara kodrati manusia itu sama satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu (*appetite*) dan keengganan (*aversions*), yang menggerakkan tindakan mereka. *Appetites* manusia adalah hasrat atau nafsu akan kekuasaan, akan kekayaan, akan pengetahuan, dan akan kehormatan. Sedangkan *aversions* manusia adalah keengganan untuk hidup sengsara dan mati. Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat atau nafsu yang tidak terbatas itu, manusia mempunyai power. Oleh karena setiap manusia berusaha untuk memenuhi hasrat dan keengganannya, dengan menggunakan power-nya masing-masing, maka yang terjadi adalah benturan power antarsesama manusia, yang meningkatkan keengganan untuk mati. Mengenai semua hal di atas, Hobbes menulis sebagai berikut:

“So that in the first place, I put for a generall inclination of all mankind, a perpetuall and restlesse desire of Power after power, that ceaseth in Death. And the cause of this, is not intensive delight, than he has already attained to; or that he cannot with a moderate power: but because he cannot assure the power and means to live well, which he hath present, without the acquisition of more.” [Thomas Hobbes, *Leviathan*, Harmandsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1651, cetak ulang tahun 1983, h. 161.]

Dengan demikian Hobbes menyatakan bahwa dalam kondisi alamiah, terdapat perjuangan untuk power dari manusia atas manusia yang lain. Dalam kondisi alamiah seperti itu manusia menjadi tidak aman dan ancaman kematian menjadi semakin mencekam.

Karena kondisi alamiah tidak aman, maka dengan akalnya manusia berusaha menghindari kondisi perang-satu-dengan-lainnya itu dengan menciptakan kondisi artifisial (buatan). Dengan penciptaan ini manusia tidak lagi dalam kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil. Caranya adalah

masing-masing anggota masyarakat mengadakan kesepakatan di antara mereka untuk melepaskan hak-hak mereka dan menstransfer hak-hak itu kepada beberapa orang atau lembaga yang akan menjaga kesepakatan itu agar terlaksana dengan sempurna. Untuk itu orang atau lembaga itu harus diberi hak sepenuhnya untuk menggunakan semua kekuatan dari masyarakat.

Beberapa orang atau lembaga itulah yang memegang kedaulatan penuh. Tugasnya adalah menciptakan dan menjaga keselamatan rakyat (*the safety of the people*) [Hobbes: hal. 376]. Masyarakat sebagai pihak yang menyerahkan hak-hak mereka, tidak mempunyai hak lagi untuk menarik kembali atau menuntut atau mempertanyakan kedaulatan penguasa, karena pada prinsipnya penyerahan total kewenangan itu adalah pilihan paling masuk akal dari upaya mereka untuk lepas dari kondisi perang-satu-dengan-lainnya yang mengancam hidup mereka. Di lain pihak, pemegang kedaulatan mempunyai seluruh hak untuk memerintah dan menjaga keselamatan yang diperintah itu. Pemegang kedaulatan tidak bisa digugat, karena pemegang kedaulatan itu tidak terikat kontrak dengan masyarakat. Jelasnya, yang mengadakan kontrak adalah masyarakat sendiri, sehingga istilahnya adalah kontrak sosial, bukan kontrak antara pemerintah dengan yang diperintah.

### **Locke (1632-1704)**

Locke memulai dengan menyatakan kodrat manusia adalah sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi berbeda dari Hobbes, Locke menyatakan bahwa ciri-ciri manusia tidaklah ingin memenuhi hasrat dengan power tanpa mengindahkan manusia lainnya. Menurut Locke, manusia di dalam dirinya mempunyai akal yang mengajar prinsip bahwa karena menjadi sama dan independen manusia tidak perlu melanggar dan merusak kehidupan manusia lainnya. Oleh karena itu, kondisi alamiah menurut Locke sangat berbeda dari kondisi alamiah menurut Hobbes. Menurut Locke, dalam kondisi alamiah sudah terdapat pola-pola pengaturan dan hukum alamiah yang teratur karena manusia mempunyai akal yang dapat menentukan apa yang benar apa yang salah dalam pergaulan antara sesama.

Masalah ketidaktentraman dan ketidakamanan kemudian muncul, menurut Locke, karena beberapa hal. Pertama, apabila semua orang dipandu oleh akal

murninya, maka tidak akan terjadi masalah. Akan tetapi, yang terjadi, beberapa orang dipandu oleh akal yang telah dibiarkan (terbias) oleh dorongan-dorongan kepentingan pribadi, sehingga pola-pola pengaturan dan hukum alamiah menjadi kacau. Kedua, pihak yang dirugikan tidak selalu dapat memberi sanksi kepada pelanggar aturan dan hukum yang ada, karena pihak yang dirugikan itu tidak mempunyai kekuatan cukup untuk memaksakan sanksi.

Oleh karena kondisi alamiah, karena ulah beberapa orang yang biasanya punya power, tidaklah menjamin keamanan penuh, maka seperti halnya Hobbes, Locke juga menjelaskan tentang upaya untuk lepas dari kondisi yang tidak aman penuh menuju kondisi aman secara penuh. Manusia menciptakan kondisi artifisial (buatan) dengan cara mengadakan kontrak sosial. Masing-masing anggota masyarakat tidak menyerahkan sepenuhnya semua hak-haknya, akan tetapi hanya sebagian saja. Antara pihak (calon) pemegang pemerintahan dan masyarakat tidak hanya hubungan kontraktual, akan tetapi juga hubungan saling kepercayaan (fiduciary trust). [John Locke, "An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government," dalam *Social Contract*, London: Oxford University Press, 1960, h. 84.]

Locke menegaskan bahwa ada tiga pihak dalam hubungan saling percaya itu, yaitu yang menciptakan kepercayaan itu (the trustor), yang diberi kepercayaan (the trustee), dan yang menarik manfaat dari pemberian kepercayaan itu (the beneficiary). Antara trustor dan trustee terjadi kontrak yang menyebutkan bahwa trustee harus patuh pada beneficiary, sedangkan antara trustee dan beneficiary tidak terjadi kontrak samasekali. Trustee hanya menerima obligasi dari beneficiary secara sepihak.

Dari pemahaman tentang hubungan saling percaya dan kontraktual itu tampak bahwa pemegang pemerintahan atau yang diberi kepercayaan mempunyai hak-hak dan kewenangan yang sangat terbatas, karena menurut Locke masyarakatlah yang dapat bertindak sebagai trustor sekaligus beneficiary.

Dari uraian Locke, tampak nyata bahwa sumber kewenangan dan pemegang kewenangan dalam teori Locke tetaplah masyarakat. Oleh karena itu kewajiban dan kepatuhan politik masyarakat kepada pemerintah hanya berlangsung selama pemerintah masih dipercaya. Apabila hubungan kepercayaan (fiduciary trust)

putus, pemerintah tidak mempunyai dasar untuk memaksakan kewenangannya, karena hubungan kepercayaan maupun kontraktual sifatnya adalah sepihak. Kesimpulan demikian ini tentu amat bertolak belakang dari kesimpulan yang dihasilkan oleh Hobbes.

### **Jean Jacques Rousseau (1712-1778)**

Perspektif filsafat Jean Jacques Rousseau (1712-1778) berpandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah tidak baik dan tidak juga buruk, bukan egois dan bukan altruis. Manusia hidup dengan polos dan mencintai diri secara spontan. Kepolosan manusia itu terkoyak akibat pergumulannya di tengah masyarakat yang egoistis. Karena rebutan sebidang tanah, misalnya, manusia dengan mudah menumpahkan darah, saling berperang, dan membunuh satu sama lain. Agar kepemilikan manusia terjamin kepastiannya, dibatasi untuk tidak menjadi tak terbatas, bisa menghargai hak-hak satu sama lain, dan bisa hidup berdampingan secara damai, maka Rousseau menggagas perlunya kontrak sosial yang menjadi aturan main bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sayangnya, kontrak itu tidak begitu jelas, apakah hanya semacam niat baik atau kontrak yang harus tertulis. ‘hitam di atas putih’, berisi hak dan kewajiban serta konsekuensinya secara rinci atau tidak?

JJ Rousseau ketika berbicara tentang kontrak sosial (*social contract*), tampak mengkaitkan kondisi perlunya keikutsertaan rakyat untuk ikut menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri dengan para calon pemimpin dan wakilnya yang akan duduk diberbagai posisi politik. Adanya Kontrak sosial, secara kontekstual, telah melahirkan sentimen moral publik, untuk boleh menentang setiap bentuk monopoli kebenaran dan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat atas nama kekuasaan. ***“...Raja Adil Raja Disembah; Raja Zalim, Raja Disanggah...”***. Kesadaran tentang otoritas warga negara tersebut, dengan sendirinya melahirkan keniscayaan dan telah memicu spirit kekritisan rakyat pemilih, terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan politik. Dalam prakteknya, telah melahirkan revolusi sosial/revolusi politik di Perancis (1789), dengan ciri ditegakkannya keadaan umum atas dasar hubungan ‘kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan’.

Filsafat politik Roousseau, menurut Sabine, cenderung mengagungkan soal perasaan moral dibandingkan cuma soal akal atau rasio. Roousseau beranggapan bahwa kebajikan-kebajikan moral, ada terdapat pada rakyat biasa, dalam bentuk yang murni yang ber-praxis diantara mereka, antara harapan dan kenyataan. Rakyat biasalah yang merupakan umat manusia, sumber kekuasaan dan legitimasi para wakil dan pemimpin. Apa yang tidak bersifat kerakyatan, kepentingan elit tertentu, sebaiknya tidak perlu diperhitungkan dan bila perlu layak dipertanyakan kepatutannya. Semua manusia adalah sama dalam semua barisan dan lapisan. Barisan atau lapisan terbesar lah yang cukup patut untuk mendapat kehormatan tertinggi untuk diperhatikan, mendahului yang tersedikit.

Gagasan ini memang sudah mendapat kritik dan koreksi dari banyak pihak. Soal dampak buruk tyrani mayoritas, misalnya, dikoreksi dengan penegakan hukum dan demokrasi prosedural. Memang, faktanya belum tentu pihak yang terbanyak, itu yang terbaik dan terbenar jalannya. Walaupun begitu ada yang setuju bahwa suara rakyat terbanyak adalah suara Tuhan, yang telah mengalami proses uji coba dan perbaikan diantara orang banyak itu sendiri.

Filsafat sosial yang dikembangkan Roousseau antara lain adalah individualisme sistematis, yang diadopsi dari pemikiran John Locke yaitu adanya nilai bahwa setiap kelompok sosial terdiri atas upaya pencapaian kebahagiaan atau kepuasan diri dan adanya perlindungan otoritas untuk mempunyai dan menikmati hak milik setiap warga negara. Pada hakekatnya manusia tergerak untuk bekerja sama disebabkan kepentingan dan keuntungan pribadi masing-masing, yang perlu dihimpun sebagai kehendak umum bersama.

## **BAB XVI**

### **FASISME<sup>89</sup>**

**Wartono**

**14140044**

#### **Latar Belakang Sejarah Lahirnya Fasisme**

Pemerintah fasisme melarang dan menekan oposisi terhadap negara fasisme. Fasisme didirikan oleh sindikasi nasional italia dalam perang dunia 1 yang menggabungkan sayap kiri dan sayap kanan pandangan politik. Tetapi lebih condong kekanan di awal 1020-an. Fasis meninggikan kekerasan, perang, dan militerisme sebagai tindakan yang menciptakan regenerasi semangat, nasionalis dan vitalis.

Faham fasisme di Jerman disebut nazisme. Nazi adalah suatu partai dibawah pimpinan Adolf Hitler. Sesuai dengan perang dunia I, Jerman berubah menjadi Republik yang semula kerajaan. Pemimpin pertama adalah Ebert, berkuasa anantara tahun 1919-1925, selanjutnya pemimpinnnya adalah presiden Hindenburg (1925-1934). Dalam pemerintah republic jerman mengalami berbagai kesulitan. Baik dalam keuangan maupun kekacauan ekonomi. Dalam keadaan negara yang kacau tersebut rakyat jerman mengharapkan orang yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Dalam suasana yang kacau ini muncul Adolf Hitler dengan parati Extrim yaitu NAZI.

Adolf hitler selalu menekan pada pemuda bahwa jerman adalah bangsa yang besar sehingga harus memerintah dunia, sebab jerman juga berasal dari bangsa arya, yang menjadi pangkal kekuatan bangsa arya. Namun kekuatan itu sedang terbelenggu oleh kekuatan aing yaitu bangsa yahudi dan komunis. Orang yahudi sebagai penyebab semua itu harus dimusnahkan. Selanjutnya, kata adolf hitler untuk melepaskan diri dari semua, maka jerman harus membentuk angkatan

---

<sup>89</sup> Ika Devita Sari – 120210302057-’Dosen pembimbing Dr. Suranto, M.Pd, JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH, FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, IVERSITAS JEMBER, 2014



perang yang dituliskan oleh seorang pemimpin besar. Mereka harus bisa memusnahkan bangsa yahudi secara keseluruhan.

Fasisme merupakan perngorganisasian pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan secara dictator dengan partai tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militeris, dan imperialis. Di Eropa khususnya negara Italia merupakan negara yang menjadi fasis tahun 1922. Kemudian Jerman menyusul tahun 1933, dan Spanyol tahun 1936, jika di Asia Jepang mengubah dirinya menjadi fasis tahun 1930-an berubah secara berangsur-angsur ke arah lembaga yang totaliter menyimpang dari warisan budaya aslinya. Jika di negara barat, lembaga konstitusi dipegang oleh para tuan tanah mulai dihancurkan. Di Argentina tahun 1943, setelah menjadi memberontakan para tentara yang tidak puas dan sebuah kediktatoran telah meraja lela, sehingga fasis pun terbentuk dibawah pimpinan colonel (kemudian menjadi jenderal) Peron yang berlangsung hingga 1955.

Fasisme muncul dan berkembang di negara-negara yang relatif makmur dan secara teknologi lebih maju (Jerman di Eropa dan Jepang di Asia). Fasisme juga berkembang di Argentina dan merupakan negara terkaya kedua puluh republik di Amerika Latin. Fasisme merupakan produk dari masyarakat masyarakat pasca demokrasi dan pasca industri. Kaum fasis tidak mungkin merebut negara-negara yang tidak memiliki pengalaman demokrasi sama sekali. Dalam masyarakat seperti itu, kemungkinan diktatoran ditunjang oleh militer, birokrasi, prestise pribadi seorang dictator namun dictator kurang adanya unsur antusias dan dukungan dari masyarakat, padahal dukungan masyarakat merupakan salah satu ciri fasis. Jika sistem fasis tidak akan berkembang di negara –negara yang tidak memiliki tradisi demokrasi. Maka kemungkinan fasisme bisa mencapai keberhasilan di negara-negara yang sejak dulu memiliki sistem tradisi.

Sebaliknya pengalaman menunjukkan bahwa, pada umumnya semakin keras teoretis gerakan fasisi semakin besar pula dukungan rakyat yang diperolehnya, fasisme di Jerman sangat brutal dan paling populer. Jika di Amerika Latin juga ada kediktatoran, tetapi mereka tidak bersifat fasis (kecuali Argentina 1943-1955) karena pada umumnya mereka bertumpu pada kekuatan pribadi

jenderal. Mereka sering menggunakan senjata jadi kebanyakan prnag Amerika Latin jarang memperoleh dukungan masa yang bercirikan fasisme.

Dari latar belakang sosialnya, fasisme menarik minat dua kelompok sekaligus, diantaranya yaitu: sekelompok kaum kecil industriawan dan tuan tanah yang bersedia membiayai gerakan fasis dengan harapan agar gerakan fasis dapat menenyapkan serikat-serikat kaum buruh. Di negara yang turut serta dalam hal ini biasanya para kaum industriawan yang memiliki kepercayaan yang hampir sama dengan kelompok lain pada proses demokrasi. Tetapi jika demokrasi goyah seperti yang terjadi di Jerman, Italia, dan Jepang, hanya dibutuhkan segelinitr industriawankaya dan tuan tanah saja untuk membiayai gerakan fasis. Sumber dukungan yang kedua dan menjadi sangat antusia dalam mendorong adanya fasis adalah golongan kelas menengah, terdapat dikalangan pegawai negeri. Banyak orang dari kelompok yang takut akan penggabungannya kemabalidengan kaum ploreтар. Mereka melihat fasisme sebagai penyelamat bagi kedudukannya dan prestasinya. Para pegawai merasa tidak tenang dengan adanya perusahaan – perusahaan besar meskipun merek bergerak untuk mencapai kedudukan tinggi dalam perusahaan itu. Dengan kata lain fasisme memasuki berbagai api kecemburuan dan ketakutan para pegawai negeri melalui aksi propaganda melwan perusahaan besar dan buruh besar.

Kelompok lain yang mudah dimasuki fasisme adalah kelompok militer. Kaum militer profesional cenderung untuk melebihi kebaikan kedisiplinan dan persatuan. Jika demokrasi melemah, penyimpangan profesi dalam tubuh militer, hal ini pasti kaan menjadi bacaan publik. Seperti halnya dalam negara italis muncul awalnya fasisme didukung oleh para kaum militerialisme yang berangkatan senjata. Dijepang fasisme didukung aktif dan penuh semangat dari militer yang memiliki alasan untuk tiang penjagaan utama rezim yang mempunyai kepentingan ekspansi imperialisme.

### **Fasisme sebagai ideologi**

Negara fasisme tidak akan lahir fasis sebelum mereka merasakan dunia demokrasi. Selain itu fasis juga lahir dalam sebuah industri ketika ketegangan

ekonomi dan sosial dapat diatasi dengan dua cara yaitu secara liberal atau totalisme. Fasisme menolak liberal karena konsep didalamnya menganugrahi kebebasan dan penyeragaman. Hal ini seperti yang terjadi di Jerman. Fasisme dengan taktik lainnya menggunakan segala kecemburuan dan ketakutan golongan penerima gaji dan pada waktu yang bersamaan melancarkan propaganda terhadap elit ekonomi dan elit politik.

Fasisme merupakan paham politik yang kekuasaan absolut tanpa demokrasi, paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain, fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. Fasisme adalah gerakan radikal nasional otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif komporai, nilai dan sistem, termasuk sistem ekonomi dan politik. Mereka menginginkan untuk partai tunggal negara otoriter yang berusaha memobilisasi masa depan suatu bangsa dan terciptanya melalui indoktrinasi. Pendidikan fisik dan eugenetika kebijakan keluarga, fasis percaya bahwa bangsa memerlukan kepemimpinan yang kuat. Identitas kolektif tunggal dan tidak akan melakukan kekerasan dan berpererangan untuk menjaga bangsa.

Fasisme adalah anti komunisme, anti demokrasi, anti individualisme, anti liberal, anti parlemen, anti konservatif, anti borjuis, dan anti proletar, dan dalam banyak kasusnya anti kapitalis di era kolonial, fasisme menolak adanya egalitarianism, materialisme, dan rasialisme yang mendukung tindakan, disiplin, hierarki dan semangat. Dalam ilmu ekonomi fasisme menentang liberalisme sebagai gerakan borjuis dan marxisme sebagai gerakan proletar untuk menjadi eksklusif ekonomi berbasis kelas gerakan fasis. Ideologi mereka seperti yang dilakukan oleh gerakan ekonomi trans-kelas yang mempromosikan untuk menyelesaikan konflik kelas ekonomi dan mengamankan solidaritas nasional dengan cara mereka mendukung sistem ekonomi yang terintegrasi.

### **Ciri-ciri Fasisme**

Nasionalisme militan, menyatakan keunggulan ras dan budaya kelompok etnis dominan dan menegaskan hak yang melekat bahwa kelompok mendapat

posisi dominan khusus atas orang lain baik di dalam negeri dan tatanan internasional

Pemujaan pemimpin nasional tunggal karismatik dan menjadi representasi paling sejati dari cita-cita budaya nasional. Penekanan pada kebutuhan mutlak persatuan nasional yang lengkap, yang membutuhkan sebuah organisasi negara yang sangat kuat dan disiplin (terutama sebuah polisi rahasia yang luas dan aparatus sensor), tak terbatas dengan pembatasan konstitusional atau persyaratan hukum dan di bawah dominasi absolut dari pemimpin dan gerakan politik atau partai.

Militan anti-Komunisme ditambah dengan keyakinan dalam ancaman ekstrim dan nyata terhadap keamanan nasional dari pasukan Komunis kuat dan ditentukan baik di dalam maupun luar negeri. Penghinaan untuk sosialisme demokratis, kapitalisme demokratis, liberalisme, dan segala bentuk individualisme, dengan menyatakan bahwa negara di atas segala-galanya.

Pemuliaan kekuatan fisik, loyalitas pribadi fanatik terhadap pemimpin. Sebuah alat yang canggih untuk propaganda sistematis penduduk untuk menerima nilai-nilai dan ide-ide melalui manipulasi terampil dari media massa, yang benar-benar dimonopoli oleh rezim sekali gerakan datang ke kekuasaan

Sebuah kecenderungan menuju mengejar kebijakan luar negeri militeristik dan agresif. Ketat regulasi dan pengendalian ekonomi oleh rezim melalui beberapa bentuk perencanaan ekonomi korporatis dimana bentuk hukum kepemilikan pribadi industri nominal diawetkan tetapi di mana kedua pekerja dan kapitalis wajib menyerahkan rencana mereka dan tujuan untuk negara yang paling rinci peraturan dan upah yang luas dan kontrol harga, yang dirancang untuk memastikan prioritas tujuan kepemimpinan politik atas kepentingan ekonomi pribadi rakyat.

### **Prinsip-prinsip Fasisme**

Para pelopor fasisme meninggalkan jejak tentang fasisme. Ajaran fasisme di Italia yang kemudian menjadi pijakan fasisme di dunia, karena wawasan yang

bersifat moderat. Menurut ebenstein, unsur-unsur fasisme terdiri dari tujuh unsur, diantaranya yaitu:

### **Ketidakpercayaan pada Kemampuan Akal**

Berdasarkan faham fasis, keyakinan bersifat fanatic dan dogmatis. Fasisme menolah adanya tradisi peradaban barat dan secara terang-terangan bersifat antirasial. Dalam urusan kemanusiaan, fasisme tidka mengandalkan akal tetapi mengutamakan irasional. Secara psikologis, fasisme bersifat fanatic, dogmatic, dan tertutup. Selama rezim fasis berkuasa diitalia (1923-1945), gambar mussolini dipasang di setiap ruang kelas dan dibawah gambar ditulisi ‘musollini selalu benar’.

### **Pengingkaran terhadap Derajat Kemanusiaan**

Bagi fasisme manusia tidaklan sama, mereka menganggap ketidaksamaan itu sebagai idealisme. Orang yahudi menolak adanya prinsip persamaan tradisi yahudi-kristen dan juga islam yang berdasarkan aspek kemanusiaan, dan menggantinya dengan idiologi yang mengedepankan kekuatan.

### **Kode perilaku yang didasarkan atas dusta dan kekerasan**

Dalam pandangan fasisme, negara adala satu sehingga tidak dikenal dengan istilah oposan. Jika ada yang bertentangan dengan negara, maka mereka mengenal adanya indoktrinasi pada kam-kamp konsentrasi. Setiap orang dipaksa untuk mengakui doktrin pemerintah.

### **Pemerintah oleh kelompok elit**

Pada prinsip fasisme, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan para elite lit. pemimpin dianggap

selalu benar. Jika ada konflik antara rakyat dan pemerintah maka pemerintahlah yang dianggap benar.

### **Totaliterisme**

Untuk mencapai tujuannya. Fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap kaum pinggiran. Dalam hal ini dilamai oleh orang wanita, dimana mereka hanya ditempatkan pada 3 wilayah K, yaitu *Kinder* (anak-anak), *Kuche* (dapur), dan *Kirche* (gereja). Karena wanita tidak dapat memanggul senjata. Sehingga dengan sendirinya kaum fasis dengan sendirinya menjadi negara fasis kelas dua dan tidak dapat mengambil bagian jabatan-jabatan pemerintah atau partai.

### **Rasialisme dan imperialisme**

Menurut fasis doktrin pada suatu negara elit lebih unggul dari dukungan massanya, karena dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam pergaulan antar negara maka mereka melihat bahwa bangsa elit, yaitu mereka yang lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga merambah jalur keabsahan secara rasialis, bahwa ras mereka lebih unggul dari pada lainnya. Sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. Hal ini akan memunculkan imperialisme.

### **Fasisme memiliki unsur penentang hukum dan ketertiban internasional.**

Consensus internasional adalah menciptakan pola hubungan antar negara yang sejajar dan cinta damai. Sedangkan fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia. Sehingga dengan kata lain bertindak menentang hukum dan ketertiban internasional. Negara fasisme membatasi diri dari peraturan internasional, sebab keputusan mayoritas dan pembuat keputusan yang dilakukan dengan jalan musyawarah dan bukan kekerasan.

## **BAB XVII**

# **SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU NEGARA**

**Ovie Dwitia Maja**  
**14140033**

Ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil pemikiran manusia dan manusia mempunyai kebebasan untuk menyatakan pemikirannya. Ilmu pengetahuan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai lambang utama dari kemajuan.<sup>90</sup>

### **Zaman Yunani Purba**

Pengetahuan dan penyelidikan tentang negara mulai ada sejak zaman Yunani Purba. Bangsa Yunani memang dikenal sebagai bangsa yang pertama kali memiliki peradaban yang sangat tinggi. Sejak Yunani Purba mengenal pemerintahan yang demokratis, setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya.

Saat itu, negara masih bersifat polis-polis atau the Greek State. Keberadaan polis pada awalnya merupakan suatu tempat di puncak bukit dimana orang-orang mendirikan rumah dan tempat tersebut kemudian dikelilingi dengan tembok untuk menjaga penduduknya terhadap serangan musuh dari luar.

Polis merupakan organisasi yang tertinggi. Polis tidak hanya mengatur hubungan antar organisasi yang ada dalam polis, tetapi juga mengatur kehidupan pribadi warganya. Oleh karena polis identik dengan masyarakat negara atau negara maka polis merupakan negara kota (standstaat/citystate).

Pemerintahan di dalam polis merupakan demokrasi langsung (directe democratie/direct democracy/klasseieke democratie) dimana rakyat dalam polis

---

<sup>90</sup> Simbolhukum.Blogspot.co.id/2012/06/ilmu-negara.Html

ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintah (direct government by all the people). Hal ini dapat terjadi karena dua alasan, yaitu :

1. Pengertian kota identik dengan negara dengan wilayah yang sangat terbatas.
2. Jumlah penduduk masih sangat sedikit.

Oleh karena itu, salah satu ciri dari demokrasi adalah turut sertanya rakyat dalam pemerintahan dan turut sertanya rakyat secara langsung berasal dari zaman Yunani Purba. Dengan turut serta secara langsung dalam pemerintahan berarti rakyat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pada saat itu, yang disebut "rakayt" adalah warga kota (citizen) yang merupakan sebagian kecil dari penduduk Athena.

Menurut Mac Iver, dalam bukunya *The Web of Government*, citizen adalah city dwellers yang berada di daerah Athena. Sedangkan pengawasan rakyat dijalankan dengan musyawarah rakyat (Yunani : *ecleseia*, Romawi : *cometia*).

Pada zaman Yunani Purba terdapat beberapa filsuf yang pemikirannya banyak mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan di dunia saat ini, diantaranya adalah :

2. Socarates ( □ 470 – 399 AD)

Kemenangan bangsa Yunani terhadap Persia meninggikan martabat dan menimbulkan perasaan bangga pada diri bangsa Yunani. Disamping itu, bangsa Yunani mulai menikmati kemakmuran yang dihasilkan dari perdagangan. Namun, para pejabat negara Yunani mulai melupakan tugas mereka, bertindak sewenang-wenang, korupsi dan tindakan-tindakan lainnya yang dirasakan oleh warga negaranya sebagai tindakan yang sangat tidak adil.

Pada saat itu banyak bermunculan filsuf dari luar negeri terutama dari Asia kecil yang datang ke Yunani untuk menjual ilmunya. Mereka termasuk ke dalam golongan kaum Sophis, dan aliran mereka disebut Sophisme. Sophis berasal dari kata *sofia/sophia* yang artinya bijaksana/kebijaksanaan. Namun, tindakan kaum Sophis sangat tidak bijaksana karena mereka menyebarkan dan menganjurkan paham mengenai hukum, keadilan serta negara yang bersifat



merusak masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Thrasymachus bahwa keadilan merupakan keuntungan atau apa yang berguna daripada yang lebih kuat.

Dalam keadaan demikian, munculah Socrates dengan metode dialektis/tanya jawab (dialog) yang mencoba mencari pengertian-pengertian tertentu, dasar hukum dan keadilan objektif yang dapat diterapkan kepada setiap orang. Menurut Socrates, dalam hati kecil setiap manusia terdapat hukum dan keadilan sejati sebab setiap manusia adalah bagian dari nur/cahaya Tuhan. Walaupun seringkali tertutup oleh sifat-sifat buruk namun rasa hukum dan keadilan sejati dalam hati kecil manusia tetap ada. Hal ini dapat dipahami sebab dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa Allah meniupkan ruhnyanya kepada manusia, berarti dalam diri manusia ada sebagian kecil ruh Allah. Dalam agama Katolikpun dikatakan bahwa manusia adalah anak Allah dan mempunyai dimensi Ilahi. Oleh karena itu dalam diri setiap manusia pasti ada unsur kebaikan.

Selanjutnya, Socrates berpendapat bahwa negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan pribadi. Negara adalah suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia dan bertugas untuk melaksanakan hukum yang objektif yang memuat keadilan bagi masyarakat umum. Oleh karena itu negara harus berdasarkan keadilan sejati agar manusia mendapatkan ketenangan.

Namun, ajaran Socrates dianggap membahayakan negara dan Socrates dijatuhi hukuman mati dengan diperintahkan untuk meminum racun.

### 3. Plato ( 429 – 347 AD)

Plato merupakan murid Socrates dan mendirikan sekolah mengenai ilmu filsafat yaitu Academia. Berbeda dengan Socrates, Plato meninggalkan beberapa buku, termasuk buku yang berisi tanya jawabnya dengan Socrates. Buku karangan Plato yang terpenting adalah :

- a. Politeia (The Republic) tentang Negara
- b. Politicos ( The Stateman) tentang ahli Negara

Dalam Politikos dibedakan antara penguasa dengan ahli Negara. Ahli Negara yang sejati harus menjalankan pendidikan ke arah kebijaksanaan, keadilan dan berpendirian sesuai dengan Politeia.

- c. Nomoi (The Law) mengenai undang-undang.

Buku karangan Plato lainnya adalah :

- a. Gorgias mengenai kebahagiaan
- b. Sophist mengenai hakikat pengetahuan
- c. Phaedo mengenai keabadian jiwa
- d. Phaedrus mengenai cinta kasih.
- e. Protogoras mengenai hakikat kebajikan.

Plato meneruskan ajaran Socrates. Dalam ajaran tunggalnya, yaitu Politeiadigambarkan adanya suatu negara sempurna (ideale staat). Oleh karena itu ajaran Plato disebut Idealisme. Menurut ajara Plato, dunia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Dunia cita yang bersifat immateriil □ idea atau kenyataan sejati berada di alam cita yang berada di luar 'dunia palsu'.
- b. Dunia alam yang bersifat maeriil □ dunia fana yang bersifat palsu.

Dunia cita bersifat sempurna dan sejati, sedangkan dunia alam bersifat palsu dan tidak sempurna oleh karena itu apa yang ada di dunia alam harus diusahakan mendekati bentuk yang sempurna yang ada dalam dunia cita. Pandangan Plato bersifat normatiefkarena ia menghendaki bangunan di dunia alam sama dengan dunia cita.

Berkaitan dengan dunia cita, maka cita-cita mutlak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Logika atau cita kebenaran (idee der waarheid)
- b. Estetika (asthetica) atau cita keindahan dan kesenian (idee der schoonheid)
- c. Etika (ethica) atau cita kesusilaan

Menurut Plato, asal mula negara adalah karena banyaknya kebutuhan hidup dan keinginan manusia dan manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu kemudian manusia bekerja sama dan mendapat pembagian tugas sesuai kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Negara merupakan satu keluarga besar, satu kesatuan, oleh karena itu negara harus dapat memelihara dirinya sendiri. Agar dapat memelihara dirinya sendiri maka luas suatu negara harus diukur. Suatu negara tidak boleh memiliki luas yang tidak diketahui.

Negara yang ada di dunia bersifat tidak sempurna karena hanya merupakan bayangan dari negara yang sempurna (de ideale staat) yang ada dalam dunia cita. Dunia cita merupakan bagian dari filsafat. Tujuan negara adalah untuk mempelajari, mengetahui dan mencapai cita yang sebenarnya. Tujuan manusia dalam negara adalah mencapai good life (kebahagiaan, sempurna),

Untuk mewujudkan negara yang sempurna ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Socrates mengemukakan dua buah syarat, kemudian Plato menambahkan satu syarat lagi. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Negara harus dijalankan oleh pegawai yang terdidik khusus.
- b. Pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan umum.
- c. Rakyat harus mencapai kesempurnaan kesusilaan.

Selanjutnya, dalam bagian kedelapan dari Politeia, Plato menguraikan tentang bentuk negara, dimana negara dapat dibedakan dalam lima macam, yaitu :

- a. Aristokrasi (Aristocratie/aristocracy)      □      Aristoi      ≈      cerdik pandai/golongan ningrat dan Archien/cratia      ≈      memerintah. Jadi, aristokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah cerdik pandai yang memerintah berdasarkan keadilan. Jika ternyata kemudian golongan tersebut memerintah demi kepentingan golongannya sendiri Aristokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah kecil cerdik pandai yang memerintah berdasarkan keadilan.

- b. Oligarhi (Oligarchie/oligarchy) □ oligos  $\approx$  sedikit, kecil dan archien  $\approx$  memerintah. Apabila golongan kecil itu memerintah dan memperoleh kekayaan yang berlimpah sehingga timbul hak-hak milik pribadi, maka lahirlah timokrasi.
- c. Timokrasi (timocratie/timocracy) □ berasal dari kata plutos (kekayaan) dan criteria (memerintah)
- d. Demokrasi (democratie/democracy) □ berasal dari kata demos (rakyat) dan cratein (memerintah). Jika rakyat salah dalam menggunakan hak dan kemerdekaannya maka hal tersebut akan melahirkan apa yang disebut anarki (anarchie). Anarki berasal dari kata a artinya tidak dan archien artinya memerintah. Jadi, tanpa ada pemerintahan maka keadaan akan kacau balau (chaos). Keadaan ini memerlukan seorang pemimpin yang dapat bertindak dengan keras dan tegas dan hal ini melahirkan tirani.
- e. Tirani (tyranie/tyrany) □ yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran yang bertindak sewenang-wenang sehingga sangat jauh dari cita-cita tentang keadilan.

Menurut Plato, timbulnya masyarakat adalah karena saling membutuhkan, oleh karena itu masyarakat saling bertukar jasa. Masyarakat adalah susunan manusia dimana setiap anggota harus memberi dan menerima. Negara harus memperhatikan pertukaran timbal balik tersebut dan harus berusaha sebaik-baiknya. Dalam sistem ini, manusia bertindak sebagai penyelenggara berbagai macam tugas yang diperlukan dan harga mereka bagi masyarakat tergantung dari nilai pekerjaan yang mereka lakukan. Yang terpenting bagi setiap individu adalah suatu kedudukan yang memungkinkan mereka untuk berbuat sesuatu.

Pertukaran jasa menimbulkan asas pembagian kerja dan pengkhususan tugas yaitu diferensiasi kerja dan spesialisasi. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda, oleh karena itu pekerjaannya disesuaikan dengan bakat yang dimilikinya.

Keadilan sosial menurut Plato adalah suatu prinsip dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang berbeda-beda yang bersatu karena saling membutuhkan dimana setiap orang harus melakukan pekerjaannya dan menerima

apa yang menjadi haknya. Pembagian kerja dan spesialisasi tugas di lapangan merupakan syarat bagi kerjasama dalam masyarakat.

Berdasarkan pokok-pokok teorinya dapat diketahui dasar alasan Plato mengemukakan negara utopia tentang asal usul negara. Berkaitan dengan asal mula negara maka dapat ditarik garis paralel antara sifat negara dengan sifat manusia yang menimbulkan tiga macam sifat yaitu kebenaran, keberanian dan kebutuhan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan tiga kelas dalam negara utopia (ideal-etis), yaitu :

- a. The Rulers (penguasa) □ yaitu golongan pegawai yang terdidik khusus yang merupakan pemimpin negara yang mengusahakan tercapainya kesempurnaan. Para penguasa disebut juga Philosopher King. Oleh karena itu menurut Plato, negara harus dipimpin oleh orang yang bijaksana.
  - b. The Guardians (pengawal negara) □ yaitu mereka yang menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan keselamatan negara.
  - c. The Artisan (para pekerja) □ yaitu mereka yang menjamin tersedianya makanan bagi golongan penguasa dan pengawal negara.
- a. Berkaitan dengan asal-usul negara, menurut Plato, negara tumbuh dibaginya atas berbagai taraf, yaitu :
- a. Plato berpendapat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, untuk hidup manusia memerlukan bantuan dari makhluk lain.
  - b. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri maka manusia berkumpul untuk merundingkan cara untuk memperoleh bahan-bahan primer (sandang, pangan dan papan). Kemudian terjadilah pembagian pekerjaan dimana setiap orang harus menghasilkan sesuatu lebih dari yang diperlukan sendiri untuk kemudian ditukarkan dengan orang lain. Hal ini menimbulkan berdirinya desa.
  - c. Antara desa dengan desa terjadi kerjasama dan seterusnya sehingga kemudian terbentuk negara. Antara negara yang satu dengan negara yang lainnya juga saling membutuhkan sehingga terjadilah hubungan internasional.

Menurut Plato, ada tiga masalah penting yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Harus ada an organic unity in social life.

Dalam masyarakat harus ada satu kesatuan yang organis. Namun, kesatuan ini sering terganggu oleh adanya dua penyakit masyarakat, yaitu penyakitproperty dan family relationship. Penyakit inilah yang seringkali menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

- b. Harus ada systematic education

Stabilitas negara terletak dalam sistem pendidikan. Watak yang baik diperoleh dengan memulai pendidikan di masa kanak-kanak dan meneruskan pendidikan sesuai dengan taraf umur dan jiwanya.

- c. Harus ada rational basic of aristocracy government

Pemerintahan harus dikendalikan oleh manusia-manusia yang berilmu dan berpengetahuan.

#### 4. Aristoteles (384-322 AD)

Aristoteles adalah murid Plato. Ia seorang filsuf yang mempunyai banyak pengaruh pada abad pertengahan. Aristoteles pernah ditugaskan oleh raja Philippos untuk mendidik Iskandar Dzulkarnain (342AD). Pada tahun 335 AD ia kembali ke Yunani dan mendirikan sekolah Lyceum di Yunani.

Aristoteles melanjutkan pemikiran idealisme Plato ke realisme. Oleh karena itu filsafat Aristoteles adalah ajaran tentang kenyataan (ontology) yaitu suatu cara berfikir yang realistis dan metode penyelidikannya bersifat induktif empiris. Aristoteles dijuluki sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan Empiris (Vader der Empirische Wetenschap).

Aristoteles tidak membagi dunia ke dalam dua bagian seperti Plato. Ia hanya mengakui adanya satu dunia. Buku yang dikarang oleh Aristoteles berdasarkan penyelidikannya adalah :

- a. Ethica atau Nicomachean Etics

Ethica merupakan pengantar bagi politica

b. Politica

Politica terdiri dari 8 buku, antara lain membicarakan tentang bentuk Negara, undang-undang, hubungan sosial dan hal lain yang bersifat riil.

c. Rhetorica

Dalam rhetorica, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Hukum mempunyai tugas murni, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Aristoteles sependapat dengan Plato mengenai tujuan Negara. Dimana Negara bertujuan untuk :

- a. Menyelenggarakan kepentingan warga Negara
- b. Berusaha supaya warga Negara hidup baik dan bahagia (good life) didasarkan atas keadilan. Keadilan itu memerintah dan harus ada dalam Negara.

Berkaitan dengan terjadinya Negara, menurut Aristoteles, manusia berbeda dengan hewan sebab hewan dapat hidup sendiri sedangkan manusia sudah dikodratkan untuk hidup dengan manusia lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan manusia lain. Manusia merupakan Zoon Politicon.

Manusia dapat hidup berbahagia di dalam dan karena Negara. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dari Negara karena merupakan bagian dari Negara atau masyarakat. Dengan demikian, negaralah yang utama. Paham ini disebut universalism bukan collectivism.

Oleh karena itu tujuan Negara adalah kesempurnaan warga yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam Negara. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberi kepada manusia setiap apa yang menjadi haknya.

Aristoteles berpendapat bahwa dalam setiap negara yang baik, hukumlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi, bukan orang perorangan. Aristoteles menyukai penguasa yang memerintah berdasarkan konstitusi dan memerintah dengan persetujuan warganegaranya, bukan pemerintah diktatur.

Menurut Aristoteles, pemerintahan yang didasarkan konstitusi mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Pemerintahan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan saja.
- b. Pemerintahan yang dijalankan menurut hukum, bukan sewenang-wenang.
- c. Pemerintahan yang mendapatkan persetujuan dari warga negaranya, bukan suatu despotisme yang hanya dipaksakan.

Selanjutnya, menurut Aristoteles, berkaitan dengan bentuk Negara, terdapat 3 bentuk dasar, yaitu :

- a. Bentuk cita (ideal form) □ bentuk cita dapat terjadi jika pemerintahannya ditujukan kepada kepentingan umum yang berdasarkan atas keadilan, dan keadilan tersebut harus menjelma di dalam Negara.

Terdapat 3 macam bentuk Negara yang termasuk ke dalam bentuk cita yang didasarkan pada ukuran kuantitatif, yaitu mengenai jumlah orang yang memerintah, yaitu :

- 1) Pemerintahan satu orang (one man rule) □ monarchi.
  - 2) Pemerintahan beberapa/sedikit orang (a few man rule) □ aristokrasi.
  - 3) Pemerintah orang banyak dengan tujuan untuk kepentingan umum (the many man or the people rule) □ politeia, polity atau republic.
- b. Bentuk pemerosotan (corruption or degenerate form) □ bentuk pemerosotan dapat terjadi apabila pemerintahannya ditujukan kepada kepentingan pribadi dari pemegang kekuasaan, timbulnya kesewenang-wenangan dan diabaikannya kepentingan umum dan keadilan.

Bentuk Negara yang termasuk dalam bentuk pemerosotan juga ada 3 macam yang didasarkan pada ukuran kualitatif yaitu berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:



- 1) Bila kepentingannya didasarkan pada kepentingan satu orang secara sendiri untuk kepentingan pribadi □ tirani/despotie
- 2) Bila tujuannya didasarkan pada kepentingan segolongan orang atau beberapa orang □ oligarchi, clique form atau plutocrasi (plutos : kekayaan, cratein/cratia : memerintah □ pemerintahan dimana pimpinan Negara berada di tangan segolongan orang kaya).
- 3) Bila tujuannya didasarkan tidak untuk kepentingan rakyat seluruhnya tetapi nama rakyat yang dipakai □ demokrasi.

- c. Bentuk gabungan (mixed form) antara bentuk cita dengan bentuk pemerosotan

Dalam kenyataannya, bentuk Negara cita tidak pernah terlaksana, melainkan selalu menjadi bentuk campuran. Oleh sebab itu dalam kenyataannya bentuk Negara dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Bentuk Negara campuran (mixed form)
- b. Bentuk Negara pemerosotan (corruption or degenerate form).

## 5. Epicurus (342-271 AD)

Pendapat Epicurus menyimpang dari pendapat umum yang ada di Yunani saat itu. Menurut pendapat Epicurus, masyarakat ada karena adanya kepentingan manusia sehingga yang berkepentingan bukanlah masyarakat sebagai satu kesatuan tetapi manusia-manusia itu yang merupakan bagian dari masyarakat. Manusia sebagai warga di dalam Negara dimisalkan sebagai sebutir atom atau sebutir pasir, jadi bersifat atomistis, hanya memikirkan hidup untuk diri sendiri. Pandangan ini disebut pandangan yang bersifat individualistis.

Berdasarkan pandangan individualistis, Epicurus berpendapat bahwa terjadinya Negara disebabkan karena adanya kepentingan perorangan. Dan tujuan Negara adalah menjaga tata tertib dan keamanan dalam masyarakat dan tidak memperdulikan macam, sifat atau bentuk Negara. Sedangkan tujuan masyarakat

adalah kepentingan pribadi. Agar tidak timbul perselisihan diantara warga maka dibuatlah undang-undang sebagai hasil dari suatu perjanjian.

#### 6. Zeno ( ± 300 AD)

Zeno merupakan pemimpin aliran filsafat Stoazijnen (stoa : jalan pasar yang bergambar/beschilderde marktgaanderij) yang hidup dalam zaman yang serba sulit, sama dengan Epicurus. Zeno mengajarkan pahamnya kepada murid-muridnya di jalan yang bergambar. Aliran stoazijnen menimbulkan hukum alam (natuurrecht) atau hukum asasi dalam kebudayaan Yunani.

Ajaran hukum alam membedakan alam menjadi dua bagian, yaitu :

##### a. Kodrat manusia (natuur van de mens)

Kodrat manusia dilihat kepada sifat-sifat manusia. Yaitu kodrat yang terletak dalam budi manusia yang merupakan zat hakikat sedalam-dalamnya dari manusia, dan budi itu bersifat tradisional.

Agama bersifat pantheistisch (pan : dimana-mana; theos :Tuhan ± Tuhan ada dimana-mana). Dengan demikian, agama meyakini bahwa Tuhan ada dimana-mana. Tuhan merupakan kodrat itu sendiri. Manusia merupakan bagian dari kodrat, otomatis, manusia merupakan bagian dari Tuhan sehingga budi manusia merupakan bagian dari budi Tuhan. Oleh karena Tuhan bersifat abadi maka budi Tuhan juga bersifat abadi, budi manusia pun abadi. Hal ini mengakibatkan hukum sebagai ciptaan budi manusia juga bersifat abadi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum alam bersifat abadi, meliputi segala-galanya karena berlaku bagi setiap orang dalam waktu, tempat dan keadaan bagaimanapun.

Manusia dilukiskan secara statis sehingga hukum bagi manusia juga tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara hukum yang berlaku sekarang (ius constitutum) dan hukum yang akan datang (ius constituendum).

Oleh karena itu paham kenegaraan didasarkan pada sifat tersebut, yaitu kosmopolitis yang tidak mengenal perasaan kebangsaan. Negara tidak usah berdasarkan perasaan kebangsaan, harus diusahakan suatu Negara yang meliputi seluruh dunia atau Negara yang merupakan Negara dunia.

b. Kodrat benda (natuur van de zaak)

Yaitu kodrat benda yang timbul dalam kebudayaan Yunani. Yaitu kodrat yang mempunyai pengertian sentral kosmos, sebagai lawan dari chaos.

Menurut Socrates, Plato dan Aristoteles, pelukisan dunia sebagai kosmos merupakan satu kesatuan yang teratur sedangkan di dunia dalam bentuk chaos, tidak ada paksaan terhadap suatu aturan, tidak terdapat suatu tatanan sehingga dalam masyarakat terdapat kekacauan.

7. Polybios (204-122 AD)

Mengenai negara, Polybios melanjutkan paham Aristoteles. Menurut Polybios, proses perkembangan, pertumbuhan dan kemerosotan bentuk-bentuk negara secara psikologis bertalian dengan sifat-sifat manusia menurut ajaran Aristoteles, yaitu bahwa tidak adanya bentuk negara yang abadi disebabkan karena terkandung benih-benih pengrusakan, seperti pemberontakan, revolusi dll.

Benih-benih tersebut disebabkan karena sifat-sifat manusia, yaitu :

a. Keinginan akan persamaan

Yaitu terdapatnya hasrat persamaan terhadap mereka yang merasa dirinya sama dengan orang-orang lain .

b. Keinginan akan perbedaan

Yaitu terdapatnya hasrat perbedaan terhadap mereka yang merasa dirinya berbeda dengan orang lain.

## **Zaman Romawi**

### **1. Masa Kerajaan**

Yaitu masa koningschap atau kerajaan. Bentuk negara adalah monarki dan dipimpin oleh seorang raja.

### **2. Masa Republik**

Republik atau republiek berasal dari kata res (kepentingan) dan publica (umum). Republik adalah pemerintahan yang dijalankan untuk kepentingan umum.

### **3. Masa Prinsipat**

Masa principat dimulai dari masa Caesar. Walaupun pada saat itu, raja-raja Romawi belum mempunyai kewibawaan, namun pada hakekatnya mereka memerintah secara mutlak.

Kemutlakan ini didasarkan pada Caesarismus, yaitu adanya perwakilan yang menghisap, dari pihak Caesar terhadap kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat saat itu disalahgunakan, dimana dalam lapangan ilmu negara digunakan konstruksi Ulpianus yang menyatakan, bahwa : kedaulatan rakyat diberikan kepada prinsep atau raja melalui suatu perjanjian yang termuat dalam undang-undang yang disusun olehnya dan diatur dalam Lex Regia. Jadi, landasan hukumnya adalah perjanjian yang terletak dalam lapangan hukum perdata. Setelah kekuasaan diberikan kepada Prinsep maka rakyat pada kenyataannya tidak dapat meminta pertanggung jawaban atas perbuatan prinsep.

Ahli hukum (doktoris iuris) yang terkenal pada saat itu adalah Gajus, Modestinus, Paulus, Papinianus dan Ulpianus.

Dalam caesarismus dikenal semboyan yang berbunyi :

- a. Solus publica suprema lex (kepentingan umum mengatasi undang-undang)
- b. Princeps legibus solutus est (Rajalah yang menentukan kepentingan umum).

Pada dasarnya, pemerintahan untuk kepentingan umum tersebut dirumuskan dalam undang-undang sehingga derajat kepentingan umum lebih tinggi dari

undang-undang. Namun, yang merumuskan kepentingan umum adalah raja. Otomatis, dalam merumuskan kepentingan umum tersebut raja bertindak demi kepentingan pribadinya.

Dengan demikian, princep dengan berkedok kedaulatan rakyat memerintah demi kepentingan umum, sebenarnya memerintah dengan sewenang-wenang.

Peraturan hukum Romawi pada abad ke-6 atas perintah Kaisar Justinianus (527-565) dikodifikasi dan dinamakan *Corpus Iuris Civilis* yang terdiri atas 4 bagian :

a. *Institutiones*

Merupakan buku pelajaran atas lembaga-lembaga hukum Romawi dan berlaku sebagai himpunan undang-undang.

b. *Pandectae* atau *Digesta*

Merupakan himpunan karangan yang memuat pendapat para ahli hukum Romawi. Jika hakim ragu-ragu mengenai putusan atas suatu hal maka putusannya harus didasarkan pada *pandectae/digesta*.

c. *Codex*

Merupakan kumpulan undang-undang yang dibuat dan ditetapkan oleh raja-raja Romawi.

d. *Novellae*

Merupakan himpunan tambahan dan penjelasan keterangan bagi *codex*.

4. Masa Dominat

Dominat atau *dominaat* adalah masa dimana kaisar secara terang-terangan menjadi raja mutlak, bertindak menyeleweng, menginjak-injak hukum dan kemanusiaan. Hal ini terlihat dengan adanya manusia dibakar hidup-hidup, manusia diadu dengan manusia lain atau dengan singa (*gladiator*) dan dijadikan tontonan umum, rakyat kelaparan sementara raja dan pengikutnya berpesta pora.

## **Zaman Abad Pertengahan**

### **1. Agustinus**

Bukunya yang terkenal ialah :

#### **a. Civitas Dei (Negara Tuhan)**

Civitas dei merupakan kerajaan Tuhan yang abadi, tetapi semangat keduniawian terdapat dalam Gereja Kristus sebagai wakil dari civitas dei di dunia yang fana.

#### **b. Civitas Terrena (Diabolis) atau negara setan**

Merupakan hasil kerja setan atau keduniawian. Jika sudah mendapat ampunan dari Tuhan, barulah civitas terrena menjadi baik.

Civitas terrena mengabdikan diri pada civitas dei. Oleh karena itu dalam civitas terrena terjadi percampuran antara agama, ilmu pengetahuan dan kesenian. Civitas terrena merupakan persiapan menuju civitas dei.

Imperium Romawi dapat dimisalkan dengan civitas terrena yang tumbuh, berkembang dan akhirnya musnah karena keserakahan. Agar jangan sampai hal tersebut terulang kembali, maka pemimpin negara harus memimpin dengan semangat civitas dei yaitu mempraktekkan dan menganjurkan agar agama Kristen dimasukkan ke dalam negara seperti yang telah dijalankan oleh Konstantin Theodisius di Konstatinopel

Kesimpulannya adalah bahwa pada waktu itu yang memegang peranan penting adalah negara, segala sesuatu harus tunduk pada agama. Negara dipersiapkan untuk menjadi negara Tuhan. Keberadaan negara-negara di dunia adalah untuk memberantas musuh-musuh gereja.

### **2. Thomas Aquino**

Thomas Aquino merupakan tokoh dari aliran hukum alam.

Menurut sumbernya, hukum alam dapat berupa :

#### **a. Hukum alam yang bersumber dari Tuhan (irrasional)**

#### **b. Hukum alam yang bersumber dari rasio manusia.**

Dalam buku-bukunya yang sangat terkenal, *Summa Theologica* dan *De Regimine Principum*, Thomas Aquino membentangkan pemikiran hukum alamnya yang banyak mempengaruhi gereja dan bahkan menjadi dasar pemikiran gereja hingga saat ini.

Thomas Aquino membagi hukum ke dalam 4 golongan hukum, yaitu :

a. Lex Aeterna

Merupakan rasion Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia.

b. Lex Divina

Merupakan bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya.

c. Lex Naturalis

Merupakan hukum alam yaitu yang merupakan penjelmaan dari *lex aeterna* di dalam rasio manusia.

d. Lex Positivis

Yaitu hukum yang berlaku dan merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia.

Hukum positif terdiri dari hukum positif yang dibuat oleh Tuhan, seperti yang terdapat dalam kitab suci dan hukum positif buatan manusia.

Mengenai konsepsinya tentang hukum alam, Thomas Aquino membagi asas-asas hukum alam dalam dua jenis, yaitu :

a. Principia Prima (asas-asas umum)

Yaitu asas-asas yang dengan sendirinya dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya, berlaku mutlak dan tidak dapat berubah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang melakukan kejahatan, sebagaimana yang terdapat dalam 10 perintah Tuhan.

b. Principia Secundaria (asas-asas yang diturunkan dari asas-asas umum)

### 3. Dante Alighieri

Pada tahun 1313, Dante menerbitkan bukunya, *De Monarchia*, salah satu karya besarnya dan merupakan satu-satunya peninggalan Dante yang merupakan karya kenegaraan. Dalam bukunya, Dante memimpikan suatu kerajaan dunia yang melawan kerajaan Paus. Kerajaan dunia tersebut yang akan menyelenggarakan perdamaian dunia. Tujuan negara menurut Dante adalah untuk menyelenggarakan perdamaian dunia dengan cara memberlakukan undang-undang yang sama bagi semua umat.

*De Monarchia* terdiri atas 3 bab, yaitu :

a. Bab I mempersoalkan kerajaan dunia.

Pada bab I, Dante menekankan perlunya kerajaan dunia, yaitu untuk kepentingan dunia itu sendiri dalam rangka menyelenggarakan perdamaian dunia.

Kerajaan dunia merupakan kemerdekaan dan keadilan tertinggi. Rakyat yang hidup dengan berbagai peraturan yang berbeda diatasi dengan peraturan yang dapat menciptakan kerjasama diantara masyarakat.

Kerajaan dunia (*imperium*) merupakan satu kesatuan kekuasaan, sebab jika kerajaan dibagi maka akan musnah.

b. Bab II menyelidiki apakah kaisar Jerman itu merupakan kaisar yang sah?

c. Apakah kekuasaan kaisar berasal dari Tuhan atau berasal dari perantara?

Genesis dianggap sebagai sumber bagi teori Innocentius III untuk Teori Cahayanya sebagai kunci kekuasaan Paus yang berasal dari Mattheus, Teori Dua Belah Pedang dari Bernard Clairvaux, demikian pula ajaran Hadiah dari Constantin.

semua teori tersebut ditafsirkan oleh Dante sehingga akhirnya dia menyimpulkan bahwa kaisar memperoleh kekuasaan langsung dari Tuhan untuk memerintah dan mengurus negara, dan tidak bergantung pada perantara yang menjelma dalam diri Paus. Paus hanya berkuasa dalam segala hal yang berkaitan dengan rohani.



Pendapat Dante didukung oleh golongan Franciskaan, yaitu para paderi yang menganjurkan agar Paus bersifat pendeta kembali yang hidup dengan sederhana dan semata-mata untuk kesucian Tuhan. Oleh karena itu, Paus jangan mencampuri urusan kemewahan dunia yang dapat merusak kepercayaan rakyat.

Teori Cahaya :

Golongan Canonist berpendapat bahwa Paus memperoleh kekuasaan yang asli di atas dunia ini. Raja tidak memiliki kekuasaan yang asli sebab kekuasaannya berasal dan diturunkan dari Paus yang asli. Seperti halnya matahari dan bulan, Paus adalah matahari yang bersinar sedangkan bulan adalah raja yang mendapat sinar dari matahari.

#### 4. Marsiglio di Padua (Marsilius dari Padua)

Pada tahun 1324, terbit karya Marsiglio yang terkenal, yaitu *Defenser Pacis*, yang terdiri dari tiga buku atau *dictiones*, yaitu :

##### a. Dictio Pertama menguraikan dasar-dasar negara.

Pada dictio pertama diuraikan asal usul negara didasarkan pada perkembangan alam. Oleh karena itu, negara merupakan badan iudicialis seu consiliativa yang hidup dan bebas. Tujuan tertinggi negara adalah mempertahankan perdamaian, memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengembangkan dirinya secara bebas. Tugas utama negara untuk mencapai hal tersebut adalah menciptakan undang-undang demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kekuasaan tertinggi dalam negara dan pemerintahan terletak pada pembuat undang-undang sehingga pemerintahan hanya alat dari pembuat undang-undang.

Pembuat undang-undang adalah rakyat sebab kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan sumber undang-undang adalah rakyat secara keseluruhan.

Pemerintahan berada di tangan rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Rakyat boleh menghukum penguasa jika ternyata penguasa melanggar undang-undang.

b. Dictio Kedua menguraikan dasar-dasar gereja dan hubungannya dengan negara.

Marsilius menentang teori cahaya, ajaran dua belah pedang dan hadiah dari Constantine. Marsilius menginginkan agar Paus dipilih oleh rakyat sehingga kekuasaan tertinggi diletakkan di tangan badan permusyawaratan gereja-gereja (concilie).

Dalam hubungan antara negara dan gereja, Marsilius berpendapat bahwa kedudukan gereja adalah di bawah negara sehingga gereja tidak berhak membuat undang-undang sebab hanya rakyat yang berhak untuk membuat undang-undang.

c. Dictio Ketiga menguraikan kesimpulan-kesimpulan.

**BAB XVIII**

**SISTEM PEMERINTAHAN ORDE LAMA, ORDE  
BARU, DAN ERA REFORMASI**

**Renaldy Syaputra**

**14140006P**

**Sistem Pemerintahan Orde Lama**

Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI. Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh Orde Baru. Bung Karno sangat keberatan masa kepemimpinannya dinamai Orde Lama. Bung Karno lebih suka dengan nama Orde Revolusi. Tapi Bung Karno tak berkutik karena menjadi tahanan rumah (oleh pemerintahan militer Orde Baru) di Wisma Yaso (sekarang jadi Museum TNI Satria Mandala Jl. Gatot Subroto Jakarta).

Tokoh dari sistem pemerintahan orde lama yang dimiliki Indonesia ialah siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Dengan segenap pemikiran, kepintaran, dan kecakapannya, Bung Karno perlahan mulai "membangun badan" negara ini. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968.

Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno digulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Negara berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Kondisi sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan hampir bangkrut.

Indonesia di masa Orde Lama (Soekarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda ekonominya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok – kelompok nasionalis lainnya. Kondisi ekonomi saat itu sangat parah dengan ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun 1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966. Keadaan ekonomi keuangan pada masa orde lama amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

- Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
- Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
- Kas negara kosong.
- Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

- Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
- Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

- Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
- Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.

Pada Orde Lama terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa Orde Lama, yaitu :

- ☐ 1950-1951 - Kabinet Natsir
- ☐ 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
- ☐ 1952-1953 - Kabinet Wilopo
- ☐ 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- ☐ 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
- ☐ 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- ☐ 1957-1959 - Kabinet Djuanda

Era 1950 - 1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

### **Sistem Pemerintahan Orde Baru**

Jatuhnya Soekarno merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Supersemar adalah titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama. Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap

orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967 (ditolaknya Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno), Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tumbuh subur. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial.

Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan Koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program “Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997-1998.

### **Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997**

Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF justru memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara. Krisis ekonomi

mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah.

Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp 17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan “Gerakan Cinta Rupiah”, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang disusun Soeharto ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan keahliannya. Kondisi itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi.

### **Gerakan reformasi**

Gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain (1) suksesi kepemimpinan nasional, (2) amandemen UUD 1945, (3) pemberantasan KKN, (4) penghapusan dwifungsi ABRI, (5) penegakan supremasi hukum, dan (6) pelaksanaan otonomi daerah.

Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Puncak kekesalan demonstran ketika terjadi Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan besar-besaran Mei 1998 (Kerusuhan Mei 1998) sehari setelah kejadian tersebut. Beberapa hari mereka menduduki gedung Parlemen kala itu. Ketika didalam gedung terjadi rapat pleno Anggota Dewan. Akhir dari itu tanggal 21 Mei 1998 Suharto secara resmi mengundurkan diri sebagai presiden Republik Indonesia kemudian digantikan oleh wakilnya BJ.Habibie. Setelah Habibie terpilih menjadi presiden menggantikan Suharto. Habibie membentuk kabinet baru yang bernama "Kabinet



Reformasi". Seperti dilansir dari wikipedia, Tanggal 10 November 1998 dibentuk himpunan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), ITB Bandung, Universitas Siliwangi serta empat tokoh reformasi yaitu Abruhran Wahid (Gus Dur), Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Sukarno Putri. Mereka mengadakan dialog nasional di kediaman Gusdur, Ciganjur, Jakarta Selatan, dan menghasilkan 8 Butir Kesepakatan, yaitu :

- Mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan nasional.
- Menegakkan kembali kedaulatan rakyat.
- Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah.
- Melaksanakan pemilu yang jujur dan adil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi.
- Penghapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap
- Mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya.
- Mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri.
- Pidato pengunduran diri Soeharto

Kejatuhan Suharto adalah peristiwa mundurnya Suharto dari jabatan Presiden Indonesia. Suharto mundur pada Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya.

“Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkan Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat

sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.” (Pidato pengunduran diri). Kejatuhan Suharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968. Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999(melalui pemilu). Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Suharto juga membatasi kebebasan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah \$AS 15 miliar sampai \$AS 35 miliar. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

### **Sistem Pemerintahan Pada Masa Reformasi**

Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis. Selain itu pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan

demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi 38 orang. Langkah ini yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat. Presiden Habibie mencabut lima paket undang-undang tentang politik. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu antara lain undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum tahun 1999. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan cukup ketat. Setelah perhitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional.

Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999

diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolahkan, 322 menerima, 9 absen dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri mejadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza MAhendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkna diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnopoutri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekaroputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia tidak sampai pada akhir masa jabatannya. Beliau menduduki jabatan sampai tahun 2001 dikarenakan munculnya ketidakpercayaan parlemen padanya. DPR/MPR kemudian memilih dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia. Masa kekuasaan Megawati berakhir pada tahun 2004.

Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pada pemilihan umum ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009.

## **BAB XIX**

# **AJARAN KOMUNISME**

**Rizki fitria ulfa**

**14140037**

### **Pengertian Komunisme**

Istilah komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Akan tetapi yang terjadi justru dihapuskannya sistem republik dan Louis Philippe diangkat sebagai raja. Hal tersebut melahirkan munculnya gelombang perkumpulan revolusioner rahasia di Paris pada tahun 1830-1840an.

Istilah komunis awalnya mengandung dua pengertian. Pertama, hubungan mengenai komune, satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara sebagai federasi komune-komune tersebut. Kedua, lebih erat hubungannya dengan serikat rahasia dan serikat yang terbuang seperti perkumpulan Liga Komunis (1847) di kalangan orang Jerman yang hidup terbuang di negara lain (Paris). Dan yang ketiga, ia dapat digunakan untuk menunjukkan milik atau kepunyaan bersama seperti yang digunakan oleh Cabet dan pengikutnya di Inggris pada 1840-an.

Istilah komunis sebagai suatu paham gerakan (ideologi) yang kemudian digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong militan. Marx dan Engels menggunakan istilah dari karya mereka dengan apa yang disebut dengan manifesto komunis. Ini untuk memberikan pengertian yang revolusioner sekaligus memperlihatkan kemauan untuk “bersama”, bersama dalam arti hak milik dan dalam hal menikmati sesuatu.

### **Plato (429-347 SM)**

Bagi Plato kepentingan orang-seorang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Plato lebih cenderung untuk menciptakan rasa kolektivisme, rasa bersama, daripada penonjolan pribadi orang perorang. Oleh karena itu, mengenai cara kehidupan sosial, Plato mengemukakan “semacam komunisme” yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamily atau berkeluarga. Ia memandang adanya hak milik hanya akan mengurangi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dan keperluan jasmaniah seseorang akan dicukupi oleh negara sepenuhnya. Akan tetapi “komunisme” cara Plato ini terbatas pada kelas-kelas penguasa dan pembantu penguasa saja, sedangkan kelas pekerja dibenarkan memiliki hak milik dan berkeluarga sebab merekalah yang akan menghidupi kelas-kelas lainnya.

### **Karl Marx (1770-1831)**

Penggunaan istilah komunis dalam hasil karya mereka (dengan sebutan manifesto komunis) adalah untuk memberikan pengertian yang bersifat revolusioner sembari terus mengusung keinginan mereka untuk “bersama”, bersama dalam hal milik maupun menikmati sesuatu.

Masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Marx adalah suatu komunitas yang tidak berkelas, namun tenteram dan tenang, manusia yang memiliki disiplin diri dan memandang pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan, lepas dari pemikiran perlu tidaknya sebuah pekerjaan dipandangan dari segi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber dari kebahagiaan serta kegembiraan. Orang bekerja bukan untuk memenuhi nafkah melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani peran sesuai dengan kesanggupannya.

Pada tahun 1844 Marx menulis *Economic and Philosophic Manuscript*. Dalam tulisannya Marx dengan cerdas mengemukakan bahwa industrialisme benar-benar nyata dan sepantasnya disambut sebagai harapan untuk membebaskan manusia dari keterpurukan hawa nafsu akan kebendaan, ketidakpedulian, dan penyakit. Sementara kaum romantik kala itu lebih memandang industrialisme

sebagai sebuah kejahatan, Marx mengartikan alienasi sebagai akibat dari industrialisme kapitalis. Dalam manuskrip, Marx mengungkapkan bahwa kapitalisme manusia dialienasikan dari pekerjaan, barang yang dihasilkannya, majikan, rekan sekerja, dan diri mereka sendiri. Maka buruh, menurut Marx, akibat dari industrialisme kapitalis, kini tidak bekerja untuk mengaktualisasikan diri serta potensi kreatifnya sebab “pekerjaannya tidak atas dasar kesukarelaan tetapi atas dasar paksaan.

Keterasingan dari pekerjaan itu terungkap dalam keterasingan manusia dari manusia itu sendiri. Buruh terasing dari majikannya yang diakibatkan oleh kepentingan yang kontradiktif; buruh ingin bekerja dengan kebebasan sesuai kreativitasnya sendiri (minimal ia ingin mendapatkan upah yang optimal) sementara itu majikan membutuhkan ketaatan dari buruh. Majikan pun melakukan penekanan terhadap upah buruh demi perhitungan untung-rugi perusahaan. Akibatnya buruh terasing dari para buruh sebab mereka saling bersaing berebut tempat kerja. Majikan terasing dari majikan lainnya karena terlibat juga dalam persaingan.

### **Fredrich Engels (1820-1895)**

Sementara itu bagi Engel, istilah komunis ini tidak terlalu mengandung suatu pemikiran yang utopis sebagaimana Marx seakan mendalilkan bahwa komunisme sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah alienasi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme. Komunisme bagi Marx merupakan penghapusan yang pasti atas hal milik pribadi dan alienasi diri manusia karena merupakan pemberian yang nyata atas hakikat kemanusiaan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturalisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan sebuah humanisme dan sebagai humanisme yang sempurna merupakan sebuah naturalisme. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ambisius Marx sewaktu muda: “Komunisme merupakan pemecahan terhadap segala teka-teki sejarah. Dan komunisme sadar akan perannya tersebut<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Yulia Siska, ”komunisme menurut plato, marx dan angel ,” Sejarah Politik” Bandar lampung , th 2015 hlm 45

Di antara sekian banyak ideologi utama dewasa ini yang paling sering di salah pahami yang Sangat di takuti di Amerika Serikat adalah komunisme, komunisme sering di anggap sebagai alternatif utama bagi ideologi demokrasi adalah ideologi resmi Uni Soviet dan ancaman militer yang paling nyata bagi Amerika Serikat, komunisme juga merupakan ideologi resmi Republik Rakyat Cina. Yang di anggap merupakan ancaman paling riskan hingga sekarang, tetapi ketakutan terhadap komunisme memang merupakan gejala umum sepanjang abad,

Sebagai mana telah di sebutkan salah satu sebabnya adalah situasi militer dunia saat ini alasan kedua adalah bahwa komunisme bertentangan dengan kapitalisme dan demokrasi Barat dan para pemimpin komunisme membuktikan bahwa kapitalisme akan runtuh pada waktu dekat yang ketiga adalah sebuah kepercayaan akan ambisi komunis untuk menaklukkan seluruh dunia atau paling tidak berusaha membangkitkan revolusi dalam Negara Negara non komunis. Rangkaian perang dingin antara Amerika Serikat dan komunis komunis melalui krisis nuklirnya perang panas berkala dan jangka waktu dan kebencian dan ancaman yang kuat dalam jaman McCarthy juga merupakan bagian dari gambaran itu.

Ada berbagai pembicaraan tentang “komplotan komunis” dan usaha komunis dalam mengendalikan dunia dapat di temukan dalam tulisan-tulisan komunis tetapi nampaknya di salah artikan sebagian terhadap komunisme sekarang. Berdasarkan tulisan Karl Marx (1818-83) dan Friedrich Engels (1820-95) sebagaimana di kembangkan oleh Nikolai Lenin (Nama Asli : Vladimir Ilich Ulyanov : 1870 -1924) dan jumlah komunis sekarang adalah ideologi resmi dua Negara paling besar dan paling kuat di dunia, Uni Soviet dan Cina, dan jumlah Negara Negara kecil di sekelilingnya. termasuk Kuba di sebelah barat.

Gagasan ini yang di kembangkan oleh Marx, angel perbedaan antara gagasan mereka dan komunis, ada banyak kesalahan jenis yang mengubah arti komunisme Marx dan angel dalam komunisme sekarang ini adalah karena ia memandang sebagai sesuatu yang bersifat monolit yang menutup kemungkinan adanya perbedaan nasional atau bahkan proposal. Dari sini kita mengetahui bahwa komunisme ataupun Negara Negara komunis yang bersifat monolitik



selanjutnya bahwa unisoviet sangat menentang pertimbangan ini , mencoba mengecilkan atau memberangusnya secara paksa biasanya dengan keberhasilan tertentu kejadian kejadian seperti ini di Afghanistan telah kian memperjelas fenomena ini. Karena komunisme sekarang telah mengalami pertumbuhan yang cukup luas nampaknya ketika perlu mengkajinya secara seksama harus melihat filosofi dari komunisme yang di temukan dalam pemikiran Karl Marx dan Engels dan kemudian kembali pada perkembangan perkembangan dan rangkaian perubahan yang di buat dalam doktrin dasar ini oleh tokoh dan pemben lainnya.<sup>92</sup>

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan

---

<sup>92</sup> Drs.Sahat Simamora, Komunisme,"*IDILOGI TEMPORER*" penerbit –pt Bina Aksara – Jakarta 1986 ,hlm108

akumulasi modal pada individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Kelahiran Komunisme di Indonesia tak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda dan mahasiswa-mahasiswa lulusannya yang berpandangan kiri. Beberapa di antaranya Sneevliet, Bregmsma, dan Tan Malaka yang masuk setelah Sarekat Islam (SI) Semarang sudah terbentuk.

Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi juga banyak yang bergabung. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI Semarang.<sup>93</sup>

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Negara komunis adalah negara yang menggunakan ideologi bahwa setiap warga negaranya mempunyai derajat yang sama satu sama lain. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".

Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada 2005

---

<sup>93</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme>

negara yang menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Laos. Pencetus terjadinya komunisme sebagai ideologi adalah Vladimir Lenin di Rusia lewat Partainya yang bernama Partai Komunis Internasional.

Semenjak jatuhnya Presiden Suharto, aktivitas kelompok-kelompok Komunis, Marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.

Banyak orang yang mengira komunisme 'mati' dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991. Namun Komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (USSR dan negara-negara 'komunis' yang lainnya). Dan walaupun 'komunis' sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solomon di Nicaragua.<sup>94</sup>

Kaum Komunis berjuang untuk mencapai tujuannya yang terdekat, untuk menuntut pelaksanaan kepentingan-kepentingan sementara dari kelas buruh; tetapi dalam gerakan yang sekarang mereka juga mewakili dan memperhatikan masa datang gerakan itu. Di Perancis kaum Komunis menggabungkan diri dengan kaum Sosial-Demokrat menentang burjuasi yang konservatif dan radikal, tetapi dengan memegang teguh hak untuk menentukan pendirian yang kritis terhadap semboyan-semboyan dan ilusi-ilusi yang ditinggalkan turun-temurun oleh Revolusi yang besar.

Kaum Komunis mengarahkan perhatiannya terutama kepada Jerman, sebab negeri itu sedang berada dekat pada saat revolusi burjuis yang mesti akan berlangsung dalam syarat-syarat peradaban Eropa yang lebih maju dan dengan suatu proletariat yang jauh lebih maju daripada proletariat di Inggris dalam abad ketujuhbelas, dan proletariat di Perancis dalam abad kedelapanbelas, dan oleh karena itu revolusi burjuis di Jerman tidak lain hanya akan menjadi pendahuluan

---

<sup>94</sup> <http://ind.anarchopedia.org/Komunisme>

dari suatu revolusi proletar yang segera akan menyusul. Di mana-mana kaum Komunis menyokong tiap gerakan revolusioner menentang susunan tata-tertib sosial dan politik yang sekarang. Dalam segala gerakan ini mereka mengemukakan masalah milik sebagai masalah yang pokok bagi tiap gerakan, tidak pandang derajat perkembangannya pada waktu itu Akhirnya, mereka bekerja dimana saja untuk persatuan dan kerukunan partai-partai demokratis di semua negeri.

Kaum Komunis tidak sudi menyembunyikan pandangan-pandangan dan cita-citanya. Mereka menerangkan dengan terang-terangan bahwa cita-citanya dapat dicapai hanya dengan membongkar dengan kekerasan segala syarat sosial yang sedang berlaku. Biarkan kelas-kelas yang berkuasa gemetar menghadapi revolusi Komunis. Kaum proletar tidak akan kehilangan suatu apapun kecuali belenggu mereka. Mereka akan menguasai dunia.<sup>95</sup>

Paham Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifest politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19an, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dengan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangannya yang saling berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Definisi komunisme atau paham komunisme. Paham komunisme adalah paham yang merupakan sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan produk masyarakat liberal.

---

<sup>95</sup><https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1848/manifesto/ch01.htm>

Komunsime muncul sebenarnya sebagai reaksi penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah. Berolak belakang dengan individualism kapitalisme, paham komunisme yang dicetuskan melalui pemikiran Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada.

Istilah komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan. Pengertian Komunisme. Istilah komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan. Pengertian paham komunisme devinisi pemerintahan komunis Polandia tujuan negara komunisme sejarah paham komunis pengertian paham komunis, pengertian komunis, pemikiran komunis , hal-hal yang berkaitan dengan komunisme .

Istilah komunis mulai populer PENGENALAN KEPADA KARL MARX. Karl Marx dilahirkan pada KELAS SOSIAL MENURUT MARX “ those individuals who Politik di Negeri Barat’ pula memberi dua pengertian bagi komunisme Sejarah Berdiri dan Tokoh-tokohnya Karl Marx adl Segala perubahan yg terjadi di dunia ini menurut pengertian paham komunisme Devinisi pemerintahan komunis Polandia tujuan Menurut Marx, pengertian Hegel atas aspek ini merupakan ini, tak perlu diragukan lagi Karl Marx punya arti penting yang luar biasa hebatnya.

Secara Umum Pengertian Komunisme(Pengertian dan Penjelasan Sistem perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx Menurut Griffin, tidak ada satu negara melalui dua tokoh filsuf Jerman, Karl Marx dan Friedrich agama adalah perlu demi keberhasilan Komunisme. Saat Marx dan Engels Menurut perhitungan, sekitar sepuluh juta petani tewas Ideologi Komunisme Komunisme adalah salah satu der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Pengertian Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara Buah Komunisme di Uni Sovyet.

Pandangan Karl Marx dan Engels tumbuh dan berkembang Menurut para ahli sejarah, Stalin merasakan Dan dasar berpijak filsafat ini, dalam pengertian Pengertian dan Pentingnya Ideologi bagi paham liberalism-individualisme,

komunisme yang dicetuskan melalui pemikiran Karl Marx Menurut komunisme, Ideologi hanya diperuntukan<sup>96</sup>.

Menurut Marx, bahwa sosialisme sebenarnya berasal dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Diskursus mengenai sosialis, sesungguhnya sudah muncul pada masa pencerahan, abad ke-18, dengan beberapa tokoh, diantaranya: Marquis de Concorde, Voltaire, J.J Rousseau, Diderot, dll. Mereka merupakan para pemikir dan penulis revolusioner asal Perancis.

Adapun tokoh dan pemikir kaum sosialisme, diantaranya: Francois-Noel Babeuf (1760-1797), seorang inspirator bagi kaum sosialis aliran keras, Saint-Simon, Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), seorang sosialis yang paling utopis, dan seorang feminisme radikal, Etienne Cabet (1788-1856), seorang pengacara, Louis-Auguste Blanqui (1805-1881), seorang revolusioner yang hendak mencapai sosialisme melalui pemberontakan kaum buruh.

Komunisme merupakan sayap radikal sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Frederich Engels. Marx secara pemikiran memang berkembang di wilayah sosialis dan berkawan dekat dengan beberapa orang sosialis, seperti: Proudhon, Weithling, dll. Meskipun dikemudian hari Marx bersebrangan dengan Proudhon yang jelas-jelas menolak komunisme dan kapitalisme, dan Weithling yang menolak pola sosialisme Marx dan Engels.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19an, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dengan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangannya yang saling berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar

---

<sup>96</sup> [http://aanbee.blogspot.co.id/2011/05/paham-komunisme-menurut-karl-marx\\_15.html](http://aanbee.blogspot.co.id/2011/05/paham-komunisme-menurut-karl-marx_15.html)

(lihat: The Holy Family <sup>[1]</sup>), namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati karena korupsi yang dilakukan oleh para pemimpinnya.

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh Secara umum komunisme berlandaskan pada teori Dialektika materi oleh karenanya tidak bersandarkan pada kepercayaan agama dengan demikian pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa “agama dianggap candu” yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).

### **Komunis Internasional**

Komunis internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos. Komunis internasional adalah teori yang disebutkan oleh Karl Marxis.

### **Indonesia dan komunisme**

Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi

perang yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

Komunisme di Indonesia memiliki sejarah yang kelam, kelahirannya di Indonesia tak jauh Kehancuran PKI fase awal ini bermula dengan adanya Persetujuan Prambanan yang memutuskan akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju karena komunisme di Indonesia kurang kuat mencoba menghentikannya. Namun para tokoh PKI tidak mau menggubris usulan itu kecuali mereka yang ada di pihak Tan Malaka. Pemberontakan itu terjadi pada tahun 1926–1927 yang berakhir dengan kehancuran PKI dengan mudah oleh pemerintah Hindia Belanda. Para tokoh PKI menganggap kegagalan itu karena Tan Malaka mencoba menghentikan pemberontakan dan mempengaruhi cabang PKI untuk melakukannya.

Gerakan PKI lahir pula pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang diawali oleh kedatangan Muso secara misterius dari Uni Sovyet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan kepercayaannya yang murni komunisme. Disana ia juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit. Musso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun. Disana ia dikabarkan mendirikan Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin yang tidak jelas ideologinya. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Muso ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ini adalah konflik intern antarmiliter Indonesia pada waktu itu.

Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, dimana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Permusuhan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat



bawah dimana tingkat anarkisme banyak terjadi antara tuan tanah dan para kaum rendahan. Namun Soekarno menjurus ke kiri dan menganak-emaskan PKI. Akhirnya konflik dimana-mana terjadi. Ada suatu teori bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Yakni PKI yang mengusulkan Angkatan Perang Ke 5 (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian) dan isu penyergapan TNI atas Presiden Soekarno saat ulang tahun TNI. Munculah kecurigaan antara satu dengan yang lain. Akhirnya dipercaya menjadi sebuah insiden yang sering dinamakan Gerakan 30 September.

Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis andai saja PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan setelah terjadinya kudeta dan peng-kambing hitaman komunisme sebagai dalang terjadinya insiden yang dianggap pemberontakan pada tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Gerakan 30 September. Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara 500.000 sampai 2 juta jiwa manusia dibunuh di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini merupakan halaman terhitam sejarah negara Indonesia. Para tertuduh yang tertangkap kebanyakan tidak diadili dan langsung dihukum. Setelah mereka keluar dari ruang hukuman mereka, baik di Pulau Buru atau di penjara, mereka tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan Eks Tapol.

Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok komunis, marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.

Banyak orang yang mengira komunisme ‘mati’ dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991, yang diawali dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev. Namun komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya). Dan walaupun komunis sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi

telah dilakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solentiname di Nikaragua.

Seperti yang digambarkan Anthony Giddens, komunisme dan sosialisme sebenarnya belum mati. Ia akan menjadi hantu yang ingin melenyapkan kapitalisme selamanya. Saat ini di banyak negara, komunisme berubah menjadi bentuk yang baru. Baik itu Kiri Baru ataupun komunisme khas seperti di Kuba dan Vietnam. Di negara-negara lain, komunisme masih ada didalam masyarakat, namun kebanyakan dari mereka membentuk oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa.

Beberapa waktu lalu saya ngeliat “canda-candaan” antara Papernas dan FPI di bilangan Sudirman. Sayangnya “canda-candaan” itu harus dibayar mahal mengingat ada korban cedera, bus kota diamuk dan dirusak, dan tentu saja bikin macet seputaran Sudirman yang memang sudah langganan macet.

Malam harinya, Papernas didatangkan untuk berdiskusi di sebuah televisi swasta. Mereka memang mengaku mengusung sosialisme — kendati mengedepankan demokrasi kerakyatan dan tetap mengakui Pancasila serta UUD 1945. Sementara yang duduk di seberang mempermasalahkan soal Papernas yang mengusung jargon, atribut, bendera yang identik dengan komunis. Sayangnya, dialog tersebut lebih mirip debat kusir tanpa ada solusi dan penyelesaian berarti.

Mengenai ketakutan terhadap paham komunis (PKI) yang mungkin tumbuh lagi, sebenarnya wajar adanya. Ideologi tersebut memang boleh dilarang melalui undang-undang demi melindungi kepentingan negara. Pelarangan itu sesuai dengan human rights. Orang-orang Jerman, misalnya, sampai kini pun sangat antipati terhadap Nazi. Atribut, jargon, dan simbol yang identik dengan Hitler dilarang keras di negeri itu.

Saya sendiri tidak terlalu mencemaskan akan “kelahiran” kembali komunisme di Indonesia. Faham kekirian terbukti sangat tidak populer di hati rakyat Indonesia. PKI memang pernah jadi salah satu partai dengan kader luar biasa, namun watak sewenang-wenang dan strategi yang penuh intimidasi membuatnya kontroversial. Apalagi PKI kemudian terpancing untuk melakukan gerakan yang pada akhirnya malah menghancurkan dirinya sendiri.

Terbukti bahwa komunis juga gagal total di Uni Soviet, Yugoslavia, dan negara-negara Eropa timur lainnya. China dan Vietnam memang masih mengaku komunis, namun disebabkan karena “alasan praktis” saja, mengingat merubah suatu paham di negeri tersebut sangat mahal ongkos politik dan ekonominya. Pada prakteknya, China malah membuka pintu lebar-lebar buat pemodal asing (baca: pro-kapitalis). Sosialisme, praktis tak lagi banyak dianut di bumi ini.

Berkaca dari China, sebaiknya kita memang tidak melihat dikotomis antara sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme, kalau dilihat dari dalil Karl Marx, adalah usaha ilmiah untuk memproyeksikan perjalanan dan nasib modal. Marx menggunakan pendekatan deterministik yang kemudian jadi ciri khas sosialisme. Sayangnya, untuk bisa konsisten determinis dalam ilmu sosial, seseorang musti mengasumsikan bahwa masa depan berjalan linier.

Faktanya, di masyarakat ada sebagian orang yang lebih cerdas, lebih berbakat, lebih oportunis, yang ingin naik kelas sosialnya (upgrading). Inilah yang kemudian memunculkan kapitalisme: dorongan trial and error yang dilakukan di level individu yang meluas ke masyarakat. Desain asli kapitalisme memang ditujukan buat orang biasa yang ingin naik kelas, baik secara ekonomi maupun politik.<sup>97</sup>

### **Reaksi Anti Komunis**

Karena keberhasilan PKI dalam pemilihan DPRD jelas diraih dengan merugikan PNI, perasaan yang terungkap dalam pembelan diri hadi soebeno, kepada DPD di ulangi lagi oleh para pemimpin PNI dalam pernyataan terbuka, pada febuari 1957, PNI membalikkan strategi dengan tampil mendukung Konsepsi Sukarno, suatu sikap yang berarti mendukung di masukkannya PKI ke dalam kabinet dan akibatnya mengeluarkan masyumi berhadapan dengan sikap kepala batu angkatan darat dan gerakan daerah yang meningkat. PNI lebih memilih menempatkan diri di belakang presiden, hasilnya hubungan PNI dengan PKI membaik.

---

<sup>97</sup> <https://wotbuwono.wordpress.com/2010/12/27/sosialisme-memandang-komunisme/>

Namun, meski gagal di beberapa kabupaten, persekutuan PNI Masyumi – NU berhasil membatasi keuntungan yang diperoleh PKI dari kemenangan dalam pemilihan umum. Tetapi, justru pada tingkat inilah kelemahan semangat anti komunisme sebagai dasar persekutuan PNI –Masyumi- NU terungkap secara jelas, karena meskipun ada ketakutan yang sangat kuat di kalangan pemimpin ke tiga partai ini akibat kemenangan PKI dalam pemilihan umum, anti komunisme sebagai isu tidak penting. Isu mengenai usulan demokrasi terpimpin di lontarkan Presiden Sukarno atau isu pemberontakan daerah terhadap kewibawaan pemerintah pusat. Ada perbedaan pendapat yang sedemikian rupa atas isu-isu di antara PNI, NU, dan Masyumi sehingga menghapuskan kepentingan bersama dalam persekutuan anti komunis.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> J. ELISEO ROCAMORA, Reaksi anti komunis "Nasionalisme mencari sosiologi", th 1991, Hlm 240

## **BAB XX**

# **IMPERIALISME DAN KOLONIALISME**

**Maryati**

**14140026**

### **Dampak Kolonialisme terhadap Politik Dunia Ketiga**

Para pakar sejarah abad yang akan datang akan melihat kembali periode tahun 1500 sampai 2000 sebagai zaman salah satu peristiwa dunia yang paling menarik dan bermakna ekspansi orang-orang Eropa keluar benua mereka sendiri untuk menjelajah, mendiami, dan menguasai sebagian besar bumi yang lain, dan untuk membawa serta ideologi, teknologi, dan lembaga-lembaga modernitas mereka. Secara historis, periode kekuasaan orang-orang Eropa atas bumi kita relatif singkat. Menjelang tahun 1776, kurang dari 300 tahun sesudah dimulainya ekspansi itu, jumlah ekspansi Eropa mulai berkurang di belahan barat di bumi kita, mula-mula di utara, dengan timbulnya revolusi Amerika, dan kemudian, 30 sampai 40 tahun sesudahnya, di selatan dengan pecahnya Imperium Spanyol.

Arus balik kolonialisme berjalan hampir sama lamanya dengan pembentukannya, tetapi keruntuhan imperium dengan cepat seluruh dunia sesudah tahun 1945 agaknya semakin nyata terlihat. Kelihatannya, menjelang tahun 2000 sebagian besar hubungan kolonial secara hukum atau terhapus, dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri akan tersebar diseluruh dunia.

Namun demikian, bagaimanapun singkatnya, dominasi kolonial Eropa atas bangsa-bangsa yang kurang maju itu akan menjadi titik tolak kita untuk memasuki dunia ketiga, karena pengaruh Eropa lah yang mulai menyebarkan industrialisasi dan modernisasi keseluruh dunia. Tanpa pengalaman kolonial sebagian besar bangsa di Dunia ketiga bahkan tidak akan ada, setidaknya-tidaknya dalam bentuk yang ada sekarang, memang, daerah-daerah luas seperti Amerika Latin dan Indocina. Pasti

akan mempunyai nama yang berbeda-beda kalau kita mencarinya diatas peta.pengaruh kolonial eropa telah membuat bangsa-bangsa dibelahan bumi bagian selatan dan bagian barat suatu penemun sosial,intelektual,dan material yang telah yang telah menyebabkan merek dapat keluadari zaman kegelapan sendiri.dari hubungan dunia ketiga dengan dunia industri barat.sebagian,lagioleh ketidak mampuan elit di dunia ketiga untuk memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan-gagasan.<sup>99</sup>

### **Dampak Imperialisme dan Kolonialisme di Indonesia**

Dampak Politik, Sosial, Ekonomi, dan Budaya dari keberadaan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia, sebagai berikut.

#### **1. Perubahan dalam Bidang Politik**

- Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern.Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat.Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamog praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian.
- Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perfektuf
- Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern
- Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia.Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.

---

<sup>99</sup> I.R. Sinai the challenge of modernization (new york:norton,1964),hal 34-35

## 2. Perubahan dalam dalam Bidang Sosial

- Pembentukan status sosial dimana yang tertinggi adalah Eropa lalu Asia dan Timur Jauh yang terakhir kaum Pribumi
- Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sanga sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah belanda.
- Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk/patuh pada tuan tanah Barat/Timur Asing. Sehingga kehidupan penduduk Indonesia megalami kemerosotan.

## 3. Perubahan dalam Bidang Ekonomi

- Belanda membuka tambang minyak bumi di Tarakan Kaltim
- Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagagngan
- Liberialisme ekonomi
- Eksploitasi ekonomi, monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda.

Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya.

Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang sedangkan di Sumatra kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal Barat di Indonesia pemerintah Belanda membangun : Irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi (kerja paksa)

Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani.

#### 4. Perubahan dalam Bidang Budaya

- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.
- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito menyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
- Budaya Barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, kebiasaan minum minuman keras yang dilakukan oleh golongan bangsawan. Kebiasaan tersebut bukan milik asli bangsa Indonesia, tetapi kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsa Barat yang dibawa oleh para penjajah (Westernisasi menyebar lewat jalur pendidikan dan pemerintahan).<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> <http://atariqb.blogspot.com/2014/11/dampak-dan-faktor-terjadinya.html>



## **Masuknya Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia**

Adalah Suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya Negara lain. Koloni merupakan negeri, tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan diluar wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya Revolusi Industri di Inggris. Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan.

Penaklukan atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada mulanya mereka membeli barang dagangan dari penguasa lokal, untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan lancar mereka kemudian mulai campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat dan biasanya mereka akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya.

### **1. Masuknya Kolonialisme**

Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498. Diawali dengan pencarian jalan ke Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa Barat Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha menguasainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka.

Kolonialisme berkembang pesat setelah perang dunia I. Sejarah kolonialisme Eropa dibagi dalam tiga peringkat. Pertama dari abad 15 hingga Revolusi industri (1763) yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperialis.

a. Masa Kekuasaan VOC

Usaha bangsa Barat untuk mendapatkan benua baru dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang ingin mendapatkan rempah-rempah. Bartholomeu Dias (1492) dan Vasco daGama (1498) berkebangsaan Portugis berlayar menyusuri pantai barat Benua Afrika akhirnya tiba di Kalkuta, India. Kemudian mereka membangun kantor dagang di Kalkuta dan berdagang di Asia Tenggara. Pada tahun 1512, Portugis masuk ke Maluku sedangkan Spanyol masuk ke Tidore (1521) untuk mencari rempah-rempah.

Pada tahun 1596, pedagang Belanda dengan empat buah kapal di bawah Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Mereka mencari rempah-rempah di sana dan daerah sekitarnya untuk diperdagangkan di Eropa. Namun, karena kekerasan dan kurang menghormati rakyat maka diusir dari Banten. Kemudian pada tahun 1598, pedagang Belanda datang kembali ke Indonesia di bawah Van Verre dengan delapan kapal dipimpin Van Neck, Jacob van Heemkerck datang di Banten dan diterima Sultan Banten Abdulmufakir dengan baik. Sejak saat itulah ada hubungan perdagangan dengan pihak Belanda sehingga berkembang pesat perdagangan Belanda di Indonesia. Namun, tujuan dagang tersebut kemudian berubah. Belanda ingin berkuasa sebagai penjajah yang kejam dan sewenang-wenang, melakukan monopoli perdagangan, imperialisme ekonomi, dan perluasan kekuasaan.

Setelah bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia maka pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda membentuk kongsi dagang VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang dianjurkan oleh Johan van Olden Barnevelt yang mendapat izin dan hak istimewa dari Raja Belanda. Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan di antara pedagang

Belandasendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain, seperti (EIC) Inggris, dan dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mendapatkan keleluasaan usaha di Indonesia, VOC memiliki hak oktroi, yaitu hak istimewa. Di samping itu, VOC juga melakukan pelayaran Hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Usaha VOC semakin berkembang pesat (1623) dan berhasil menguasai rempah-rempah di Ambon dalam peristiwa Ambon Massacre. Selanjutnya tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis.

VOC selalu menggunakan Batigslot Politiek (politik mencari untung, 1602 – 1799) dengan memegang monopoli Belanda di Indonesia. Selain itu, VOC menjalankan politik *divide et impera*, yakni sistem pemecah belah di antara rakyat Indonesia. Perjalanan kongsi dagang VOC lama kelamaan mengalami kemunduran, bahkan VOC runtuh pada tanggal 31 Desember 1799.

Kemunduran VOC disebabkan hal-hal berikut.

- 1) Perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar padahal hasil dari bumi
- 2) Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah telanjur terkirim ke Negeri Belanda. VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut.
- 3) Kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat.
- 4) Terjadinya jual beli jabatan.
- 5) Tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir.
- 6) Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja, VOC harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, utang VOC semakin besar.

- 7) Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa lainnya (Inggris, Prancis, Jerman) yang dengan leluasa berdagang di Nusantara sehingga monopoli VOC hancur.

Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harta milik dan utang-utangnya diambil alih oleh pemerintah negeri Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Nederburg untuk mengurusinya, termasuk mengurus wilayah VOC di Indonesia (1800 – 1907).

#### b. Masa Kekuasaan Belanda (Prancis)

Tahun 1807 – 1811, Indonesia dikuasai oleh Republik Bataaf bentukan Napoleon Bonaparte, penguasa di Prancis (Belanda menjadi jajahan Prancis). Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koninkrijk Holland. Untuk mengurus Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia (1808 – 1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sehingga pusat perhatian Daendels ditujukan kepada pertahanan dan keamanan.

Untuk memperoleh dana, Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Akibatnya, tanah-tanah partikelir mulai bermunculan di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan, Besuki, dan sebagainya. Bahkan, rumahnya sendiri di Bogor dijual kepada pemerintah, tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tindakan dan kekejaman Daendels tersebut menyebabkan raja-raja Banten dan Mataram memusuhinya.

Untuk menutup utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaharuan tersebut, Daendels kembali menjual tanah negara beserta isinya kepada swasta, sehingga timbullah system tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, misalnya di sekitar Batavia dan Probolinggo. Kekejaman Daendels tersebut terdengar sampai ke Prancis. Akhirnya, dia dipanggil pulang karena dianggap memerintah secara autokrasi dan Indonesia diperintah oleh Jansens.

### c. Masa Kekuasaan Inggris

Keberhasilan Inggris mengalahkan Prancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk itulah ditandatangani Kapitulasi Tuntang (1811) yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dari tangan Jansens kepada Thomas Stamford Raffles, seorang Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia. Oleh karena itu, beralihlah Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Inggris.

Adapun langkah-langkah yang diambil Raffles adalah

- 1) membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan,
- 2) para bupati dijadikan pegawai negeri,
- 3) melaksanakan perdagangan bebas,
- 4) melaksanakan land rente (pajak sewa tanah) dan Raffles menjual tanah kepada swasta,
- 5) menghapuskan perbudakan, dan
- 6) kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Paku Alam (1813). Akibatnya, Mataram Yogyakarta pecah menjadi dua, yakni Kasultanan Yogyakarta di bawah HB III dan Paku Alaman di bawah Paku Alam I.

### d. Masa Kekuasaan Pemerintah Belanda

Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Van den Bosch, yang disertai tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor, seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Dalam hal ini, Van den Bosch mengusulkan adanya sistem tanam paksa. Adapun hal-hal yang mendorong Van den Bosch melaksanakan tanam paksa, antara lain, Belanda membutuhkan banyak dana untuk membiayai peperangan, baik di negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia. Akibatnya, kas negara Belanda kosong. Sementara itu, di Eropa terjadi perang Belanda melawan Belgia (1830 – 1839) yang juga menelan banyak biaya. Tujuan diadakannya tanam

paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, guna menutupi kekosongan kas negara dan untuk membayar utang negara.

Pelaksanaan tanam paksa diselewengkan oleh Belanda dan para petugasnya yang berakibat membawa kesengsaraan rakyat Bentuk penyelewengan tersebut misalnya, kerja tanpa dibayar untuk kepentingan Belanda (kerja rodi) kekejaman para mandor terhadap para penduduk, dan eksploitasi kekayaan Indonesia yang dilakukan Belanda. Melihat penderitaan rakyat Indonesia, kaum humanis Belanda menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Tanam paksa mengharuskan rakyat bekerja berat selama musim tanam. Penderitaan rakyat bertambah berat dengan adanya kerja rodi membangun jalan raya, jembatan, dan waduk. Selain itu, rakyat masih dibebani pajak yang berat, sehingga sebagian besar penghasilan rakyat habis untuk membayar pajak. Sementara itu di pihak Belanda, tanam paksa membawa keuntungan yang besar.

Praktik tanam paksa mampu menutup kas negara Belanda yang kosong sekaligus membayar utang-utang akibat banyak perang. Akhirnya, tanam paksa dihapuskan, diawali dengan dikeluarkannya undang-undang (Reglement) pada tahun 1854 tentang penghapusan perbudakan. Tanam paksa benar-benar dihapuskan pada tahun 1917. Sebagai bukti, kewajiban tanam kopi di Priangan, Manado, Tapanuli, dan Sumatra Barat dihapuskan. Setelah tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda melaksanakan politik kolonial liberal di Indonesia dengan memberikan kebebasan pada pengusaha swasta untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun, pelaksanaannya tetap menyengsarakan rakyat karena kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan kolonial Belanda.

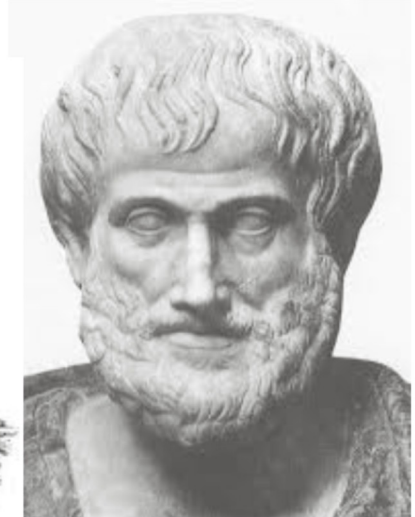
Pelaksanaan politik kolonial liberal ternyata banyak mendatangkan penderitaan bagi rakyat terutama buruh sebab upah yang mereka terima tidak seperti yang tertera dalam kontrak. Akibatnya, banyak buruh yang melarikan diri, terutama dari Deli, Sumatra Utara. Dari kenyataan di atas jelas Belanda tetap masih melaksanakan usaha menindas bangsa Indonesia.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> April 2, 2014 by alviyanjulyantosihotang (<http://matapelajaransekolahsmk.blogspot.com/2014/05/>)

# SEJARAH POLITIK

(Suatu Tinjauan Teoretik)



Penyunting Ahli:  
YULIA SISKKA, M.Pd.